

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DI
PROPINSI JAWA TENGAH SEBELUM DAN SESUDAH
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro**

Disusun oleh:

**YANUAR FREDIYANTO
NIM. C2B308003**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2010

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Yanuar Frediyanto
Nomor Induk Mahasiswa : C2B308003
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / IESP
Judul Skripsi : Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Di
Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Kebijakan
Otonomi Daerah
Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.

Semarang, Juli 2010

Dosen Pembimbing,

Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.
NIP. 19710725 199702 2001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Yanuar Frediyanto menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah."

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Agustus 2010

Yanuar Frediyanto

ABSTRAKSI

Kebijakan otonomi daerah ditetapkan dengan pemikiran hal tersebut mampu meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Namun dalam kenyataannya, data 2004-2008 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah masih rendah yang ditunjukkan dengan semakin menurunnya realisasi PAD, TPD, dan menurunnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatnya proporsi penerimaan DAU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan PAD dan kemampuan keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Objek penelitian adalah 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah mengenai penerimaan PAD dan kemampuan yang meliputi *time series* periode tahun 1994-2008. Data penelitian berupa PAD, belanja pembangunan, APBD, pajak, retribusi, PDRB, BHPBP, DAK, DAU, TPD yang diperoleh dari BPS Propinsi Jawa Tengah dalam Angka 1995-2009. Data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis *Mann-Whitney U*, dan metode kuadran.

Hasil penelitian adalah (1) ada perbedaan penerimaan daerah yang signifikan antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah, kecuali rasio PAD. Setelah otonomi daerah, pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi. Meski demikian, peningkatan penerimaan PAD tidak secara otomatis meningkatkan kontribusi PAD dalam APBD. (2) Ada perbedaan kemampuan keuangan daerah yang signifikan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah, kecuali indeks *share*. Pemerintah daerah pada era otonomi daerah mampu meningkatkan penerimaan PAD. Meski demikian, meningkatnya penerimaan PAD belum memberikan kontribusi yang besar dalam APBD. (3) Sebelum otonomi daerah diketahui bahwa sebagian besar (88,57%) daerah memiliki kemampuan keuangan yang rendah, sehingga masih mengandalkan dana dari pusat untuk membiayai belanja modal. Kondisi tersebut masih berlangsung sampai sesudah otonomi daerah, bahkan jumlah daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah rendah meningkat (dari 88,57% menjadi 91,43%).

Kata kunci : kemampuan keuangan daerah, penerimaan PAD, sebelum otonomi daerah, sesudah otonomi daerah, propinsi Jawa Tengah

ABSTRACT

Policy of regional autonomy is determined by thinking it can improve the financial independence of local governments. But in reality, the 2004-2008 data showed that the level of financial independence districts in Central Java Province, is still low as indicated by the decrease of the realization of the PAD, TPD, and the decrease in the realization of local taxes and levied in the region, and the increased proportion of revenues DAU. This study aimed to analyze the acceptance of the PAD and the financial ability districts in Central Java Province, between before and after decentralization.

The research object is the 35 District in Central Java Province, the acceptance of the PAD and the ability of time series covering the period 1994-2008. The research data in the form of PAD, development spending, budget, taxes, levies, GDP, BHPBP, DAK, DAU, TPD obtained from BPS, Central Java Province in Figures 1995 to 2009. Data analyzed by using descriptive analysis, Mann-Whitney U, and the quadrant method

The results are (1) there are significant differences in local revenues between before and after decentralization, unless the ratio of PAD. After decentralization, local governments are trying to increase revenue through increased revenue receipts taxes and levies. Nevertheless, the increase in local revenue receipts are not automatically increase the contribution of PAD in the budget. (2) There are differences in financial capability is a significant area between before and after decentralization, except share index. Local governments in the era of regional autonomy to increase acceptance of PAD. Nevertheless, the increasing acceptance of the PAD has not been a great contribution in the budget. (3) Before regional autonomy in mind that most (88.57%) regions have a low financial capability, so it is still relying on funds from the center to finance capital expenditure. Conditions are still going on until after the regional autonomy, even the number of regions that have the financial capability of low-rise area (from 88.57% to 91.43%).

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama ALLAH Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang” (Al-

Fatihah 1)

*“Hanya Engkaulah yang kami sembah,
dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan”
(Al-Fatihah 5)*

*“.....Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu
urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain), dan hanya
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (QS Alam Nasyrah : 5-8)*

*“Siapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan ssesuatu maka akan mendapatkan
apa yang diinginkannya” (man jadda wajada)*

*“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau
kita telah berhasil melakukannya dengan baik.”*

-Evelyn Underhill-

-PERSEMBAHAN-

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Alm. Ayahanda dan Bundaku yang slalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada terkira

Dan juga untuk orang-orang yang selalu mendukungku

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah.”

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Dalam proses penyusunannya segala hambatan yang ada dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H.M. Chabachib, M.Si., Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang telah memberi saran, pendapat, bantuan dan ketulusan hati dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Alm. Bapak, Ibu dan Kakak-kakakku yang selalu memberikan dukungan materi dan imateri.
4. Adinda Rini yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
5. Habib Fatahillah yang selalu memberikan nasehat dan saran, serta mendoakan supaya penulis memperoleh kelancaran dan kemudahan dalam melakukan sesuatu.
6. Pihak-pihak lain yang membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bisa berguna, terutama almamater Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Semarang, Agustus 2010

Penulis,

Yanuar Frediyanto

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
ABSTRAKSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Kegunaan Penelitian	14
BAB II TELAAH PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Konsep dan Sistem Otonomi Daerah.....	15
2.1.2 Desentralisasi Daerah	26
2.1.3 Desentralisasi Fiskal	29
2.1.4 Keuangan Daerah.....	35
2.1.5 Sumber-sumber Pendapatan Daerah	40
2.1.6 Pajak dan Retribusi Daerah	53
2.1.7 Derajat Desentralisasi Fiskal	58

2.1.8 Produk Domestik Regional Bruto	59
2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya	62
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	63
2.4 Hipotesis	70
BAB III METODE PENELITIAN	72
3.1 Jenis Penelitian	72
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi operasional	73
3.3 Populasi Penelitian	74
3.4 Jenis dan Sumber Data	75
3.5 Metode Analisis Data	75
3.5.1 Analisis Deskriptif	76
3.5.2 Analisis Statistik	79
3.5.3 Metode Kuadran	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
4.1. Gambaran Propinsi Jawa Tengah	84
4.2. Hasil Analisis Deskriptif	88
4.2.1. Kontribusi Pajak dan Retribusi	88
4.2.2. Rasio Pendapatan Asli Daerah	91
4.2.3. Rasio Pajak	94
4.2.4. Rasio Retribusi	97
4.2.5. Elastisitas Pajak dan Retribusi	99
4.2.6. Proporsi PAD	102
4.2.7. Proporsi BPHBP	105
4.2.8. Proporsi Sumbangan Daerah	107
4.2.9. Indeks <i>Growth</i>	110

4.2.10. Indeks Elastisitas	113
4.2.11. Indeks <i>Share</i>	116
4.2.12. Indeks Kemampuan Keuangan	119
4.3. Hasil Uji beda <i>Mann-Whitney U</i>	123
4.4. Kemampuan Keuangan Daerah	128
BAB V PENUTUP	139
5.1. Kesimpulan	139
5.2. Implikasi Penelitian	141
5.3. Keterbatasan Penelitian	141
5.4. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN	146

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Nilai DAU dari APBN Tahun 2004 – 2008	7
1.2	Proporsi dari Realisasi Penerimaan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2004 – 2008 (dalam Jutaan Rupiah)	8
1.3	Proporsi dari Realisasi Penerimaan DAU Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2004 – 2008 (dalam Jutaan Rupiah)	10
2.1	Hasil Penelitian Sebelumnya	62
4.1	Pembagian Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah	86
4.2	Kontribusi Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008	89
4.3	Rasio PAD Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008	92
4.4	Rasio Pajak Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008	95
4.5	Rasio Retribusi Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008	97
4.6	Elastisitas Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008	100

4.7	Proporsi PAD Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008	103
4.8	Proporsi BPHBP Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008	105
4.9	Proporsi Sumbangan Daerah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994- 2008	108
4.10	Indeks <i>Growth</i> Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008	111
4.11	Indeks Elastisitas Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008	114
4.12	Indeks <i>Share</i> Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008	117
4.13	Indeks Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994- 2008	120
4.14	Rangkuman Hasil Analisis Deskriptif	122
4.15	Hasil Uji Beda <i>Mann-Whitney U</i>	123
4.16	Rangkuman Hasil Uji Hipotesis	127
4.17	Posisi Kuadran Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Pola Kewenangan dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi Daerah	40
2.2	Kerangka Pemikiran Teoritis	70
4.1	Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah	87
4.2	Kontribusi Pajak dan Retribusi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008	91
4.3	Rasio PAD di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008 ...	93
4.4	Rasio Pajak di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008 ...	96
4.5	Rasio Retribusi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008 ...	99
4.6	Rasio Retribusi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008 ...	102
4.7	Proporsi PAD di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008	104
4.8	Proporsi BPHBP di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008 ...	107
4.9	Proporsi Sumbangan Daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008	110

4.10	Indeks <i>Growth</i> di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008 ...	113
4.11	Indeks Elastisitas di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008 ...	116
4.12	Indeks <i>Share</i> di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008 ...	119
4.13	Jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Berdasarkan IKK Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008	122
4.14a,b	Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1994-1999	131,132
4.15a,b	Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Sesudah Otonomi Daerah Tahun 2000-2008	136
4.17	Jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Berdasarkan Peta Keuangan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008	138

PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Yanuar Frediyanto

Nomor Induk Mahasiswa : C2B308003

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP

Judul Skripsi : Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota
Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah
Kebijakan Otonomi Daerah

Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 25 Agustus 2010

Tim Penguji,

1. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.
NIP. 19710725 199702 2001

2. Banatul Hayati, S.E., M.Si.
NIP.196 80316 199802 2001

3. Maruto Umar Basuki, S.E., M.Si.
NIP. 19621028 199203 1009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. UU tersebut kemudian diperbarui menjadi UU No. 32 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sesuai dengan prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, serta perimbangan keuangan yang lebih adil, maka rakyat menuntut diberlakukannya secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai wakil rakyat menjawab tuntutan tersebut dengan menghasilkan beberapa ketetapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu ketetapan MPR yang dimaksud adalah ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Keuangan Pusat dan Daerah.

Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu pada tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan dimulainya pelaksanaannya otonomi daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai

pengganti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang selama ini bersifat *ultra fires*, dimana tiap daerah tidak dapat melakukan apa saja kecuali kewenangan yang diserahkan oleh pusat (Hendra, 1999).

Otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 lebih bernuansa desentralistik, yang mana daerah propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom dan sekaligus wilayah administrasi, yang melaksanakan kewenangan adalah pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubener (Bratakusumah, 2004: 2). Adapun pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat (Suparmoko, 2002: 18).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimaksud mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali wewenang dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan lainnya.

Di samping pelimpahan wewenang pembangunan daerah, Simanjutak (1999: 38) mengidentifikasi tiga unsur peraturan dalam otonomi daerah yaitu :

1. Adanya DPRD yang berwenang menentukan pelayanan jasa apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersangkutan dan pengeluaran yang diperlukan.
2. Adanya keleluasaan pemerintah daerah untuk menetapkan bentuk organisasi pemerintah yang diperlukan untuk merekrut sendiri pegawai sesuai kebutuhan daerahnya.

3. Adanya sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah tetapi bukan berarti daerah tidak memerlukan lagi subsidi dari pemerintah pusat.

Konsekuensi dari pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 adalah pemahaman tentang pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah dan kejelasan perimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena dengan pemahaman yang tepat dan benar maka upaya pemberian otonomi akan menjadi lebih efektif dan efisien. Sebaliknya bila pemahaman yang keliru maka pemberian otonomi akan menambah beban daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya dibiayai oleh APBN, tetapi juga berasal dari sumber-sumber pendapatan sendiri yang digali dari potensi daerah. Ini artinya pendapatan yang digali dalam APBN juga mendukung pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah. Selama ini, sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, baik propinsi, kabupaten dan kota berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), bagian daerah dari hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP), dana alokasi berupa sumbangan dan bantuan pembangunan pusat kepada daerah, pinjaman daerah, dan sisa lebih APBN tahun sebelumnya. Semua jenis penerimaan ini dimasukkan ke dalam APBD Propinsi, Kabupaten dan Kota (Saragih, 2003: 51).

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut yaitu (Mardiasmo, 2002: 59) :

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Jika dilihat dari tujuan otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata dan bertanggung jawab, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi lokal.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan yang menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Davey, 1998: 95). Di sisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiaya diri sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan

berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2004: 21-22).

Peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi. Jadi PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Biasanya penerimaan PAD untuk masing-masing daerah berbeda dengan yang lainnya, rendahnya PAD merupakan indikasi nyata di mana masih besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut disebabkan di samping rendahnya potensi PAD di daerah juga disebabkan kurang intensifnya pemungutan pajak dan retribusi di daerah (Ismail, 2001).

Kriteria yang biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumahtangganya sendiri adalah dengan peningkatan PAD berupa pajak dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat (Brata Kusumah, 2001: 264).

Sejak tahun 1984 berbagai UU tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi PAD (Siahaan, 2005: 1-2). Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu tolok ukur dalam

pelaksanaan otonomi, akan tetapi PAD tersebut masih relatif lebih rendah apabila dilihat dari proporsi PAD terhadap APBD maupun PDRB. Selain mengandalkan PAD dalam membiayai pengeluaran pembangunan daerah, Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah juga mengandalkan kepada sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Era otonomi daerah belum menunjukkan pemerintah daerah memiliki kemandirian dalam pembiayaan pembangunannya, dimana hal tersebut tampak dari masih tingginya proporsi nilai DAU dari APBN. Data tahun 2004-2008 memperlihatkan bahwa realisasi nilai DAU dalam APBN menunjukkan peningkatan, bahkan tahun 2005-2006 proporsi DAU dari APBN mengalami peningkatan sebesar 67,86%. Serta pada tahun 2007-2008 mengalami peningkatan sekitar 89,81%. Besarnya proporsi DAU dari APBN menunjukkan pemerintah daerah belum siap untuk membiayai pembangunannya secara mandiri. Proporsi nilai DAU dari APBN tahun 2004-2008 dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Nilai DAU dari APBN
Tahun 2004 – 2008

Tahun	Realisasi APBN (dalam Jutaan Rupiah)	Peningkatan/Penurunan Nilai DAU dari APBN Tahun Sebelumnya (%)
2004	82.100.000,00	-31,18
2005	86.800.000,00	5,72
2006	145.700.000,00	67,86
2007	164.800.000,00	13,11
2008	179.600.000,00	89,81

Sumber : Nota Keuangan dan APBN Tahun 2004-2008

Realisasi penerimaan pemerintah daerah juga dapat menjadi indikator kemandirian keuangan daerah di era otonomi. Data tahun 2007-2008 (Data BPS dalam angka 2008) di seluruh propinsi seluruh Indonesia dari 2007-2008 masih memperlihatkan besarnya bantuan/sumbangan dari pemerintah pusat di dalam struktur penerimaan pemerintah daerah propinsi di Indonesia masih dominan (40,25% -

48,63%). Secara khusus, realisasi penerimaan pemerintah daerah propinsi Jawa Tengah dari 2004 – 2008 sebagai berikut:

Tabel 1.2 menunjukkan rata-rata proporsi PAD dalam Total Pendapatan Daerah (TPD) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2004-2008 mengalami fluktuasi. Selama tahun 2004-2008, rata-rata proporsi PAD paling besar pada tahun 2005, yaitu 10,36%, dan nilai tersebut meningkat dari tahun 2004. Selanjutnya tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 7,09%, dan ditahun 2007 tidak mengalami perubahan yang berarti, karena nilainya adalah 7,56%. Pada tahun 2008 mengalami peningkatan dari tahun 2007, yaitu sebesar 8,57%. Rata-rata proporsi PAD dalam TPD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2004-2008 antara 7,09% - 10,36% dari TPD, dengan demikian proporsi PAD dalam TPD relatif masih kecil.

Tabel 1.2 juga menunjukkan rata-rata proporsi dana perimbangan dalam TPD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2004-2008 mengalami fluktuasi. Selama tahun 2004-2008, rata-rata proporsi dana perimbangan paling besar pada tahun 2008 sebesar 89,95% dan paling kecil pada tahun 2005 sebesar 81,38%. Tahun 2005, proporsi dana perimbangan mengalami penurunan dari tahun 2004, begitu pula pada tahun 2007 juga mengalami penurunan dari tahun 2006. Dana perimbangan pada tahun 2008 mengalami peningkatan yang besar dari tahun 2007, yaitu sebesar 89,95%. Rata-rata proporsi dana perimbangan dalam TPD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2004-2008 antara 81,38% - 89,95% dari TPD, dengan demikian proporsi dana perimbangan dalam TPD relatif masih besar.

Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak (sumber alam), DAU dan DAK. Kemandirian keuangan daerah salah satunya juga dapat dilihat dari besarnya nilai DAU. Proporsi nilai DAU dalam dana perimbangan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2004-2008 sebagai berikut:

Tabel 1.3 menunjukkan rata-rata proporsi DAU dalam dana perimbangan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2004-2008 mengalami fluktuasi. Selama tahun 2004-2008, rata-rata proporsi DAU paling besar terdapat pada tahun 2008 sebesar 7,55% dan paling kecil pada tahun 2007 sebesar 2,39%. Proporsi dana perimbangan pada tahun 2005 dan 2007 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2008 terjadi peningkatan nilai rata-rata proporsi DAU dalam dana perimbangan yang relatif besar dari tahun sebelumnya.

1.2 Perumusan Masalah

Otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, peran pemerintah dalam mengelola keuangan daerah sangat menentukan berhasil tidaknya dalam menciptakan kemandirian yang selalu diinginkan tersebut. Kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil dan diharapkan bahwa PAD harus dapat menjadi bagian terbesar dalam memobilisasikan dana penyelenggaraan pemerintah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan (Kaho, 1997: 61). Keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Pemerintah daerah, melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan diharapkan pemerintah pusat tidak terlalu aktif. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya

dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efisien dan efektif (Aslym, 1999: 1).

Pada kenyataannya permasalahan yang dihadapi daerah sekarang adalah kondisi ekonomi yang berbeda antar daerah. Daerah yang kurang potensi ekonominya akan menghadapi kesulitan untuk meningkatkan PAD. Perbedaan ini akhirnya menimbulkan harapan yang besar terhadap subsidi dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber pembiayaan di daerah.

Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan sumber pembiayaan yang sangat besar, terutama untuk investasi yang diharapkan berasal dari dana masyarakat. Dana investasi dari masyarakat masih sangat terbatas, sehingga untuk melaksanakan pembangunan diperlukan campur tangan pemerintah, terutama untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, kelistrikan, perhubungan dan lain-lain. Salah satu sumber dana pemerintah daerah yang terpenting dan potensial adalah PAD yang diharapkan terus meningkat.

PAD belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan daerah oleh karena, *pertama*, relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah apalagi dengan diterapkannya UU No. 28 tahun 2009, beberapa pajak atau retribusi yang ditetapkan untuk daerah memiliki basis pungutan yang relatif kecil. *Kedua*, peranannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah, karena sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari pusat. *Ketiga*, kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, akibatnya pungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. *Keempat*, kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah sehingga mengakibatkan penerimaan daerah mengalami kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah (Mahl, 2000: 58-59).

Kebijakan otonomi daerah ditetapkan dengan pemikiran hal tersebut mampu meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Namun dalam kenyataannya, realisasi proporsi PAD dalam TPD kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2004-2008 masih relatif kecil, yaitu memiliki nilai rata-rata 7,09%-10,36%. Realisasi TPD kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2004-2005 paling banyak diperoleh dari dana perimbangan, yaitu sebesar 81,38%-89,95%. Dalam dana perimbangan tersebut, komponen DAU mengalami fluktuasi dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan yang besar dibandingkan tahun 2007, yaitu sebesar 219,25%. Dengan demikian, kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah terdapat indikasi tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah.

Berdasarkan uraian yang ada di atas maka diperlukan adanya pembahasan mengenai perbandingan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. Apakah adanya otonomi daerah akan meningkatkan PAD dan memperkecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, khususnya kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah, mengingat PAD kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah masih belum optimal. Dengan demikian, rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh otonomi daerah terhadap penerimaan PAD kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh otonomi daerah terhadap kemampuan keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penerimaan PAD kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

2. Untuk menganalisis kemampuan keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan masukan mengenai bagaimana pengaruh kebijakan otonomi daerah terhadap penerimaan PAD dan kemampuan keuangan.
2. Bagi Peneliti Lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, hasil ini dapat memberikan inspirasi mengenai bagaimana pengaruh kebijakan otonomi daerah terhadap kemampuan dan penerimaan PAD.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep dan Sistem Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan dibidang lainnya yang akan ditetapkan dengan PP. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Brata Kusumah, 2001: 3).

Penyelenggaraan desentralisasi ini merupakan urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dengan daerah otonom, dengan bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* artinya urusan pemerintahan yang penangannya dalam bagian/bidang tertentu dapat dilaksanakan secara bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (UU Otonomi Daerah, 2004). Untuk mewujudkan pembangunan kewenangan yang *concurrent* secara proporsional antara pemerintah, daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota seperti yang tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka disusunlah kriteria yang meliputi:

1. Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintah dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

2. Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut.
3. Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.

Agar dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang menitik beratkan pada kabupaten/kota sesuai dengan tujuannya, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai prinsip sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan untuk propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada bagi wilayah administrasi.

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah cukup besar. Terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, akan tetapi masih tetap dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami oleh setiap aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah pusat sebagai perumus kebijaksanaan.

Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Syamsi (1986: 199) menegaskan beberapa ukuran sebagai berikut:

1. Kemampuan struktural organisasi

Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah dan ragam unit cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan aparatur pemerintah daerah

Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diinginkan.

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar memiliki kemauan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

4. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah daerah harus mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber dana antara lain berasal dari PAD atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat.

Keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonomi dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi (Kaho, 1998), yaitu:

1. Manusia

Manusia adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan, serta sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Kedua, keuangan yang merupakan bahasan pada lingkup penulisan ini sebagai faktor penting dalam melihat derajat kemandirian suatu daerah otonom untuk dapat mengukur, mengurus dan membiayai urusan rumah tangganya. Ketiga, peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar kegiatan pemerintah daerah. Keempat, untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik maka diperlukan organisasi dan pola manajemen yang baik.

Kaho (1998) menegaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah manusia sebagai pelaksana yang baik. Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

2. Keuangan

Kemampuan keuangan daerah yang dapat mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mamesah mengutip pendapat Manulang (1995: 23) yang menyebutkan bahwa dalam kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Semakin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut. Sebaliknya kalau kondisi keuangan negara buruk, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

3. Peralatan

Anggaran sebagai alat utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang dihadapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus tepat dalam bentuk dan susunannya. Anggaran berisi rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana, karena itu untuk menciptakan pemerintah daerah yang baik untuk melaksanakan otonomi daerah, maka mutlak diperlukan anggaran yang baik pula.

Faktor peralatan yang cukup dan memadai, yaitu setiap alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik akan mempengaruhi kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya, seperti alat-alat kantor, transportasi, alat komunikasi dan lain-lain. Namun demikian, peralatan yang memadai tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki daerah, serta kecakapan dari aparat yang menggunakannya.

4. Organisasi dan manajemen

Faktor organisasi dan manajemen baik yaitu organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang jelas berupa susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang, serta hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Mengenai arti penting dari manajemen terhadap penciptaan suatu pemerintahan yang baik, Mamesah (1995: 34) mengatakan bahwa baik atau tidaknya manajemen pemerintah daerah tergantung dari impinan daerah yang bersangkutan, khususnya tergantung kepada Kepala Daerah yang bertindak sebagai manajer daerah.

Keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah kinerja dan Pemerintah Daerah (Syaukani, 2005). Walaupun kinerja pemerintah daerah bukanlah faktor yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah namun perlu perhatian dan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, secara simultan juga harus dilakukan peningkatan faktor-faktor lainnya. Syaukani (2005) mengemukakan bahwa antara implementasi kebijakan otonomi daerah dan

kinerja pemerintah daerah dapat ditarik hubungan sebab akibat yang cukup signifikan. Antara kedua kondisi tersebut saling mempengaruhi, selain implementasi otonomi daerah dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya kinerja pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh implementasi kebijakan otonomi daerah.

Seiring dengan berkembangnya konsep tentang pembangunan, sisi pembiayaan tidaklah menjadi satu-satunya acuan kinerja pemerintahan suatu wilayah. Amrullah Harun dan Pan Budi (2006) menyatakan bahwa "Dalam paradigma pembangunan tradisional yang dikenal dengan '*The first fundamental theory of welfare economics*', menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai satu-satunya tujuan pembangunan dengan mengabaikan pertumbuhan sektor non ekonomi, dengan asumsi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut akan diikuti oleh laju pertumbuhan penduduk yang rendah, sehingga pada akhirnya manfaat pembangunan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan paradigma tersebut, kinerja suatu daerah hanya dinilai dari aspek makro secara ekonomi, yaitu dari (1) kemampuan daerah tersebut untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan daerah bruto (*Product Domestic Regional Brutto*) atau pertumbuhan ekonomi, (2) tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita riil (*income regional per capita*) yaitu PDRB per kapita yang telah dikurangi dengan faktor inflasi, dan (3) tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan sumberdaya, yang biasanya diindikasikan oleh pergeseran struktur produksi dan sektor pertanian ke sektor industri. Ketiga indikator makro ekonomi tersebut membawa implikasi penciptaan industrialisasi yang sering kali tidak memiliki backward dan forward linkage dengan sektor lain dan bahkan dengan mengorbankan sektor pertanian dan pedesaan sebagai sektor terbesar penyumbang PDRB dan tenaga kerja. Industrialisasi diyakini mampu membawa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja yang besar. Walau relatif berhasil

mencapai tujuan pertumbuhan, namun paradigma ini kemudian menimbulkan berbagai masalah serius dalam pembangunan seperti kemiskinan dan pengangguran yang meluas, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terabaikan maupun berbagai persoalan sosial lainnya”. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep pembangunan yang menekankan pentingnya pertumbuhan banyak dipersoalkan, karena disadari bahwa tolok ukur kinerja daerah yang murni bersifat ekonomi harus pula didukung oleh tolok ukur yang bersifat non ekonomi. Amrullah Harun dan Pan Budi (2006) selanjutnya menyatakan bahwa “Paradigma pembangunan daerah pun kemudian mulai bergeser ke arah pembangunan yang seimbang. Paradigma ini mengungkap kembali pentingnya *‘the second fundamental theory of welfare economics’* yaitu keseimbangan pembangunan ekonomi dan non ekonomi. Strategi pembangunan kini lebih memberikan penekanan utama kepada manusia sebagai subjek utama dalam pembangunan. Hal terpenting di sini adalah bagaimana memperluas pilihan-pilihan penduduk untuk hidup lebih panjang, lebih terdidik dan lebih mendapatkan akses terhadap sumberdaya untuk mempertahankan standar hidup yang layak. Dengan demikian, indikator pembangunan atau kinerja suatu daerah juga mengalami perubahan. Disamping pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kinerja daerah juga dinilai dan berbagai indikator kemajuan makro sosial”.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, kinerja daerah terukur melalui kemampuan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kaho (1997) menyatakan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah *self-supporting* dalam bidang keuangan. Hal ini berarti bahwa keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Pemerintah daerah diharapkan mampu menetapkan belanja daerah yang

wajar, efisien dan efektif (Aslym, 1999). PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung di luar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki, daerah diharap dapat meningkatkan PAD, sambil tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas. Kinerja PAD terukur melalui ukuran *Growth*, Elastisitas, dan *Share* (www.perpustakaan.bappenas.go.id). Kombinasi indeksasi dan ketiga ukuran tersebut merupakan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang sekaligus digunakan dalam menilai kinerja daerah dalam pengelolaan input. Selanjutnya Bappenas menyatakan bahwa *growth* merupakan angka pertumbuhan PAD tahun i dan tahun $i-1$. Elastisitas adalah rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan PDRB. Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau lastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Sedangkan *share* merupakan rasio PAD terhadap belanja daerah (belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik). Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan aparatur daerah dan kegiatan pelayanan publik. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah.

Halim (2004: 24), kinerja atau kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, dapat dilakukan dengan menganalisis:

1. Derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat. Semakin tinggi PAD, semakin kuat pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya). Semakin rendah PAD, semakin lemah pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandiriannya).

2. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Semakin elastis PAD suatu daerah, maka struktur PAD daerah tersebut semakin baik. Semakin inelastis PAD suatu daerah, maka struktur PAD daerah tersebut semakin buruk.
3. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil. Semakin tinggi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), semakin kuat pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya). Semakin rendah BHPBP, maka semakin lemah derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya).
4. Upaya fiskal adalah koefisien elastisitas PAD dengan PDRB. Semakin tinggi Sumbangan Daerah (SB) maka semakin lemah derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya). Semakin rendah SB maka semakin kuat derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandiriannya).
5. Kebutuhan fiskal standar adalah rata-rata kebutuhan fiskal standar suatu daerah. Semakin tinggi Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP), maka semakin besar pula kebutuhan fiskal (*fiscal need*). Semakin rendah IPPP, semakin sedikit pula kebutuhan fiskal.

Dalam penjelasan teknis aspek, fokus, dan indikator kinerja kunci yang digunakan untuk Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Otonomi Daerah (EKPOD) yang terdapat dalam PP No. 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa: “Tujuan akhir otonomi daerah ditunjukkan dengan parameter tinggi kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Dalam EKPOD, IPM ini digunakan untuk mengecek apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat

dipertanggungjawabkan”. Dengan demikian IPM idealnya menjadi salah satu indikator pengukuran kinerja daerah dilihat dari sisi *outcomes*.

2.1.2 Desentralisasi Daerah

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti, kekuasaan yang sebelumnya secara penuh berada di pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten / kota. Penyerahan kewenangan ini kemudian disertai penyerahan sumber-sumber pembiayaan (*money follows function*).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 khususnya mengenai desentralisasi daerah maka diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan daerah lebih dititikberatkan kepada kabupaten/kota, sedangkan propinsi adalah sebagai daerah otonom wilayah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur dan daerah propinsi.

Desentralisasi juga merupakan bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global. Ia adalah strategi untuk menjadi kompetitif. Demikian pula bagi sebuah negara, desentralisasi menjadikannya terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang terintegrasi dan menjadi sebuah makluk organik yang bergerak secara efisien dalam mengatasi tantangan global.

Dalam desentralisasi pemerintah daerah mempunyai keuntungan yaitu pertama, dengan desentralisasi maka hubungan kegiatan di suatu daerah akan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah yang bersangkutan. Kedua, dengan desentralisasi pembuatan keputusan dan kebijakan untuk daerah akan lebih efektif dan efisien.

Terdapat beberapa alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan yang terdesentralisasi (Simanjatak dikutip Amin Pujiati, 2006: 6) yaitu :

1. Representasi demokrasi, untuk memastikan hal seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara langsung pada keputusan yang akan mempengaruhi daerah atau wilayah.
2. Tidak dapat dipraktekannya pembuatan keputusan yang tersentralisasi adalah tidak realistis pada pemerintah yang sentralistik untuk membuat keputusan mengenai semua pelayanan rakyat seluruh negara, terutama pada negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia.
3. Pengetahuan lokal (*local knowledge*), mereka yang berada pada daerah lokal mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan lokal, prioritas, dan kondisi.
4. Mobilitas sumber daya, mobilitas pada bantuan dan sumber daya dapat difasilitasi dengan hubungan yang lebih erat di antara populasi dan pembuat kebijakan pada tingkat lokal.

Menurut Dilliger (dikutip Amin Pujiati, 2006: 6), pada dasarnya terdapat empat jenis desentralisasi yaitu :

1. Desentralisasi politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik.
2. Desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang guna mendistribusikan wewenang, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik, terutama yang menyangkut perencanaan, pendanaan dan manajemen fungsi-fungsi pemerintah

dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, badan otoritas tertentu atau perusahaan tertentu.

3. Desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan yang mencakup :
 - a. *Self-financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik terutama melalui retribusi daerah.
 - b. *Confinancing* atau *coproduction*, dimana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja.
 - c. Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari DAU, DAK, sumber darurat, serta pinjaman daerah (sumber daya alam).
4. Desentralisasi ekonomi (*economic decentralization*), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi.

Desentralisasi dan otonomi dalam praktiknya bersifat tumpang tindih. Meski demikian, keduanya memiliki makna yang berbeda. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berlebihan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi merupakan pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi merupakan pembagian dan pelimpahan. Rondinelli dan Chemma (dikutip Amin Pujiati, 2006: 5) mengemukakan bahwa desentralisasi adalah transfer dari kewenangan dalam hal perencanaan, membuat keputusan, atau administrasi dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, badan otoritas tertentu atau perusahaan tertentu.

2.1.3 Desentralisasi Fiskal

Menurut Prawirosetoto (dikutip Amin Pujiati, 2006: 5), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods / public service*). Dengan kata lain, desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan (Saragih, 2003).

Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang di dalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal harus didukung dengan dana perimbangan. Dengan kata lain dana perimbangan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dalam dana perimbangan terdapat tiga komponen penting yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam proses implementasi otonomi daerah yaitu dana bagi hasil yang berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagi hasilnya. Sedangkan fungsi dana alokasi umum (DAU)

sebagai pemerataan fiskal antar daerah di Indonesia. Fungsi dana alokasi khusus (DAK) adalah sebagai kebijakan yang bersifat darurat (Saragih, 2003: 90).

Esensi dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah dicapainya suatu keseimbangan (perimbangan) keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dalam pelaksanaan otonomi atau desentralisasi, pemerintah daerah tentu tidak dapat hanya bergantung kepada transfer dana dari pusat melalui dana perimbangan. Di era otonomi, daerah mempunyai kesempatan atau keleluasaan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah (Saragih, 2003: 132).

Dimensi ekonomi baku dari suatu kebijakan keuangan publik adalah stabilitas makro ekonomi, keadilan, dan efisiensi (Musgrave dan Musgrave dalam Keuangan Publik, BPPK, 2009: 244). Selanjutnya aspek efisiensi merupakan rasion d'etre untuk desentralisasi fiskal, karena preferensi setiap individu terhadap barang publik berbeda, maka dalam suatu sistem fiskal yang terdesentralisasi, setiap individu dapat memilih untuk tinggal di sebuah komunitas atau masyarakat yang sesuai dengan preferensi mereka dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan sosial.

Argumentasi ekonomi tentang efisiensi berasal dari fakta bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi berbagai kepentingan dan pendapat dari para penduduk dan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya secara lebih efisien dibandingkan pemerintah pusat. Namun demikian, aspek efisiensi tidaklah satu-satunya dimensi ekonomi untuk mengevaluasi desentralisasi fiskal. Desain desentralisasi fiskal antar pemerintah juga memiliki implikasi penting atas keadilan dan stabilitas makro ekonomi.

Teori desentralisasi didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah pusat hanya dapat menyediakan barang dan jasa secara lintas wilayah secara konsisten. Oleh

karenanya, sesuai dengan argumen ini, terdapat keuntungan efisiensi potensial dari desentralisasi fiskal yaitu (Keuangan Publik, BPPK, 2009: 364) :

1. Efisiensi alokasi sumber daya

Desentralisasi akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan penduduknya dibandingkan pemerintah pusat. Keputusan mengenai pengeluaran publik yang dibuat oleh pemerintah daerah akan lebih responsif terhadap keinginan konstituennya dibandingkan dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

2. Persaingan antar pemerintah daerah

Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Aspek keadilan dari sebuah kebijakan keuangan publik berkaitan dengan redistribusi pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. dalam definisi klasik redistribusi biasanya berupa suatu transfer dana kepada rumah tangga berpendapatan rendah untuk mencapai keseimbangan dalam distribusi pendapatan.

Dalam konteks desentralisasi, isu redistribusi memiliki dua dimensi yaitu keadilan horisontal dan keadilan lokal. Keadilan horisontal merujuk kepada tingkat kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan publik. Terdapat dua faktor utama yang memberikan kontribusi munculnya ketidakadilan horisontal yaitu (Keuangan Publik, BPPK, 2009: 366) :

1. Basis pajak sangat berbeda secara signifikan antar daerah satu dengan daerah lain.
2. Karakteristik regional yang mengakibatkan perbedaan biaya penyediaan pelayanan.

Untuk mengurangi ketidakadilan horisontal ini maka perlu dirancang kebijakan untuk memberikan sumber daya yang lebih besar kepada daerah yang lebih

miskin. Bantuan pemerataan adalah alat yang biasa digunakan untuk mengoreksi ketidakadilan horisontal tersebut.

Namun demikian, penyediaan sumber daya yang lebih banyak kepada daerah miskin hanyalah salah satu aspek dari problem keadilan. Kesuksesan dalam kebijakan redistribusi juga memerlukan perhatian khusus terhadap keadilan dalam wilayah lokal setempat. Dalam merancang kebijakan redistribusi, pemerintah daerah memerlukan dukungan dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah daerah tidak dapat mengambil kebijakan redistribusi secara efektif. Mobilitas rumah tangga adalah hambatan riil pemerintah daerah untuk menggunakan kebijakan redistribusi. Jika pemerintah daerah mengeluarkan program redistribusi pendapatan secara agresif, ia akan menciptakan suatu intensif yang kuat bagi penduduk berpendapatan rendah untuk datang dan akan mendorong penduduk berpenghasilan tinggi untuk pindah kemana saja. Hal tersebut dikarenakan, dengan program redistribusi pendapatan, berarti pajak bagi penduduk kaya dan subsidi bagi penduduk miskin.

Menurut Bird dan Vaillancourt (dalam Keuangan Publik, BPPK, 2009: 367), syarat-syarat keberhasilan desentralisasi fiskal adalah :

1. Proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus transparan dan pihak-pihak terkait harus memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut.
2. Biaya-biaya dari pengambilan keputusan tersebut sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat. Oleh karena itu, tidak perlu terjadi ekspor pajak dan tidak ada tambahan transfer dari level pemerintah yang lain.

Sementara itu, Sidik (dalam Keuangan Publik, BPPK, 2009: 367) menyebutkan bahwa keberhasilan pelaksanaan desentralisasi akan sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politik baik pada tingkat pengambilan

keputusan di masing-masing tingkat pemerintah, maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintah, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanan sektor publik.

Di samping itu, Sidik (dalam Keuangan Publik, BPPK, 2009: 367) juga berpendapat untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi maka pemerintah daerah harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari laba lokal, pinjaman, maupun transfer dari pemerintah pusat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat berjalan dengan baik dengan berpedoman terhadap :

1. Adanya pemerintah pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *enforcement*.
2. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

2.1.4 Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.

Mamesah (1995: 16) mengemukakan bahwa keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kekayaan daerah ini sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah daerah sebagai sebuah institusi publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanan. Tugas ini berkaitan erat dengan kebijakan anggaran pemerintah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran.

Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu, keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, di samping tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat.

Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah, yaitu (1) tanggung jawab, (2) memenuhi kewajiban keuangan, (3) kejujuran, (4) hasil guna, dan (5) pengendalian (Binder, 1984: 279). Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah saat ini, akan

perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2000: 3) :

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat (DPRD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta dari partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekda dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan.
5. keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas.
6. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah, dan PNS, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
7. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
8. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang-barang daerah yang lebih profesional.
9. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.

10. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
11. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan komitmen pemerintah daerah terhadap
12. penyebaran informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

Menurut Mangkoesoebroto (1999: 181), teori penerimaan dan pengeluaran pemerintah dijadikan dasar sebagai teori keuangan daerah. Teori tersebut menjelaskan bahwa penerimaan pemerintahan yang berasal dari berbagai sumber penerimaan, yaitu penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak dan penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintahan yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri, penerimaan dari badan usaha milik pemerintah (BUMN), penerimaan dari lelang, dsb. Selanjutnya keuangan daerah harus dilaksanakan secara sehat termasuk sistem administrasinya. Dengan demikian diharapkan daerah menyusun dan menetapkan APBDnya sendiri (Azhari, 1995: 39-40).

Kondisi keuangan suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Keuangan daerah mempunyai arti yang penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah kemasyarakatan di daerah. Oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk mengelola, mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan dengan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBN. Masalah dasar keuangan daerah terkait erat dengan

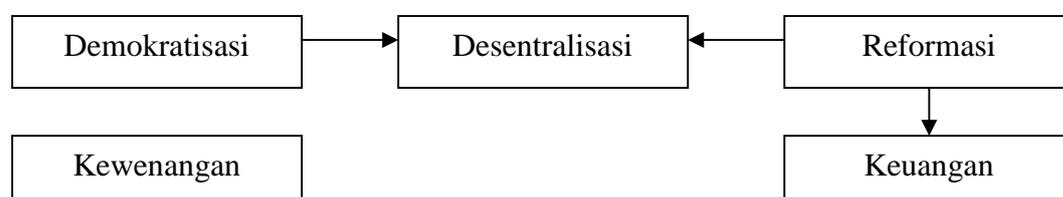
ekonomi daerah, terutama menyangkut tentang pengelolaan keuangan suatu daerah, tentang bagaimana sumber penerimaan digali dan didistribusikan oleh pemerintah daerah (Devas, 1995: 179).

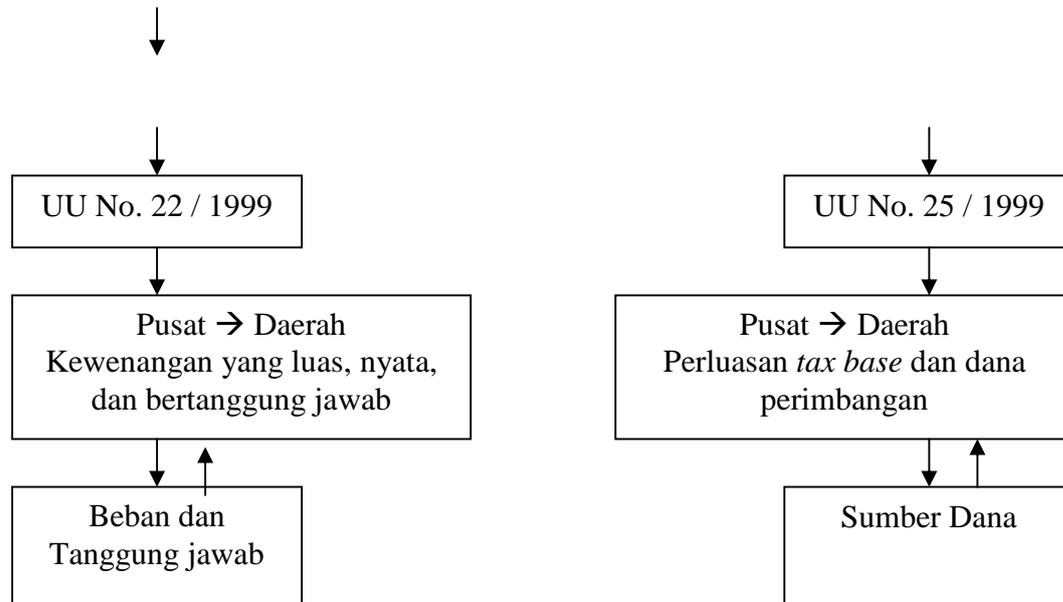
Parameter keberhasilan perkembangan daerah direfleksikan oleh besar kecilnya PAD dalam membiayai pembangunan daerah. Potensi dana pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah (Basri, 2003: 94).

Diharapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat dan investor merupakan salah satu indikasi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif (Saragih, 2003: 133).

Pola kewenangan dan hubungan keuangan pusat dan daerah di era otonomi daerah dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1
Pola Kewenangan dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
di Era Otonomi Daerah





(Sumber : Joko Tri Haryanto, 2007: 2)

2.1.5 Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan peasyarat sistem pemerintah daerah.

PAD merupakan suatu pendapatan yang digali murni dari masing-masing daerah, sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah yang tercermin dalam anggaran pembangunan.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 5 penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari atas pendapatan daerah dan pembiayaan, dimana sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Sedangkan sumber pembiayaan daerah

terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.5.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus di pacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pengertian PAD menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

1. Pajak daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah. Para ahli perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama. Beberapa definisi mengenai pajak sebagai berikut (Munawir, 1990: 2) :

- a. Menurut Soemitro, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dengan kata lain, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

surplusnya digunakan untuk *publik saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

- b. Menurut Soemaamidjaja, pajak ialah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- c. Menurut Djajadiningrat, pajak ialah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Didalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (6) adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (10) adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu kelemahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan PAD adalah kelemahan dalam hal pengukuran penilaian atas pungutan daerah. Oleh karena itu, untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu diadakan pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat di pungut secara berkesinambungan. Beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai pajak (Devas, 1989) adalah :

a. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dsb, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

b. Keadilan (*Equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak harus adil secara horisontal, yang berarti beban pajak haruslah sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Pajak harus adil secara vertikal, yang berarti beban pajak harus lebih banyak di tanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar, dan pajak haruslah adil dari suatu daerah ke daerah lain kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.

c. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*)

Pajak hendaklah mendorong atau setidaknya tidaknya menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah

jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.

d. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan administratif.

e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*)

Ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir objek pajak. Pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya tidak mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis-jenis pajak adalah :

a. Pajak propinsi terdiri dari:

- 1) Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan.
- 2) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk

kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan kendaraan di air.

- 4) Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 5) Pajak rokok adalah pajak atas cukai yang diterapkan oleh pemerintahan terhadap rokok.

b. Pajak kabupaten/kota terdiri dari :

- 1) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya diberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- 2) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
- 3) Pajak hiburan adalah pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan.
- 4) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 5) Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- 8) Pajak parkir adalah pajak atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

- 9) Pajak air tanah adalah pajak atas nilai perolehan air tanah.
- 10) Pajak sarang burung walet adalah pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 11) Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 12) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Relatif rendahnya kemampuan daerah dalam menggali kapasitas pajak daerah disebabkan karena rendahnya pendapatan perkapita, rendahnya distribusi pendapatan, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan relatif lemahnya kebijakan perpajakan daerah.

2. Retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah/pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Thee Kian Wie, 1981: 190). Menurut Suparmoko (2002: 85), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah:

- a. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta

dapat dinikmati oleh barang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
 - 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - 3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil
 - 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - 6) Retribusi pelayanan pasar
 - 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - 9) Retribusi biaya cetak peta
 - 10) Retribusi pengujian kapal perikanan
 - 11) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
 - 12) Restribusi limbah cair
 - 13) Restribusi pelayanan tera atau tera ulang
 - 14) Restribusi pelayanan pendidikan
 - 15) Restribusi pengendalian menara telekomunikasi
- b. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah :
- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan

- 3) Retribusi tempat pelanggan
 - 4) Retribusi terminal
 - 5) Retribusi tempat parkir khusus
 - 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - 7) Retribusi penyedotan kakus
 - 8) Retribusi rumah potong hewan
 - 9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - 10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - 11) Retribusi pengolahan limbah cair
 - 12) Retribusi penyeberangan di air
 - 13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- c. Retribusi perijinan tertentu adalah pelayanan perijinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perijinan tertentu adalah :
- 1) Retribusi ijin mendirikan bangunan
 - 2) Retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol
 - 3) Retribusi ijin gangguan
 - 4) Retribusi ijin trayek
 - 5) Restribusi ijin usaha perikanan

3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian laba BUMD adalah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan BUMD. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan selain yang disebutkan di atas tetap sah. Penerimaan ini mencakup penerimaan sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan lain-lain yang sah menurut UU.

2.1.5.2 Dana Perimbangan

Menurut Musgrave dan Musgrave (dalam Halim, 2004: 191-192) ada tiga fungsi utama pemerintah dalam pembangunan yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dengan lahirnya UU Otonomi Daerah merupakan perwujudan dari peranan pemerintah dalam hal fungsi distribusi yang diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, yang diberikan kepada daerah, dengan maksud untuk memenuhi keterbatasan keuangan daerah dalam menjalankan administrasi pemerintah dan pembangunan (Halim, 2004: 191-192).

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan daerah secara adil dan proporsional, demokratis, dan transparan, dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (19), (20), (21), dan (23), dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

1. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil pajak yang meliputi hasil PBB, BPHTB, PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
2. Bagi hasil sumber daya alam, yang meliputi sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan panas bumi.
3. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (Penjelasan UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah: 324). DAU untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU. DAU bagi masing-masing propinsi dan kabupaten dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah DAU bagi seluruh daerah, dengan bobot daerah yang bersangkutan dibagi

dengan jumlah masing-masing bobot seluruh daerah di seluruh Indonesia (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 183)

4. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Penjelasan UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah: 324). Sektor atau kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK adalah dana administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah dan lain-lain biaya umum sejenis (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 188). Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah).

2.1.5.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 164 ayat (1), lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Sementara itu, pendapatan dana darurat merupakan bantuan pemerintah pusat

melalui APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu, seperti bencana alam yang tidak dapat ditanggulangi oleh APBD. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu ditetapkan dengan peraturan presiden. Sementara itu, besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh menteri keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri dalam negeri dan menteri teknis terkait. Tata cara pengelolaan dan pertanggung jawab penggunaan dana darurat diatur dalam peraturan pemerintah.

2.1.6 Pajak dan Retribusi Daerah

2.1.6.1 Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (10) adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu ada beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak, yaitu :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten / kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten / kota yang bersangkutan
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan atau objek pajak pusat
5. Potensinya memadai serta tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif

6. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan

Berdasarkan ketentuan yang ada penetapan tarif pajak daerah harus diusulkan dan ditetapkan melalui perda kemudian tarif pajak yang ditetapkan oleh perda haruslah disetujui oleh pemerintah pusat dan disetujui oleh gubernur. Tarif pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu :

1. Tarif PKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 5%.
2. Tarif BBNKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 10%.
3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 20%.
4. Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%.
5. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%.
6. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%.
7. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%.
8. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%.
9. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%.
10. Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C ditetapkan paling tinggi 20%.
11. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi 20%.

Penetapan tarif pajak kabupaten/kota diatur dalam PP No. 65 mengenai Peraturan Daerah yaitu tarif pajak paling tinggi. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 mengenai tarif pajak yang paling tinggi yang dapat dipungut oleh daerah untuk setiap jenis pajak, dimana penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani. Sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada

pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat didaerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu (Siahaan, 2005: 62-63).

2.1.6.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, jenis retribusi dapat dibedakan menjadi :

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh barang pribadi atau badan, misalnya retribusi pelayanan kesehatan, persampahan, akta catatan sipil, dan KTP.

Kriteria jasa umum adalah :

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang harus membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya

2. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, misalnya retribusi pasar grosir, terminal, dan rumah potong.

Kriteria retribusi jasa usaha adalah :

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah

3. Retribusi perijinan tertentu

Retribusi perijinan tertentu merupakan pelayanan perijinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, misalnya IMB dan Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

Kriteria retribusi perijinan tertentu adalah :

- a. Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
- b. Perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum

- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk mengevaluasi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan

Berdasarkan ketentuan yang ada penetapan tarif retribusi daerah harus diusulkan dan ditetapkan melalui perda kemudian tarif retribusi yang ditetapkan oleh perda haruslah disetujui oleh pemerintah pusat dan disetujui oleh gubernur. Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penetapan tarif tersebut, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam PP No. 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi kembali paling lama lima tahun sekali (Siahaan, 2005: 449).

2.1.7 Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Halim (dikutip Erlangga, 2005: 7), ciri utama status daerah yang mampu melaksanakan otonomi adalah:

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri di atas akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Menurut Musgrave dan Musgrave (dikutip Erlangga, 2005: 7) dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat (Halim, 2004: 27).

Tingkat derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan derajat fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

Secara umum, semakin tinggi kontribusi PAD dan semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

2.1.8 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, propinsi maupun kabupaten / kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dijelaskan

bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya.

PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besarnya PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing propinsi sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besarnya PDRB bervariasi antar daerah.

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah, maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Untuk menghasilkan suatu barang atau jasa diperlukan barang lain yang disebut faktor produksi. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai PDRB.

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Penjelasan dari ketiga hal tersebut adalah :

1. Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi sembilan sektor atau lapangan usaha yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa-jasa.

2. Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu :
 - a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung
 - b. Konsumsi pemerintah
 - c. Pembentukan modal tetap domestik bruto
 - d. Perubahan stok
 - e. Ekspor netto

3. Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Jika dibagi dengan jumlah penduduk di suatu daerah pada suatu waktu tertentu akan diperoleh PDRB per kapita.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerimaan daerah, antara lain :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

Judul dan Peneliti	Analisis Data	Hasil
Implikasi APBN dan APBD Dalam Konteks Otonomi Daerah Mardiasmo (2000)	Metode penelitian: studi kasus Variabel penelitian: APBN, APBD, PAD Metode analisis data: Statistik deskriptif dan kualitatif	1. Penyelenggaraan otonomi daerah akan mengakibatkan perubahan-perubahan mendasar berupa reformasi kelembagaan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Perubahan pada mekanisme pengelolaan

<p>Kemampuan Daerah Tingkat II menghadapi UU Nomor 25 Tahun 1999</p>	<p>Metode penelitian: studi kasus</p> <p>Variabel penelitian: indeks pertumbuhan, indeks elastisitas, indeks <i>share</i></p> <p>Sumber data: PAD, belanja modal, APBD di kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah</p>	<p>keuangan daerah terletak pada perubahan porsi dan struktur, baik pada APBN maupun APBD yang disebabkan oleh dana perimbangan untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi.</p> <p>2. Upaya pencapaian keberhasilan otonomi daerah adalah bukan semata-mata pada usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi lebih pada bagaimana pemerintah daerah dapat memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk menggunakan dana yang ada di pemerintah daerah, baik yang berasal dari dalam (Pendapatan Asli Daerah) maupun yang berasal dari luar (misalnya dana perimbangan) Jawa Tengah sangat mengandalkan dari adanya Dana alokasi Umum. Sementara Kabupaten Banyumas menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerimaan daerah walau selisihnya tidak terlalu besar</p>
<p>Makhfatih (2000)</p> <p>Kemampuan dan Kesiapan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata dan Bertanggungjawab</p> <p>Arifin (2000)</p>	<p>Metode analisis data: statistik deskriptif</p> <p>Metode penelitian: studi kasus</p> <p>Variabel penelitian: kemampuan daerah</p> <p>Sumber data: PAD, belanja modal, APBD, dan kendala tentang penerimaan PAD</p> <p>Metode analisis data: statistik deskriptif dan kualitatif</p>	<p>a. Kemampuan daerah dipergunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan besarnya wewenang yang akan diserahkan kepada kabupaten/kota dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri.</p> <p>b. Kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masih banyak menghadapi kendala, antara lain : jenis-jenis pajak dan retribusi daerah sudah ditetapkan secara limitatif, sehingga menyulitkan daerah untuk berkreasi dalam menggali sumber keuangan sendiri.</p> <p>c. Pengembangan BUMD berhadapan dengan keterbatasan modal, campur tangan birokrat yang berlebihan, status badan hukum yang tidak jelas dan minimnya sumber daya manusia yang profesional.</p> <p>d. Untuk pendapatan lain-lain, masih belum adanya mekanisme dan prosedur baku dalam penyalurannya, sehingga sering terjadi kelambatan yang mengakibatkan terganggunya likuiditas keuangan daerah.</p>
<p>Analisis Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 1999-2003 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah)</p> <p>Marina Irayani (2006)</p>	<p>Metode penelitian: deskriptif kuantitatif</p> <p>Variabel penelitian: PAD</p> <p>Sumber data: PAD tahun 1999-2003</p> <p>Metode analisis data: statistik deskriptif</p>	<p>Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar bagi pemerintahan kota Pekanbaru apabila dibandingkan dengan retribusi dan sumber-sumber PAD lainnya. Rasio yang paling tinggi adalah rasio pajak apabila dibandingkan dengan rasio retribusi daerah dan ini juga berdampak pada peningkatan rasio PAD terhadap PDRB. Elastisitas diantara dua sumber PAD tersebut yang paling elastis secara rata-rata adalah retribusi</p>

<p>Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah</p> <p>deddyk@bappenas.go.id</p>	<p>Metode penelitian: deskripsi kuantitatif</p> <p>Variabel penelitian : Kinerja PAD (ukuran elastisitas, share, dan growth) Kemampuan keuangan daerah Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah</p> <p>Metode analisis data : statistik deskriptif</p>	<p>daerah. Sedangkan tingkat desentralisasi fiskal Kota Pekanbaru adalah masih besarnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, apabila ditinjau dari pendanaan yang bersumber dari PAD maka Kota Pekanbaru masih belum mampu membiayai seluruh belanja daerah dari PAD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilihat dari indikator kinerja PAD, secara umum propinsi-propinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) memiliki kemampuan keuangan daerah yang lebih baik dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2. Propinsi yang memiliki SDA melimpah belum tentu memiliki kinerja PAD yang baik
--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat (Suparmoko, 2002: 18). Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimaksud mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali wewenang dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan lainnya.

Otonomi daerah memungkinkan terjadinya (1) DPRD memiliki wewenang untuk menentukan pelayanan jasa apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersangkutan dan pengeluaran yang diperlukan, (2) Pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menetapkan bentuk organisasi pemerintah yang diperlukan untuk merekrut sendiri pegawai sesuai kebutuhan daerahnya, (3) Adanya sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya dibiayai oleh APBN, tetapi juga berasal dari sumber-sumber pendapatan sendiri yang digali dari potensi daerah. Ini artinya pendapatan yang digali dalam APBN juga mendukung pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah. Selama ini, sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, baik propinsi, kabupaten dan kota berasal dari PAD, BHPBP, dana alokasi berupa sumbangan dan bantuan pembangunan pusat kepada daerah, pinjaman daerah, dan sisa lebih APBN tahun sebelumnya. Semua jenis penerimaan ini dimasukkan ke dalam APBD Propinsi, Kabupaten dan Kota (Saragih, 2003: 51).

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut yaitu (Mardiasmo, 2002: 59): (1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas maka otonomi daerah memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata dan bertanggung jawab, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi lokal. Dengan kata lain, otonomi daerah mampu meningkatkan penerimaan PAD dan kemampuan keuangan daerah.

Era otonomi daerah akan memicu peningkatan penerimaan PAD karena hal tersebut memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mendesain kebijakan yang dapat memberikan stimulus ekonomi. Penerimaan PAD merupakan sumber penerimaan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut.

Kategori pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah (*local tax, sub national tax*), retribusi daerah (*local retribution, fees, local licence*) dan hasil-hasil badan usaha (*local owned enterprises*) yang dimiliki oleh daerah. Ketiga jenis pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya.

Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari *World Bank* berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan

yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut. Baik pajak daerah maupun retribusi daerah, keduanya diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan.

Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini merupakan kondisi yang perlu diciptakan dan menjadi suatu pandangan umum yang dikemukakan serta diterima oleh para ahli yang menekuni kajian pemerintahan daerah, khususnya keuangan daerah, seperti Nick Devas, Richard M. Bird, dan B.C. Smith (dalam *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*, UI Press, 1995: 8). Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah. Hal yang paling menjanjikan dan merupakan jalur yang banyak ditempuh oleh para pemerintah daerah untuk mendapatkan struktur pendapatan daerah adalah memberlakukan retribusi pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Hal ini sangat dimungkinkan, sebab jika pemerintah daerah ditinjau dari sudut pandang

ekonomi, maka pemerintah daerah dapat dianalogikan sebagai suatu perusahaan milik yang memberikan beragam jenis layanan layanan atau bahkan termasuk menyediakan sejumlah barang yang dapat dikonsumsi oleh penduduk setempat.

Jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangat beragam. Pemungutan pajak daerah ini harus mengindahkan ketentuan bahwa lapangan pajak yang akan dipungut belum diusahakan oleh tingkatan pemerintahan yang ada di atasnya. Ada perbedaan lapangan pajak antara daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. Daerah propinsi memiliki empat jenis pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Untuk Daerah kabupaten/kota, pajak daerah yang dipungut berjumlah tujuh buah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Masing-masing tingkatan daerah memiliki lapangan retribusi daerah yang berbeda-beda. Otonomi daerah juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan dalam otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Menurut Musgrave dan Musgrave (1991) dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu dapat mengetahui

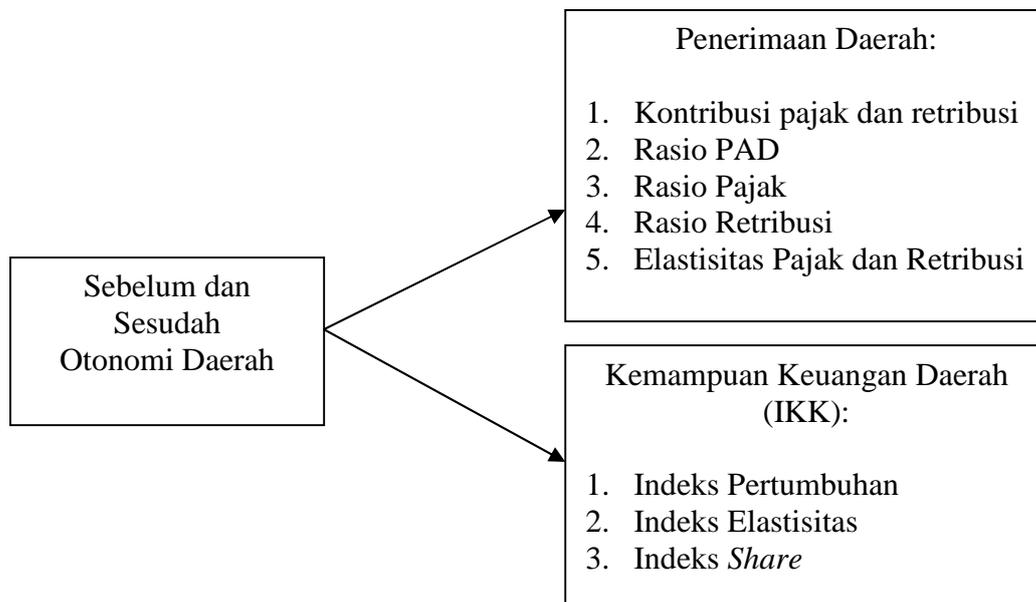
besarnya penerimaan PAD. Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

Kaho (1997) menyatakan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah pemerintah daerah diharapkan mampu menetapkan belanja daerah yang wajar, efisien dan efektif. PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung di luar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki, daerah diharap dapat meningkatkan PAD, sambil tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas. Kinerja PAD terukur melalui ukuran *Growth*, Elastisitas, dan *Share* (www.perpustakaan.bappenas.go.id). Kombinasi indeksasi dan ketiga ukuran tersebut merupakan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang sekaligus digunakan dalam menilai kinerja daerah dalam pengelolaan input. Selanjutnya Bappenas menyatakan bahwa *growth* merupakan angka pertumbuhan PAD tahun i dan tahun $i-1$. Elastisitas adalah rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan PDRB. Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau lastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Sedangkan *share* merupakan rasio PAD terhadap belanja daerah (belanja

aparatur daerah dan belanja pelayanan publik). Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan aparatur daerah dan kegiatan pelayanan publik. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disusun gambar sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis

Hipotesis menurut Azwar (1998: 49) adalah jawaban sementara terhadap penelitian. Pada penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah :

1. Diduga ada perbedaan penerimaan PAD kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.
 - a. Diduga ada perbedaan kontribusi pajak dan retribusi kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.
 - b. Diduga ada perbedaan rasio PAD kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

- c. Diduga ada perbedaan rasio pajak kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.
 - d. Diduga ada perbedaan rasio retribusi kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.
 - e. Diduga ada perbedaan elastisitas pajak dan retribusi kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.
2. Diduga ada perbedaan kemampuan keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.
 - a. Diduga ada perbedaan indeks pertumbuhan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.
 - b. Diduga ada perbedaan indeks elastisitas kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.
 - c. Diduga ada perbedaan indeks *share* kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.
 - d. Diduga ada perbedaan IKK kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan kuantitatif adalah suatu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data angka yang diolah dengan metode statistika tertentu (Azwar, 1998: 5). Dengan kata lain, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif jika data yang digunakan bersifat angka

Selanjutnya, Menurut Azwar (1998: 7) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi atau pun mencari implikasi.

Sekaran (2000: 34) menyatakan bahwa penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik kelompok dalam situasi tertentu, berpikir sistematis tentang

aspek-aspek dalam situasi tertentu, memberikan ide untuk penelitian lebih lanjut, dan untuk mengambil keputusan sederhana. Dengan kata lain, penelitian deskriptif menekankan pada penyajian data secara sistematis dan akurat sehingga dapat memberikan gambaran dengan jelas.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Hal ini disebabkan penelitian ini ingin memberikan gambaran suatu data yang dianalisis secara statistik secara sistematis, akurat dan jelas.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.2.1 Penerimaan Daerah

1. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah

Kontribusi pajak dan retribusi daerah adalah besarnya kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak dan retribusi terhadap penerimaan PAD.

2. Rasio PAD

Rasio PAD adalah perbandingan antara penerimaan PAD dengan PDRB dikalikan 100%, dimana rasio tersebut salah satu indikator dari ada atau tidaknya sistem perencanaan penerimaan PAD.

3. Rasio Pajak

Rasio pajak adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDRB dikalikan 100%, dimana rasio tersebut salah satu indikator dari ada atau tidaknya sistem perencanaan penerimaan PAD.

4. Rasio Retribusi

Rasio retribusi adalah perbandingan antara penerimaan retribusi dengan PDRB dikalikan 100%, dimana rasio tersebut salah satu indikator dari ada atau tidaknya sistem perencanaan penerimaan PAD.

5. Elastisitas Pajak dan Retribusi

Elastisitas pajak dan retribusi adalah tingkat responsif pajak dan retribusi terhadap PDRB.

3.2.2 Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah adalah seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah ditampilkan dengan menggunakan peta kemampuan daerah. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besarnya nilai *growth* dan *share*. Dengan nilai tersebut maka masing-masing kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah dapat diketahui posisinya.

Kemampuan keuangan daerah terdiri dari indikator:

1. Indeks Pertumbuhan

Indeks pertumbuhan adalah perbandingan PAD antara tahun i dengan PAD tahun $i-1$.

2. Indeks Elastisitas

Indeks elastisitas adalah proporsi dari belanja modal terhadap PAD.

3. Indeks *Share*

Indeks *share* adalah proporsi dari PAD terhadap APBD.

3.3 Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang sama dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Umar, 2003: 98). Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah periode pengamatan 1994 - 2008 sejumlah

525 data. Dijelaskan bahwa kelengkapan data dalam penelitian ini adalah meliputi PAD, belanja modal, APBD, pajak, retribusi, PDRB, BHPBP, DAK, DAU, TPD.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini termasuk data sekunder dalam bentuk panel Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah maupun Propinsi Jawa Tengah dari tahun 1994-2008, yang diperoleh dari BPS dalam Angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. PAD kabupaten/kota propinsi Jawa Tengah tahun 1994-2008.
2. Pajak daerah kabupaten/kota propinsi Jawa Tengah tahun 1994-2008.
3. Retribusi daerah kabupaten/kota propinsi Jawa Tengah tahun 1994-2008.
4. PDRB kabupaten/kota propinsi Jawa Tengah tahun 1994-2008.
5. APBD kabupaten/kota propinsi Jawa Tengah tahun 1994-2008.
6. BHPBP kabupaten/kota propinsi Jawa Tengah tahun 1994-2008.
7. DAU kabupaten/kota propinsi Jawa Tengah tahun 1994-2008.
8. DAK kabupaten/kota propinsi Jawa Tengah tahun 1994-2008.
9. Belanja Modal kabupaten/kota propinsi Jawa Tengah tahun 1994-2008.
10. TPD kabupaten/kota propinsi Jawa Tengah tahun 1994-2008.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh sehingga dihasilkan suatu hasil analisis (Suryabrata, 2000: 54). Hal ini disebabkan data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung tetapi perlu diolah agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami, jelas, dan teliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai masing-masing variabel penelitian. Informasi tersebut diperoleh nilai rata-rata, SD, nilai minimum, dan nilai maksimum.

Rumus dari masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

3.5.1.1 Penerimaan Daerah

1. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah

Rumus kontribusi pajak dan retribusi (Halim, 2004: 163) :

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n : kontribusi penerimaan pajak dan retribusi terhadap PAD

QX : jumlah penerimaan pajak dan retribusi

QY : jumlah penerimaan PAD

n : tahun periode tertentu

2. Rasio PAD

Rumus rasio PAD (Halim, 2004: 337) :

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{penerimaan PAD}}{PDRB} \times 100\%$$

3. Rasio Pajak

Rumus rasio pajak (Halim, 2004: 337) :

$$\text{Rasio pajak} = \frac{\text{penerimaan Pajak}}{PDRB} \times 100\%$$

4. Rasio Retribusi

Rumus rasio retribusi (Halim, 2004: 337) :

$$\text{Rasio retribusi} = \frac{\text{penerimaan Retribusi}}{PDRB} \times 100\%$$

5. Elastisitas Pajak dan Retribusi

Rumus elastisitas pajak dan retribusi(Elfida, 2005) :

$$e = \frac{\Delta TR}{\Delta Y} \cdot \frac{Y}{TR}$$

Keterangan :

- e : elastisitas
 Y : PDRB
 TR : penerimaan pajak dan retribusi
 Δ : perubahan

Kriteria pengujian hasil :

- Nilai elastisitas > 1 adalah pajak dan retribusi elastis, yang berarti setiap ada perubahan dalam PDRB sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan dalam pajak dan retribusi lebih besar dari 1%.
- Nilai elastisitas < 1 adalah pajak dan retribusi inelastis, yang berarti setiap ada perubahan dalam PDRB sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan dalam pajak dan retribusi lebih kecil dari 1%.
- Nilai elastisitas = 1 adalah pajak dan retribusi unitar elastis, yang berarti nilai pajak dan retribusi konstan meskipun ada perubahan dalam PDRB sebesar 1%.

3.5.1.2 Kemampuan Keuangan Daerah

1. Derajat Desentralisasi Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Rumus derajat desentralisasi fiskal (Halim, 2004: 24) :

$$\text{Proporsi PAD} = \frac{PAD}{TPD}$$

$$\text{Proporsi BHPBP} = \frac{BHPBP}{TPD}$$

$$\text{Proporsi sumbangan daerah} = \frac{DAK + DAU}{TPD}$$

2. Indeks Kemampuan Keuangan

Rumus IKK (Halim, 2004: 24):

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3}$$

Keterangan :

X_G = Indeks Pertumbuhan (PAD)

X_E = Indeks Elastisitas (Belanja Modal terhadap PAD)

X_S = Indeks *Share* (PAD terhadap APBD)

Rumus Indeks Pertumbuhan (Halim, 2004: 24):

$$G = \frac{(PAD_i - PAD_{i-1})}{PAD_{i-1}}$$

$$X_G = \frac{G_t - G_{\min imum}}{G_{maksimum} - G_{\min imum}}$$

Keterangan:

G = Pertumbuhan

Rumus Indeks Elastisitas (Halim, 2004: 24):

$$E = \frac{BelanjaModal}{PAD}$$

$$X_E = \frac{E_t - E_{\min imum}}{E_{maksimum} - E_{\min imum}}$$

Keterangan:

E = Elastisitas

Rumus Indeks *Share* (Halim, 2004: 24):

$$S = \frac{PAD}{APBD}$$

$$X_s = \frac{S_t - S_{\min imum}}{S_{maksimum} - S_{\min imum}}$$

Keterangan:

G = *Share*

3.5.2 Analisis Statistik

Analisis statistik yang digunakan untuk uji hipotesis adalah *Mann-Whitney U*, yang didasarkan oleh alasan: (1) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada/tidaknya perbedaan penerimaan daerah dan kemampuan keuangan daeran antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah, (2) data penelitian tidak memenuhi syarat asumsi normalitas dan homogenitas. Untuk menghitung nilai statistik dengan menggunakan *Mann-Whitney U*, maka rumus yang digunakan adalah:

$$U = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2 + 1)}{2} - \sum_{i=n_1+1}^{n_2} R_i$$

Keterangan:

U = Nilai uji *Mann-Whitney*

n_1 = Sampel 1 (Sebelum Otonomi Daerah)

n_2 = Sampel 2 (Sesudah Otonomi Daerah)

R_i = Ranking ukuran sampel

Kriteria dari penerimaan hipotesis sebagai berikut:

1. Cara pertama, membandingkan antara U hitung dengan U tabel
 - a. Apabila U hitung < U tabel, maka H_a ditolak atau H_o diterima.
 - a. Hipotesis pertama

Tidak ada perbedaan kemampuan keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.
 - b. Hipotesis kedua

Tidak ada perbedaan penerimaan PAD kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

b. Apabila $U_{hitung} > U_{tabel}$, maka H_a diterima atau H_o ditolak.

1) Hipotesis pertama

Ada perbedaan kemampuan keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

2) Hipotesis kedua

Ada perbedaan penerimaan PAD kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

2. Cara kedua, melihat *probabilities value* (nilai p)

a. Apabila nilai $p < 0,05$, maka H_a diterima atau H_o ditolak.

1) Hipotesis pertama

Ada perbedaan kemampuan keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

2) Hipotesis kedua

Ada perbedaan penerimaan PAD kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

b. Apabila nilai $p > 0,05$, maka H_a ditolak atau H_o diterima.

1) Hipotesis pertama

Tidak ada perbedaan kemampuan keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

2) Hipotesis kedua

Tidak ada perbedaan penerimaan PAD kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

3.5.3 Metode Kuadran

Metode Kuadran bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah dengan melihat posisi kabupaten/kota di kuadran. Metode kuadran merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik (\bar{X}, \bar{Y}) , dimana \bar{X} merupakan rata-rata dari skor rata-rata indeks *growth* dan \bar{Y} adalah rata-rata dari rata-rata skor indeks *share*. Selanjutnya kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah ditempatkan di kuadran sesuai skor yang dimilikinya:

$$\bar{Y}$$

Interpretasi dari masing-masing Kuadran sebagai berikut:

KUADRAN I : Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai *share* disertai nilai *growth* yang tinggi.

KUADRAN II : Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi.

KUADRAN III : Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Di

sini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.

KUADRAN IV : Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Propinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu Propinsi di Jawa, terletak diantara dua Propinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya antara $5^{\circ}40'$ dan $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}30'$ dan $111^{\circ}30'$ Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Secara rinci, batas-batas wilayah administrasi Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut (Propinsi Jawa Tengah Dalam Angka, BPS, 2010):

Sebelah Barat : Propinsi Jawa Barat ; bermula dari laut Jawa menyusuri sungai Cilosari sampai Cileduk, terus ke selatan sampai gunung Kumbang membelok ke arah Tenggara sampai gunung Pojoktiga, kemudian sampai Citandui sampai teluk Menanjung di pantai selatan pulau Jawa.

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur; bermula dari laut Jawa di Kecamatan Sarang ke Selatan sampai di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang terus ke selatan sampai kota Cepu kemudian menyusuri alur sungai Bengawan Solo di celah-celah pegunungan Kendeng, sampai Gunung Lawu, terus ke pegunungan Sewu dan berakhir di Samudera Indonesia.

Sebelah Selatan : Sebagian berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian lainnya adalah Samudera Indonesia.

Propinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 [kabupaten](#) dan 6 [kota](#). Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 568 [kecamatan](#) dan 8.573 [desa/kelurahan](#). Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang [Pemerintahan Daerah](#), Jawa Tengah juga terdiri atas 4 kota administratif, yaitu

[Purwokerto](#), [Purbalingga](#), [Cilacap](#), dan [Klaten](#). Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun [2001](#) kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten. Menyusul otonomi daerah, 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu [Kabupaten Magelang](#) (dari Kota Magelang ke [Mungkid](#)), [Kabupaten Tegal](#) (dari Kota Tegal ke [Slawi](#)), serta [Kabupaten Pekalongan](#) (dari Kota Pekalongan ke [Kajen](#)).

Setelah otonomi daerah, Propinsi Jawa Tengah memiliki 568 kecamatan, 7807 desa, dan 766 kelurahan. Desa hanya dimiliki oleh Kabupaten, sedangkan Kota tidak memiliki desa. Kabupaten Banyumas memiliki jumlah kecamatan paling banyak (27 kecamatan), sedangkan Kota Magelang memiliki jumlah kecamatan paling sedikit (3 kecamatan). Jumlah desa dan/atau kelurahan paling banyak dimiliki oleh Kabupaten Purworejo (494 desa dan kelurahan), sedangkan Kota Magelang memiliki desa atau/atau kelurahan paling sedikit (17 kelurahan). Pembagian wilayah menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Desa dan Kelurahan
1. Kab. Cilacap	24	269	15	284
2. Kab. Banyumas	27	301	30	331
3. Kab. Purbalingga	18	224	15	239
4. Kab. Banjarnegara	20	266	12	278
5. Kab. Kebumen	26	449	11	460
6. Kab. Purworejo	16	469	25	494
7. Kab. Wonosobo	15	236	29	265
8. Kab. Magelang	21	367	5	372
9. Kab. Boyolali	19	263	4	267
10. Kab. Klaten	26	391	10	401
11. Kab. Sukoharjo	12	150	17	167
12. Kab. Wonogiri	25	251	43	294
13. Kab. Karanganyar	17	162	15	177
14. Kab. Sragen	20	196	12	208
15. Kab. Grobogan	19	273	7	280
16. Kab. Blora	16	271	24	295

17. Kab. Rembang	14	287	7	294
18. Kab. Pati	21	401	5	406
19. Kab. Kudus	9	123	9	132
20. Kab. Jepara	14	183	11	194
21. Kab. Demak	14	243	6	249
22. Kab. Semarang	19	208	27	235
23. Kab. Temanggung	20	266	23	289
24. Kab. Kendal	20	265	20	285
25. Kab. Batang	12	239	9	248
26. Kab. Pekalongan	19	270	13	283
27. Kab. Pemaslang	14	211	11	222
28. Kab. Tegal	18	281	6	287
29. Kab. Brebes	17	292	5	297
30. Kota Magelang	3	-	17	17
31. Kota Surakarta	5	-	51	51
32. Kota Salatiga	4	-	22	22
33. Kota Semarang	16	-	177	177
34. Kota Pekalongan	4	-	46	46
35. Kota Tegal	4	-	27	27
Jumlah	568	7807	766	8573

Sumber : Propinsi Jawa Tengah dalam Angka (BPS, 2010)

Gambar 4.1
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah



Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, BPS, 2010

Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah pengairan teknis (39,25 persen), lainnya berpengairan setengah teknis,

seederhana, tadah hujan, dan lain-lain. Dengan menggunakan teknik irigasi yang baik, potensi lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali sebesar 68,03 persen. Berikutnya, lahan kering yang dipakai untuk tegal/kebun sebesar 33,61 persen dari total bukan lahan sawah. Persentase ini merupakan penggunaan bukan lahan sawah lain.

Jumlah penduduk Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 30.775.846 jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah [Kabupaten Brebes](#) (1,767 juta jiwa), [Kabupaten Cilacap](#) (1,644 juta jiwa), dan [Kabupaten Banyumas](#) (1,603 juta jiwa). Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik kabupaten ataupun kota. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi. Pertumbuhan penduduk Propinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,5% per tahun), sedang yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09% per tahun). Dari jumlah penduduk ini, 47% diantaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak adalah di sektor [pertanian](#) (42,34%), diikuti dengan [perdagangan](#) (20,91%), [industri](#) (15,71%), dan [jasa](#) (10,98%).

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah, dimana mata pencaharian di bidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap. Kawasan [hutan](#) meliputi 20% wilayah Propinsi, terutama di bagian utara dan selatan. Daerah Blora-Grobogan merupakan penghasil kayu jati. Jawa Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Daerah Semarang-Ungaran-Demak-Kudus merupakan kawasan industri utama di Jawa Tengah. Kudus dikenal sebagai pusat industri [rokok](#). Cilacap terdapat industri [semen](#). [Blok Cepu](#) di pinggiran [Kabupaten](#)

[Blora](#) (perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah) terdapat cadangan [minyak bumi](#) yang cukup signifikan, dan kawasan ini sejak zaman [Hindia Belanda](#) telah lama dikenal sebagai daerah tambang minyak.

4.2 Hasil Analisis Deskriptif

4.2.1 Kontribusi Pajak dan Retribusi

Kontribusi pajak dan retribusi daerah adalah besarnya kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak dan retribusi terhadap penerimaan PAD. Semakin tinggi kontribusi pajak dan retribusi daerah menunjukkan pemerintah daerah semakin berhasil menggali potensi daerah sehingga pemerintah daerah semakin besar kemungkinannya untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hasil kontribusi pajak dan retribusi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kontribusi Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.53183	0.23000	0.70800	0.19190	0.82789	0.08700	1.31100	0.46598
Kab Banyumas	0.47900	0.34500	0.66300	0.12350	1.00567	0.78400	1.57800	0.25963
Kab Purbalingga	0.44367	0.16300	0.75600	0.26905	0.89933	0.68100	1.43400	0.23879
Kab Banjarnegara	0.61450	0.49600	0.70800	0.07974	0.90878	0.64700	1.56300	0.31438
Kab Kebumen	0.52683	0.40000	0.66300	0.12387	0.79411	0.39900	1.38600	0.29788
Kab Purworejo	0.34633	0.28000	0.39400	0.04007	0.94878	0.75500	1.62000	0.28599
Kab Wonosobo	0.70950	0.61400	0.79900	0.06992	0.82656	0.46900	1.80700	0.41854
Kab Magelang	0.43000	0.16400	0.57600	0.14452	0.93689	0.70300	1.43000	0.26772
Kab Boyolali	0.43300	0.08500	0.72900	0.27375	1.08633	0.74700	2.24600	0.47603
Kab Klaten	0.45167	0.34800	0.52100	0.05890	0.82511	0.54500	1.32300	0.22747
Kab Sukoharjo	0.51733	0.46000	0.59900	0.05793	0.92844	0.56500	1.19700	0.21453
Kab Wonogiri	0.59383	0.45100	0.70500	0.09888	0.80422	0.49300	1.34500	0.24046
Kab Karanganyar	0.41333	0.18100	0.54500	0.14010	0.90478	0.66400	1.30700	0.20958
Kab Sragen	0.71317	0.48700	0.89700	0.13842	0.85133	0.49800	1.71600	0.35902
Kab Grobogan	0.45367	0.29000	0.65600	0.17185	0.84422	0.63800	1.13900	0.18883
Kab Blora	0.56800	0.32000	0.78600	0.15142	0.79744	0.54000	1.85800	0.42493
Kab Rembang	0.62300	0.45200	0.77100	0.11554	0.97867	0.69100	1.50000	0.30964
Kab Pati	0.35883	0.26000	0.56000	0.11166	0.95400	0.67500	1.61000	0.34034
Kab Kudus	0.56533	0.35500	0.74600	0.14895	1.06944	0.86500	1.81200	0.31916
Kab Jepara	0.55750	0.29800	0.81300	0.19712	0.88589	0.54900	1.57900	0.32076
Kab Demak	0.57833	0.45200	0.70900	0.09716	0.90189	0.55400	1.68900	0.36856
Kab Semarang	0.43783	0.31600	0.58000	0.12628	0.93778	0.76500	1.42700	0.21722
Kab Temanggung	0.66733	0.57700	0.75200	0.06918	0.98067	0.68400	1.58500	0.29071

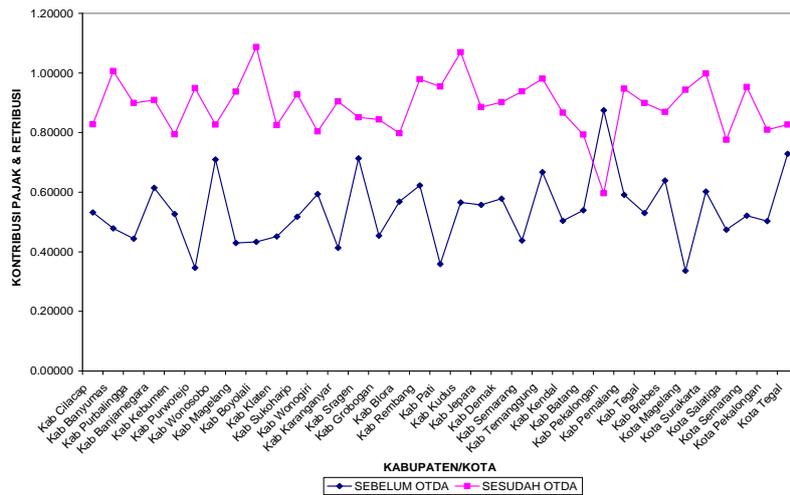
Kab Kendal	0.50350	0.31300	0.63300	0.11085	0.86678	0.58300	1.27300	0.21496
Kab Batang	0.53917	0.32500	0.67600	0.12197	0.79267	0.46800	1.61100	0.33668
Kab Pekalongan	0.87500	0.49800	1.27400	0.31230	0.59600	0.33100	0.99200	0.23975
Kab Pemasang	0.59100	0.39100	0.87300	0.15629	0.94689	0.59900	1.52000	0.35351
Kab Tegal	0.53050	0.27100	0.66800	0.15046	0.89922	0.67400	1.44400	0.23432
Kab Brebes	0.63917	0.45900	0.76000	0.11642	0.86944	0.57500	1.14400	0.20019
Kota Magelang	0.33633	0.28400	0.39600	0.04971	0.94311	0.74100	1.45900	0.22248
Kota Surakarta	0.60183	0.45900	0.72800	0.12387	0.99822	0.84600	1.46500	0.19198
Kota Salatiga	0.47417	0.24000	0.71000	0.20484	0.77622	0.09000	1.42000	0.36031
Kota Semarang	0.52150	0.38300	0.65800	0.08998	0.95267	0.83400	1.15800	0.11658
Kota Pekalongan	0.50300	0.45400	0.58600	0.04644	0.80900	0.47200	1.36000	0.28109
Kota Tegal	0.72900	0.60100	0.82000	0.07854	0.82667	0.47900	1.46800	0.31599

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa secara umum nilai dari kontribusi pajak dan retribusi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah antara 0,33633 sampai 1,08633 dengan nilai rata-rata 0,71475 dan standar deviasi 0,20574. Perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata diperoleh skor 28,78%, yang berarti variansi antara skor minimum dengan skor maksimum sangat besar.

Sebelum otonomi daerah, nilai rata-rata dari kontribusi pajak dan retribusi di masing-masing Kabupaten/Kota bervariasi. Kabupaten Pekalongan memiliki nilai rata-rata kontribusi pajak dan retribusi yang paling besar, yaitu 0,87500, sedangkan Kota Magelang memiliki nilai rata-rata kontribusi pajak dan retribusi yang paling rendah, yaitu 0,33633. Sesudah otonomi daerah, nilai rata-rata dari kontribusi pajak dan retribusi di masing-masing Kabupaten/Kota mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah. Kabupaten Boyolali memiliki kontribusi pajak dan retribusi yang paling besar, yaitu 1,08633. Sedangkan Kabupaten Pekalongan memiliki kontribusi pajak dan retribusi yang paling kecil, yaitu 0,59600. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sejak otonomi daerah terjadi peningkatan kontribusi pajak dan retribusi, yang secara otomatis meningkatkan PAD. Gambaran dari kontribusi pajak dan retribusi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah dapat dilihat dengan lebih jelas pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2
Kontribusi Pajak dan Retribusi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

4.2.2 Rasio Pendapatan Asli Daerah

Rasio PAD menunjukkan ada atau tidaknya sistem perencanaan penerimaan PAD. Semakin tinggi rasio PAD, berarti pemerintah daerah mengandalkan penerimaan PAD untuk membiayai pembangunan daerah. Pemerintah daerah merencanakan PAD dalam APBD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Sebaliknya, Semakin rendah rasio PAD, berarti pemerintah daerah kurang mengandalkan penerimaan PAD dalam membiayai pembangunan daerah.

Hasil rasio PAD di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rasio PAD Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.00243	0.00095	0.05870	0.00113	0.01114	0.00091	0.05870	0.01970
Kab Banyumas	0.01260	0.00643	0.01981	0.00429	0.01158	0.00622	0.01981	0.00514
Kab Purbalingga	0.01020	0.00710	0.02212	0.00362	0.01284	0.00450	0.02212	0.00599
Kab Banjarnegara	0.00577	0.00310	0.01541	0.00193	0.00872	0.00239	0.01541	0.00439
Kab Kebumen	0.00843	0.00460	0.95833	0.00281	0.11478	0.00298	0.95833	0.31636
Kab Purworejo	0.01149	0.00458	1.16267	0.00519	0.21618	0.00472	1.16267	0.42542
Kab Wonosobo	0.01191	0.00635	0.02163	0.00456	0.01283	0.00525	0.02163	0.00541
Kab Magelang	0.02429	0.00521	0.02041	0.03583	0.01196	0.00440	0.02041	0.00607
Kab Boyolali	0.02369	0.00493	0.01900	0.02695	0.01086	0.00384	0.01900	0.00545
Kab Klaten	0.00730	0.00308	0.00886	0.00302	0.00507	0.00219	0.00886	0.00210
Kab Sukoharjo	0.00719	0.00328	0.00880	0.00290	0.00571	0.00267	0.00880	0.00217
Kab Wonogiri	0.01311	0.00632	0.01944	0.00465	0.01161	0.00502	0.01944	0.00540
Kab Karanganyar	0.00715	0.00428	0.01038	0.00230	0.00661	0.00451	0.01038	0.00206
Kab Sragen	0.01311	0.00543	0.02591	0.00544	0.01478	0.00505	0.02591	0.00679
Kab Grobogan	0.00930	0.00645	0.02509	0.00245	0.01296	0.00466	0.02509	0.00617
Kab Blora	0.00731	0.00442	0.02173	0.00242	0.01249	0.00566	0.02173	0.00495
Kab Rembang	0.01105	0.00483	0.01841	0.00408	0.01086	0.00393	0.01841	0.00564
Kab Pati	0.00951	0.00542	0.02317	0.00396	0.01308	0.00500	0.02317	0.00640
Kab Kudus	0.02602	0.00183	0.00414	0.05518	0.00242	0.00140	0.00414	0.00083
Kab Jepara	0.01025	0.00566	0.02262	0.00565	0.01311	0.00364	0.02262	0.00663
Kab Demak	0.00624	0.00300	0.01264	0.00216	0.00723	0.00268	0.01264	0.00341
Kab Semarang	0.01180	0.00517	0.01593	0.00462	0.01012	0.00397	0.01593	0.00448
Kab Temanggung	0.00772	0.00424	0.01419	0.00276	0.00888	0.00310	0.01419	0.00390
Kab Kendal	0.00538	0.00283	0.01088	0.00190	0.00719	0.00302	0.01088	0.00301
Kab Batang	0.00497	0.00275	1.13481	0.00170	0.13360	0.00366	1.13481	0.37547
Kab Pekalongan	0.00768	0.00301	0.01441	0.00363	0.00831	0.00325	0.01441	0.00406
Kab Pemasang	0.00708	0.00332	0.01078	0.00256	0.00707	0.00327	0.01078	0.00284
Kab Tegal	0.00982	0.00484	0.02153	0.00535	0.01227	0.00470	0.02153	0.00597
Kab Brebes	0.00412	0.00069	0.00651	0.00197	0.00452	0.00239	0.00651	0.00145
Kota Magelang	0.02282	0.01310	0.03541	0.00736	0.02360	0.00991	0.03541	0.01085
Kota Surakarta	0.01868	0.00871	0.02179	0.00628	0.01360	0.00739	0.02179	0.00468
Kota Salatiga	0.02175	0.01155	0.09495	0.00791	0.03143	0.00026	0.09495	0.02686
Kota Semarang	0.01127	0.00472	0.01459	0.00408	0.00873	0.00374	0.01459	0.00409
Kota Pekalongan	0.00946	0.00357	0.01804	0.00446	0.00977	0.00268	0.01804	0.00548
Kota Tegal	0.01938	0.00976	0.05512	0.00669	0.03215	0.00847	0.05512	0.01683

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa secara umum nilai rata-rata dari rasio PAD di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah antara 0,00242 sampai 0,21618 dengan nilai rata-rata 0,01769 dan standar deviasi 0,03125. Perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata diperoleh skor 176,68%, yang berarti variansi antara skor minimum dengan skor maksimum sangat besar.

Sebelum otonomi daerah, nilai rata-rata dari rasio PAD di masing-masing Kabupaten/Kota memiliki variasi yang tidak terlalu besar. Kabupaten Kudus memiliki

dapat menggali potensi daerah dengan maksimal sehingga pendapatan pemerintah daerah yang berupa pajak akan meningkat. Oleh karenanya, pemerintah daerah berani merencanakan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah di APBD. Sebaliknya, rasio pajak yang rendah menunjukkan pemerintah daerah kurang yakin dapat menggali potensi daerah, sehingga PAD yang bersumber dari pajak tidak besar. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah kurang berani menetapkan penerimaan pajak yang tinggi dalam sumber APBD. Dengan kata lain, pemerintah daerah tidak yakin pajak yang diterima oleh daerahnya dapat diandalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah di APBD.

Hasil rasio pajak di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Rasio Pajak Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.00007	0.00003	0.00009	0.00003	0.00144	0.00047	0.00300	0.00084
Kab Banyumas	0.00049	0.00024	0.00055	0.00015	0.00416	0.00173	0.01106	0.00291
Kab Purbalingga	0.00002	0.00002	0.00005	0.00001	0.00308	0.00087	0.01124	0.00318
Kab Banjarnegara	0.00005	0.00003	0.00006	0.00001	0.00235	0.00063	0.00911	0.00263
Kab Kebumen	0.00009	0.00005	0.00013	0.00003	0.09101	0.00078	0.80180	0.26655
Kab Purworejo	0.00008	0.00003	0.00011	0.00003	0.03280	0.00069	0.16407	0.06126
Kab Wonosobo	0.00027	0.00011	0.00027	0.00007	0.00334	0.00115	0.01286	0.00368
Kab Magelang	0.00018	0.00016	0.00198	0.00071	0.00572	0.00199	0.01294	0.00344
Kab Boyolali	0.00001	0.00001	0.00008	0.00002	0.00335	0.00077	0.01321	0.00388

Kab Klaten	0.00006	0.00003	0.00008	0.00002	0.00221	0.00108	0.00468	0.00116
Kab Sukoharjo	0.00007	0.00002	0.00007	0.00002	0.00278	0.00135	0.00456	0.00106
Kab Wonogiri	0.00010	0.00003	0.00010	0.00003	0.00298	0.00027	0.01097	0.00317
Kab Karanganyar	0.00004	0.00004	0.00008	0.00002	0.00297	0.00149	0.00571	0.00128
Kab Sragen	0.00011	0.00004	0.00011	0.00003	0.00398	0.00097	0.01548	0.00446
Kab Grobogan	0.00004	0.00003	0.00005	0.00001	0.00248	0.00099	0.00426	0.00123
Kab Blora	0.00013	0.00005	0.00013	0.00004	0.00305	0.00030	0.01421	0.00428
Kab Rembang	0.00017	0.00006	0.00017	0.00005	0.00288	0.00080	0.00868	0.00238
Kab Pati	0.00014	0.00004	0.00014	0.00004	0.00365	0.00109	0.01422	0.00412
Kab Kudus	0.00007	0.00002	0.00218	0.00087	0.00085	0.00037	0.00239	0.00062
Kab Jepara	0.00007	0.00007	0.00016	0.00004	0.00376	0.00096	0.01313	0.00378
Kab Demak	0.00003	0.00001	0.00004	0.00001	0.00238	0.00090	0.00695	0.00190
Kab Semarang	0.00032	0.00018	0.00051	0.00011	0.00353	0.00149	0.00956	0.00246
Kab Temanggung	0.00005	0.00002	0.00005	0.00001	0.00250	0.00089	0.00802	0.00219
Kab Kendal	0.00010	0.00004	0.00010	0.00003	0.00270	0.00127	0.00673	0.00172
Kab Batang	0.00016	0.00012	0.00024	0.00006	0.03244	0.00090	0.27088	0.08945
Kab Pekalongan	0.00006	0.00001	0.00006	0.00002	0.00258	0.00075	0.00790	0.00224
Kab Pemasang	0.00008	0.00004	0.00010	0.00002	0.00190	0.00099	0.00517	0.00132
Kab Tegal	0.00004	0.00003	0.00009	0.00003	0.00364	0.00126	0.01063	0.00296
Kab Brebes	0.00005	0.00000	0.00005	0.00002	0.00150	0.00077	0.00297	0.00073
Kota Magelang	0.00087	0.00033	0.00095	0.00025	0.00594	0.00176	0.02506	0.00734
Kota Surakarta	0.00158	0.00105	0.00216	0.00039	0.00723	0.00309	0.01346	0.00326
Kota Salatiga	0.00066	0.00037	0.00075	0.00017	0.00634	0.00007	0.02292	0.00672
Kota Semarang	0.00199	0.00091	0.00206	0.00050	0.00549	0.00227	0.00882	0.00260
Kota Pekalongan	0.00069	0.00023	0.00069	0.00019	0.00463	0.00165	0.01052	0.00303
Kota Tegal	0.00096	0.00039	0.00097	0.00025	0.00814	0.00251	0.03322	0.00970

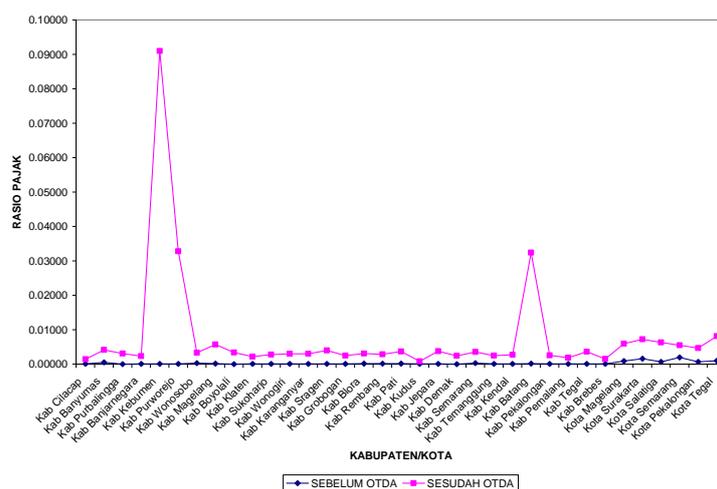
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa secara umum nilai rata-rata dari rasio pajak di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah antara 0,00001 sampai 0,09101 dengan nilai rata-rata 0,00399 dan standar deviasi 0,01191. Perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata diperoleh skor 298,19%, yang berarti variansi antara skor minimum dengan skor maksimum sangat besar.

Sebelum otonomi daerah, nilai rata-rata dari rasio pajak di masing-masing Kabupaten/Kota kurang bervariasi. Kota Semarang memiliki nilai rata-rata rasio pajak yang paling tinggi, yaitu 0,00199, sedangkan Kabupaten Boyolali memiliki nilai rata-rata rasio pajak yang paling rendah, yaitu sebesar 0,00001. Sesudah otonomi daerah, nilai-rata dari rasio pajak di masing-masing Kabupaten/Kota mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah. Sesudah otonomi daerah Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan rasio pajak yang paling tinggi, yaitu 0,09101. Sedangkan Kabupaten Kudus memiliki rasio pajak yang paling kecil, yaitu 0,00085. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rasio pajak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan penerimaan pajak berarti daerah tersebut juga

mengalami pertumbuhan ekonomi. Gambaran dari rasio pajak di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah dapat dilihat dengan lebih jelas pada Gambar 4.4

Gambar 4.4
Rasio Pajak di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

4.2.4 Rasio Retribusi

Rasio retribusi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Hasil rasio retribusi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Rasio Retribusi Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.00119	0.00046	0.00176	0.00057	0.00102	0.00032	0.00208	0.00061
Kab Banyumas	0.00569	0.00270	0.00860	0.00251	0.00732	0.00395	0.01108	0.00298
Kab Purbalingga	0.00391	0.00204	0.00599	0.00170	0.00854	0.00259	0.01450	0.00412
Kab Banjarnegara	0.00349	0.00195	0.00465	0.00124	0.00520	0.00200	0.00836	0.00233
Kab Kebumen	0.00421	0.00269	0.00551	0.00126	0.06221	0.00191	0.52654	0.17414
Kab Purworejo	0.00389	0.00168	0.00597	0.00182	0.14536	0.00288	0.81291	0.29036
Kab Wonosobo	0.00838	0.00378	0.01379	0.00369	0.00683	0.00285	0.01061	0.00313

Kab Magelang	0.00950	0.00177	0.03895	0.01450	0.00549	0.00145	0.00868	0.00313
Kab Boyolali	0.00536	0.00258	0.00764	0.00214	0.00862	0.00310	0.01550	0.00489
Kab Klaten	0.00322	0.00144	0.00462	0.00139	0.00179	0.00112	0.00281	0.00056
Kab Sukoharjo	0.00360	0.00194	0.00549	0.00142	0.00230	0.00117	0.00320	0.00074
Kab Wonogiri	0.00778	0.00362	0.01167	0.00323	0.00611	0.00351	0.01015	0.00248
Kab Karanganyar	0.00269	0.00188	0.00372	0.00076	0.00286	0.00182	0.00345	0.00057
Kab Sragen	0.00890	0.00483	0.01255	0.00338	0.00810	0.00333	0.01144	0.00330
Kab Grobogan	0.00430	0.00192	0.00714	0.00219	0.00791	0.00332	0.01484	0.00316
Kab Blora	0.00382	0.00275	0.00477	0.00085	0.00633	0.00369	0.00931	0.00191
Kab Rembang	0.00673	0.00341	0.01116	0.00298	0.00758	0.00280	0.01196	0.00402
Kab Pati	0.00321	0.00169	0.00500	0.00129	0.00823	0.00341	0.01405	0.00334
Kab Kudus	0.01315	0.00063	0.06845	0.02711	0.00163	0.00115	0.00250	0.00038
Kab Jepara	0.00516	0.00240	0.00753	0.00206	0.00723	0.00281	0.01164	0.00330
Kab Demak	0.00353	0.00191	0.00482	0.00125	0.00394	0.00159	0.00652	0.00198
Kab Semarang	0.00459	0.00250	0.00639	0.00163	0.00583	0.00252	0.00846	0.00259
Kab Temanggung	0.00519	0.00256	0.00750	0.00211	0.00592	0.00262	0.00875	0.00240
Kab Kendal	0.00255	0.00152	0.00344	0.00082	0.00343	0.00142	0.00623	0.00173
Kab Batang	0.00237	0.00173	0.00337	0.00066	0.06886	0.00171	0.58803	0.19470
Kab Pekalongan	0.00604	0.00304	0.00826	0.00214	0.00225	0.00085	0.00590	0.00156
Kab Pemasang	0.00382	0.00271	0.00490	0.00092	0.00457	0.00191	0.00720	0.00204
Kab Tegal	0.00463	0.00280	0.00625	0.00148	0.00717	0.00299	0.01323	0.00347
Kab Brebes	0.00276	0.00031	0.00429	0.00150	0.00228	0.00151	0.00319	0.00048
Kota Magelang	0.00701	0.00338	0.01008	0.00263	0.01618	0.00870	0.02294	0.00645
Kota Surakarta	0.00924	0.00529	0.01301	0.00299	0.00636	0.00317	0.01052	0.00223
Kota Salatiga	0.01018	0.00345	0.01894	0.00653	0.01198	0.00019	0.01999	0.00700
Kota Semarang	0.00403	0.00220	0.00571	0.00143	0.00280	0.00107	0.00432	0.00124
Kota Pekalongan	0.00433	0.00157	0.00712	0.00220	0.00278	0.00094	0.00516	0.00142
Kota Tegal	0.01327	0.00761	0.01849	0.00459	0.01766	0.00724	0.02727	0.00920

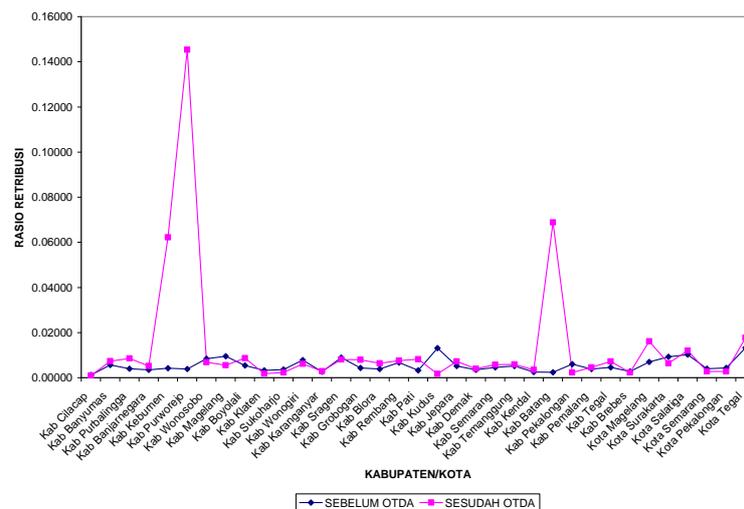
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa secara umum nilai rata-rata dari rasio redistribusi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah antara 0,00102 sampai 0,14536 dengan nilai rata-rata 0,00949 dan standar deviasi 0,01957. Perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata diperoleh skor 206,24%, yang berarti variansi antara skor minimum dengan skor maksimum sangat besar.

Sebelum otonomi daerah, nilai rata-rata dari rasio redistribusi di masing-masing Kabupaten/Kota memiliki variasi yang tidak terlalu besar. Kota Tegal memiliki nilai rata-rata rasio redistribusi yang paling besar, yaitu 0,01327, sedangkan Kabupaten Cilacap memiliki nilai rata-rata rasio redistribusi yang paling rendah, yaitu sebesar 0,00119. Sesudah otonomi daerah, nilai-rata dari rasio redistribusi di masing-masing Kabupaten/Kota mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah. Sesudah otonomi daerah Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan rasio redistribusi yang paling tinggi, yaitu 0,14536. Sedangkan Kabupaten

Cilacap memiliki rasio redistribusi yang paling kecil, yaitu 0,00102. Daerah mengalami peningkatan rasio redistribusi sejak otonomi daerah. Peningkatan retribusi juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena retribusi merupakan punggutan yang diterima pemerintah atas lahan pemerintah yang digunakan untuk kegiatan ekonomi. Dengan demikian, semakin tinggi retribusi berarti semakin banyak lahan milik pemerintah yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi oleh masyarakat. Gambaran dari rasio redistribusi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah dapat dilihat dengan lebih jelas pada Gambar 4.5

Gambar 4.5
Rasio Retribusi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

4.2.5 Elastisitas Pajak dan Retribusi

Elastisitas pajak dan retribusi adalah tingkat responsif pajak dan retribusi terhadap PDRB. Nilai elastisitas > 1 adalah pajak dan retribusi elastis, yang berarti setiap ada perubahan dalam PDRB sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan dalam pajak dan retribusi lebih besar dari 1%. Nilai elastisitas < 1 adalah pajak dan retribusi

inelastis, yang berarti setiap ada perubahan dalam PDRB sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan dalam pajak dan retribusi lebih kecil dari 1%. Nilai elastisitas = 1 adalah pajak dan retribusi unitar elastis, yang berarti nilai pajak dan retribusi konstan meskipun ada perubahan dalam PDRB sebesar 1%

Hasil elastisitas pajak dan retribusi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Elastisitas Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008

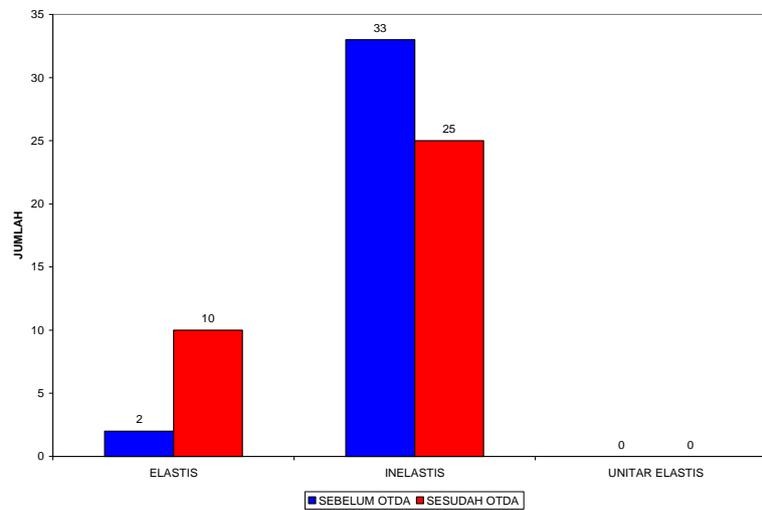
KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.47054	0.17828	4.52082	0.27261	0.88761	-0.58821	4.52082	1.60876
Kab Banyumas	0.49284	-0.00852	2.74032	0.43645	0.37139	-7.86531	2.74032	3.20764
Kab Purbalingga	0.46624	-1.08439	3.00213	0.95434	1.06458	-3.23509	3.00213	1.89048
Kab Banjarnegara	0.58249	-0.43029	2.80064	0.70057	0.84915	-2.91817	2.80064	1.68204
Kab Kebumen	0.83080	-1.20815	2.12754	1.39856	0.69689	-0.31876	2.12754	0.81978
Kab Purworejo	0.43686	0.09905	3.71732	0.27632	1.15107	-0.00307	3.71732	1.37643
Kab Wonosobo	0.19614	-0.26375	2.69236	0.46780	0.09168	-8.84677	2.69236	3.45712
Kab Magelang	0.33134	-0.00634	3.16488	0.26295	1.00798	-1.11309	3.16488	1.43997
Kab Boyolali	0.54297	-0.00758	3.01513	0.55636	1.00315	-3.85547	3.01513	2.11604
Kab Klaten	0.39357	0.12731	3.22818	0.25830	0.92398	-2.37623	3.22818	1.66274
Kab Sukoharjo	0.39414	0.21746	2.32584	0.18583	0.81652	-1.83836	2.32584	1.30125
Kab Wonogiri	0.28544	-2.00691	3.05656	1.39887	0.53533	-4.55790	3.05656	2.18128
Kab Karanganyar	1.22011	-0.91929	3.60145	1.98435	1.26155	-0.74066	3.60145	1.35827
Kab Sragen	0.73443	-0.23404	3.47998	0.90011	0.83016	-3.37340	3.47998	2.00011
Kab Grobogan	0.06276	-1.61135	2.89998	1.51312	0.92271	-1.80742	2.89998	1.43999
Kab Blora	-2.24051	-13.17200	4.27428	6.26174	0.79442	-4.87000	4.27428	2.71400
Kab Rembang	0.44286	-2.98320	2.19389	2.13337	0.98574	-0.77997	2.19389	0.94076
Kab Pati	0.51261	0.08708	3.95889	0.40986	1.09347	-4.43914	3.95889	2.65983
Kab Kudus	-0.50923	-3.10245	4.51882	1.46356	0.97866	-2.81130	4.51882	2.03055
Kab Jepara	0.52887	-0.13296	2.73774	0.64760	0.80470	-2.36713	2.73774	1.68853
Kab Demak	0.56940	-0.26253	3.00103	0.68443	1.13351	-1.33789	3.00103	1.51775
Kab Semarang	0.55235	-0.07726	2.78212	0.62922	1.10157	-1.94654	2.78212	1.48618
Kab Temanggung	0.41106	0.15614	2.39309	0.22867	0.83966	-3.24388	2.39309	1.75269
Kab Kendal	1.00561	-0.18998	3.34662	1.17400	1.07240	-0.95438	3.34662	1.29724
Kab Batang	0.97779	-1.01243	3.46837	1.49449	0.91560	-2.12954	3.46837	1.67916
Kab Pekalongan	0.53189	0.10118	3.69875	0.56302	0.82508	-2.24917	3.69875	1.62587
Kab Pemasang	0.73888	0.07923	2.25112	0.80087	0.81415	-1.91199	2.25112	1.21758
Kab Tegal	0.84814	-0.26301	2.87123	0.91013	0.75925	-2.50701	2.87123	1.57538
Kab Brebes	0.36396	-0.05338	2.24180	0.46742	0.84485	-0.47055	2.24180	0.94923
Kota Magelang	0.43812	0.05403	4.45243	0.39035	1.11662	-2.95306	4.45243	2.28025
Kota Surakarta	0.69320	0.25964	2.50549	0.75155	0.89678	-1.24960	2.50549	1.16842
Kota Salatiga	-0.34248	-3.99975	3.25494	2.12058	0.73854	-2.52618	3.25494	1.66211
Kota Semarang	0.61773	-0.38570	1.89856	0.81310	0.84237	-0.33730	1.89856	0.73136
Kota Pekalongan	0.32766	0.01646	3.13051	0.21335	0.83207	-2.29287	3.13051	1.52691
Kota Tegal	0.76267	-0.12436	3.02496	0.80957	0.62473	-4.79583	3.02496	2.23691

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa secara umum nilai rata-rata dari elastisitas pajak dan retribusi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah antara - 2,24051 sampai 1,26155 dengan nilai rata-rata 0,64427 dan standar deviasi 0,48477. Perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata diperoleh skor 75,24%, yang berarti variansi antara skor minimum dengan skor maksimum sangat besar.

Sebelum otonomi daerah, hanya ada dua Kabupaten/Kota yang memiliki pajak dan retribusi yang elastis, yaitu Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Kendal, sedangkan daerah lainnya memiliki pajak dan retribusi yang inelastis. Sedangkan sesudah otonomi daerah terjadi peningkatan jumlah daerah yang memiliki pajak dan retribusi elastis. Daerah yang memiliki pajak dan retribusi elastis sesudah otonomi daerah adalah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Magelang. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah berkaitan dengan otonomi daerah dalam meningkatkan pajak dan retribusi sehingga pendapatan daerah yang berasal dari kedua hal tersebut meningkat dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meningkatnya jumlah elastisitas pajak dan retribusi menunjukkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi yang meningkat sejak otonomi daerah memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Gambaran dari elastisitas pajak dan retribusi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah dapat dilihat dengan lebih jelas pada Gambar 4.6

Gambar 4.6
Jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Elastisitas Pajak dan Retribusi
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

4.2.6 Proporsi PAD

Proporsi PAD merupakan salah satu indikator dari kebijakan fiskal untuk mengukur kemandirian daerah. Semakin tinggi rasio PAD berarti PAD memberikan kontribusi yang tinggi dalam total penerimaan daerah, sehingga kemungkinan daerah memiliki kemandirian keuangan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah rasio PAD berarti PAD memberikan kontribusi yang kecil dalam total penerimaan daerah, sehingga kemungkinan daerah memiliki kemandirian keuangan semakin rendah.

Hasil proporsi PAD di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Proporsi PAD Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA	SESUDAH OTDA
----------------	--------------	--------------

	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.32174	0.21237	0.69682	0.18970	0.28680	0.06993	1.01021	0.32158
Kab Banyumas	0.08873	0.06254	0.10910	0.01707	0.07863	0.04067	0.11277	0.02184
Kab Purbalingga	0.05142	0.02706	0.09725	0.02440	0.06103	0.01609	0.10898	0.03069
Kab Banjarnegara	0.07020	0.02456	0.11509	0.03027	0.05908	0.01496	0.08963	0.02464
Kab Kebumen	0.32825	0.03848	1.48128	0.56583	0.05326	0.02019	0.07838	0.02200
Kab Purworejo	0.07125	0.04636	0.10477	0.02337	0.05625	0.02710	0.08484	0.01819
Kab Wonosobo	0.06159	0.02222	0.12341	0.03597	0.05521	0.02444	0.07644	0.01951
Kab Magelang	0.13648	0.04803	0.31764	0.09452	0.08827	0.04700	0.11474	0.02401
Kab Boyolali	0.30979	0.04083	1.11326	0.41797	0.07355	0.03389	0.13786	0.02951
Kab Klaten	0.08970	0.03613	0.13716	0.03606	0.04327	0.01989	0.05597	0.01289
Kab Sukoharjo	0.06669	0.02313	0.11663	0.03440	0.04551	0.01646	0.07989	0.02005
Kab Wonogiri	0.12523	0.06641	0.16073	0.03953	0.05988	0.03540	0.08016	0.01367
Kab Karanganyar	0.08835	0.03791	0.20673	0.05986	0.05495	0.03421	0.07571	0.01605
Kab Sragen	0.11659	0.03764	0.16349	0.04820	0.08483	0.03325	0.11627	0.03242
Kab Grobogan	0.07648	0.03764	0.11019	0.02832	0.06646	0.02611	0.09659	0.02497
Kab Blora	0.05393	0.02884	0.08342	0.02020	0.05380	0.02453	0.08150	0.01850
Kab Rembang	0.06202	0.01759	0.08868	0.02682	0.05321	0.01567	0.09304	0.02789
Kab Pati	0.14371	0.07008	0.19997	0.05912	0.10192	0.05477	0.13312	0.02732
Kab Kudus	0.09666	0.04735	0.15671	0.04175	0.07604	0.03061	0.12774	0.03099
Kab Jepara	0.11216	0.06198	0.18052	0.03891	0.10269	0.04054	0.14730	0.03952
Kab Demak	0.05180	0.02442	0.07974	0.01926	0.04230	0.01527	0.06309	0.01562
Kab Semarang	0.15458	0.06902	0.22698	0.05443	0.10425	0.04972	0.13773	0.02689
Kab Temanggung	0.05682	0.02859	0.08319	0.02000	0.04856	0.01639	0.07686	0.01957
Kab Kendal	0.12342	0.06273	0.16040	0.03684	0.09295	0.05593	0.14490	0.03009
Kab Batang	0.04180	0.01689	0.04828	0.01224	0.05549	0.01473	0.08415	0.02304
Kab Pekalongan	0.08528	0.02927	0.13208	0.04200	0.06506	0.02879	0.09311	0.02166
Kab Pemalang	0.09558	0.03669	0.13068	0.03410	0.06457	0.03046	0.08810	0.02387
Kab Tegal	0.09739	0.04376	0.15433	0.03567	0.07344	0.02954	0.10260	0.02589
Kab Brebes	0.08032	0.04328	0.11332	0.02310	0.05723	0.02619	0.10352	0.02365
Kota Magelang	0.06110	0.02667	0.09189	0.02300	0.07631	0.01864	0.14912	0.04847
Kota Surakarta	0.61367	0.10482	0.85415	0.26280	0.17636	0.11255	0.28537	0.05819
Kota Salatiga	0.05242	0.03936	0.06265	0.00983	0.08537	0.02187	0.14518	0.04203
Kota Semarang	1.47435	0.18709	1.80619	0.63815	0.35585	0.18216	0.75682	0.23678
Kota Pekalongan	0.02023	0.01472	0.03975	0.00967	0.05353	0.00734	0.08763	0.03207
Kota Tegal	0.17276	0.02227	0.23540	0.08126	0.15836	0.07665	0.19469	0.03399

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa secara umum nilai rata-rata dari proporsi PAD di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah antara 0,02023 sampai 1,47435 dengan nilai rata-rata 0,12452 dan standar deviasi 0,18846. Perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata diperoleh skor 151,34%, yang berarti variansi antara skor minimum dengan skor maksimum sangat besar.

Sebelum otonomi daerah, nilai rata-rata dari proporsi PAD di masing-masing Kabupaten/Kota memiliki variasi yang tidak terlalu besar. Kota Semarang memiliki nilai rata-rata proporsi PAD yang paling tinggi, yaitu 1,47435, sedangkan Kota Pekalongan memiliki nilai rata-rata proporsi PAD yang paling rendah, yaitu 0,02023. Sesudah otonomi daerah, nilai-rata dari proporsi PAD di masing-masing

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.04508	0.02471	0.10589	0.03026	0.02293	0.00225	0.07903	0.02427
Kab Banyumas	0.00421	0.00154	0.00747	0.00223	0.01019	0.00139	0.05253	0.01608
Kab Purbalingga	0.00102	0.00040	0.00152	0.00040	0.00282	0.00030	0.00778	0.00251
Kab Banjarnegara	0.00358	0.00067	0.00778	0.00260	0.00775	0.00037	0.05104	0.01629
Kab Kebumen	0.23015	0.00182	1.35396	0.55056	0.00117	0.00040	0.00190	0.00056
Kab Purworejo	0.00213	0.00115	0.00427	0.00120	0.01082	0.00067	0.07660	0.02479
Kab Wonosobo	0.00379	0.00059	0.01193	0.00423	0.01309	0.00050	0.10373	0.03400
Kab Magelang	0.00710	0.00157	0.01438	0.00496	0.00350	0.00086	0.00769	0.00209
Kab Boyolali	0.02459	0.00174	0.10989	0.04221	0.00543	0.00099	0.02275	0.00679
Kab Klaten	0.00434	0.00123	0.00966	0.00331	0.00459	0.00040	0.03553	0.01160
Kab Sukoharjo	0.00286	0.00063	0.00766	0.00273	0.00093	0.00024	0.00218	0.00064
Kab Wonogiri	0.01057	0.00506	0.01722	0.00572	0.00207	0.00077	0.00334	0.00089
Kab Karanganyar	0.00305	0.00127	0.00744	0.00233	0.00129	0.00067	0.00206	0.00050
Kab Sragen	0.01060	0.00252	0.01945	0.00671	0.00855	0.00098	0.04025	0.01217
Kab Grobogan	0.00327	0.00085	0.00710	0.00271	0.00764	0.00050	0.05007	0.01600
Kab Blora	0.00182	0.00079	0.00363	0.00114	0.00289	0.00057	0.01328	0.00396
Kab Rembang	0.00280	0.00044	0.00598	0.00212	0.00869	0.00029	0.06273	0.02031
Kab Pati	0.00803	0.00269	0.01604	0.00520	0.01031	0.00409	0.03306	0.00887
Kab Kudus	0.00706	0.00154	0.01793	0.00659	0.01589	0.00137	0.10730	0.03439
Kab Jepara	0.00709	0.00327	0.00972	0.00261	0.00562	0.00061	0.01028	0.00351
Kab Demak	0.00183	0.00057	0.00399	0.00128	0.00111	0.00028	0.00238	0.00067
Kab Semarang	0.01019	0.00461	0.01559	0.00432	0.00598	0.00144	0.01057	0.00332
Kab Temanggung	0.00253	0.00093	0.00516	0.00164	0.00693	0.00023	0.04919	0.01588
Kab Kendal	0.00820	0.00342	0.01375	0.00374	0.00409	0.00174	0.00984	0.00264
Kab Batang	0.00096	0.00028	0.00140	0.00042	0.00163	0.00010	0.00307	0.00107
Kab Pekalongan	0.00689	0.00111	0.01412	0.00483	0.00650	0.00036	0.05132	0.01681
Kab Pemalang	0.00573	0.00156	0.00968	0.00286	0.00857	0.00054	0.05719	0.01827
Kab Tegal	0.00513	0.00204	0.00749	0.00206	0.00844	0.00056	0.04873	0.01523
Kab Brebes	0.00479	0.00200	0.00965	0.00281	0.00192	0.00049	0.00725	0.00208
Kota Magelang	0.00140	0.00037	0.00308	0.00105	0.00450	0.00031	0.01324	0.00484
Kota Surakarta	0.20534	0.01336	0.28126	0.09843	0.02311	0.00784	0.06726	0.01951
Kota Salatiga	0.00138	0.00046	0.00222	0.00070	0.00450	0.00023	0.01135	0.00412
Kota Semarang	0.88289	0.03258	1.33839	0.46705	0.06001	0.01195	0.17057	0.06479
Kota Pekalongan	0.00033	0.00009	0.00139	0.00052	0.00108	0.00002	0.00220	0.00086
Kota Tegal	0.02442	0.00063	0.03997	0.01438	0.01356	0.00158	0.02771	0.00836

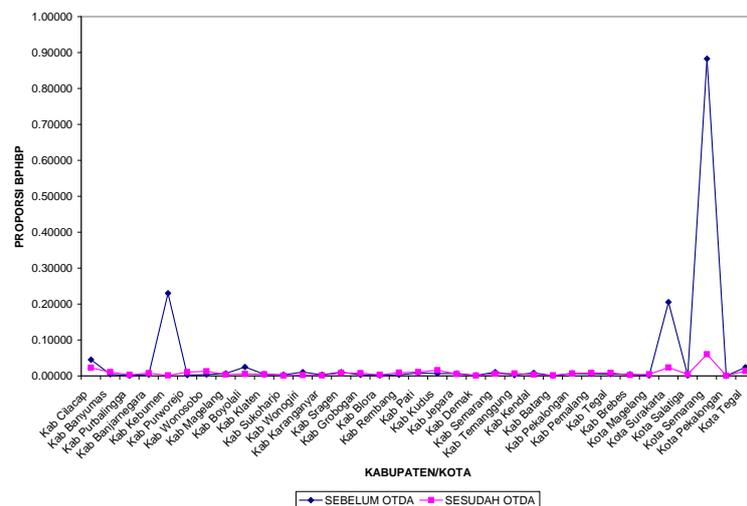
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa secara umum nilai rata-rata dari proporsi BPHBP di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah antara 0,00033 sampai 0,88289 dengan nilai rata-rata 0,02633 dan standar deviasi 0,11010. Perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata diperoleh skor 418,14%, yang berarti variansi antara skor minimum dengan skor maksimum sangat besar.

Sebelum otonomi daerah, nilai rata-rata dari proporsi BPHBP di masing-masing Kabupaten/Kota memiliki variasi yang tidak terlalu besar. Kota Semarang memiliki nilai rata-rata proporsi BPHBP yang paling tinggi, yaitu 0,88289, sedangkan Kota Pekalongan memiliki nilai rata-rata proporsi BPHBP yang paling rendah, yaitu

0,00033. Sesudah otonomi daerah, nilai-rata dari proporsi BPHBP di masing-masing Kabupaten/Kota mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah. Sesudah otonomi daerah Kota Semarang memiliki proporsi BPHBP yang paling tinggi, yaitu 0,06001. Sedangkan Kabupaten Sukoharjo memiliki proporsi BPHBP yang paling kecil, yaitu 0,00093. BPHBP sejak otonomi daerah mengalami penurunan, yang berarti dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah, mengalami penurunan, sehingga pemerintah daerah perlu mencari upaya-upaya untuk meningkatkan PAD supaya dapat membiayai pembangunannya secara mandiri. Gambaran dari proporsi BPHBP di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah dapat dilihat dengan lebih jelas pada Gambar 4.8

Gambar 4.8
Proporsi BPHBP di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

2.2.8 Proporsi Sumbangan Daerah

Proporsi sumbangan daerah merupakan salah satu indikator dari kebijakan fiskal untuk mengukur kemandirian daerah. Semakin tinggi proporsi sumbangan daerah berarti semakin tinggi kontribusi DAU dan DAK dalam total pendapatan daerah, sehingga semakin rendah kemandirian keuangan daerah. Dengan kata lain, daerah mengandalkan bantuan pusat untuk membiayai pembangunan daerah. Sebaliknya, semakin rendah proporsi sumbangan daerah berarti semakin rendah kontribusi DAU dan DAK dalam total pendapatan daerah, sehingga semakin tinggi kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah dalam melakukan pembangunan kurang mengandalkan sumbangan pusat.

Hasil proporsi sumbangan daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Proporsi Sumbangan Daerah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.50268	0.27548	1.18062	0.33743	0.23905	0.02507	0.73206	0.22893
Kab Banyumas	0.04693	0.01719	0.08327	0.02483	0.11923	0.01555	0.63614	0.19592
Kab Purbalingga	0.01130	0.00449	0.01691	0.00445	0.11234	0.00332	0.74513	0.23888
Kab Banjarnegara	0.03990	0.00745	0.08674	0.02895	0.10031	0.00416	0.69423	0.22320
Kab Kebumen	2.56613	0.02031	15.09667	6.13877	0.10073	0.00447	0.79713	0.26122
Kab Purworejo	0.02376	0.01277	0.04758	0.01340	0.10908	0.00745	0.75000	0.24185
Kab Wonosobo	0.04226	0.00657	0.13306	0.04715	0.07652	0.00563	0.53158	0.17088
Kab Magelang	0.07917	0.01752	0.16030	0.05534	0.13914	0.01058	0.91066	0.29005
Kab Boyolali	0.27417	0.01941	1.22532	0.47072	0.14971	0.01228	0.81347	0.25950
Kab Klaten	0.04835	0.01367	0.10767	0.03688	0.09902	0.00449	0.82637	0.27277
Kab Sukoharjo	0.03189	0.00705	0.08541	0.03048	0.09553	0.00266	0.77507	0.25493
Kab Wonogiri	0.11785	0.05638	0.19196	0.06370	0.11059	0.01201	0.79577	0.25707
Kab Karanganyar	0.03402	0.01419	0.08301	0.02598	0.09427	0.00751	0.72735	0.23746
Kab Sragen	0.11817	0.02813	0.21685	0.07484	0.12916	0.01091	0.75305	0.23576
Kab Grobogan	0.03639	0.00945	0.07917	0.03020	0.11807	0.00560	0.85447	0.27678
Kab Blora	0.02027	0.00878	0.04047	0.01270	0.09255	0.00636	0.69132	0.22467
Kab Rembang	0.03116	0.00488	0.06666	0.02368	0.10535	0.00327	0.77590	0.25194
Kab Pati	0.08956	0.03004	0.17886	0.05803	0.16632	0.04557	0.83082	0.25065
Kab Kudus	0.07874	0.01721	0.19988	0.07344	0.11703	0.01530	0.65557	0.20426
Kab Jepara	0.07897	0.03641	0.10833	0.02915	0.14543	0.01554	0.75119	0.22954
Kab Demak	0.02043	0.00635	0.04444	0.01423	0.09692	0.00309	0.78725	0.25893
Kab Semarang	0.11357	0.05137	0.17387	0.04817	0.14641	0.01686	0.73384	0.22257
Kab Temanggung	0.02824	0.01042	0.05756	0.01823	0.10676	0.00254	0.81393	0.26542
Kab Kendal	0.09142	0.03817	0.15330	0.04171	0.12901	0.01939	0.77880	0.24536
Kab Batang	0.01071	0.00315	0.01556	0.00465	0.10300	0.00113	0.78831	0.25725
Kab Pekalongan	0.07676	0.01234	0.15740	0.05388	0.10018	0.00399	0.82168	0.27060
Kab Pemalang	0.06385	0.01741	0.10799	0.03192	0.11099	0.00607	0.77657	0.24990

Kab Tegal	0.05716	0.02276	0.08352	0.02294	0.12143	0.00620	0.78953	0.25141
Kab Brebes	0.05338	0.02232	0.10760	0.03132	0.10688	0.00545	0.78601	0.25572
Kota Magelang	0.01563	0.00408	0.03429	0.01177	0.13847	0.00341	0.81309	0.25842
Kota Surakarta	2.28950	0.14893	3.13607	1.09754	0.23307	0.08743	0.52875	0.15984
Kota Salatiga	0.01543	0.00517	0.02476	0.00783	0.12648	0.00253	0.73303	0.23204
Kota Semarang	9.84423	0.36327	14.92304	5.20759	0.62868	0.13322	1.90190	0.73154
Kota Pekalongan	0.00373	0.00102	0.01552	0.00578	0.09581	0.00021	0.77175	0.25365
Kota Tegal	0.27228	0.00705	0.44563	0.16029	0.22609	0.04699	0.69215	0.19164

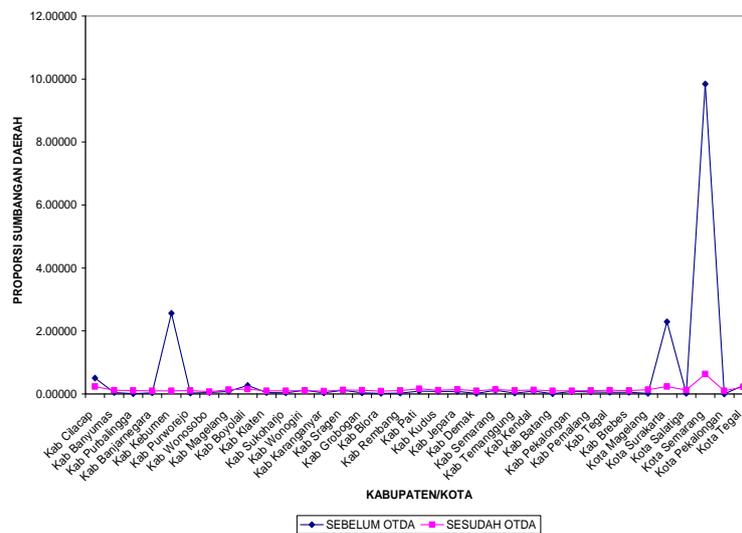
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa secara umum nilai rata-rata dari proporsi sumbangan daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah antara 0,00373 sampai 9,84423 dengan nilai rata-rata 0,31596 dan standar deviasi 1,22318. Perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata diperoleh skor 387,13%, yang berarti variansi antara skor minimum dengan skor maksimum sangat besar.

Sebelum otonomi daerah, nilai rata-rata dari proporsi sumbangan daerah di masing-masing Kabupaten/Kota memiliki variasi yang tidak terlalu besar. Kota Semarang memiliki nilai rata-rata proporsi sumbangan daerah yang paling tinggi, yaitu 9,84423, sedangkan Kota Pekalongan memiliki nilai rata-rata proporsi sumbangan daerah yang paling rendah, yaitu 0,00373. Sesudah otonomi daerah, nilai-rata dari proporsi sumbangan daerah di masing-masing Kabupaten/Kota mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah. Sesudah otonomi daerah Kota Semarang memiliki proporsi sumbangan daerah yang paling tinggi, yaitu 0,62868. Sedangkan Kabupaten Wonosobo memiliki proporsi sumbangan daerah yang kecil, yaitu 0,07652. Sejak otonomi daerah terjadi penurunan proporsi sumbangan daerah, berupa penurunan penerimaan DAK dan DAU sebagai sumber pembiayaan pembangunan di daerah. Hal tersebut mendorong pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah supaya nantinya dapat mandiri secara keuangan. Pemerintah daerah meningkatkan potensi lokal untuk menggenjot peningkatan PAD yang digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Gambaran dari proporsi sumbangan daerah di Kabupaten/Kota

Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah dapat dilihat dengan lebih jelas pada Gambar 4.9

Gambar 4.9
Proporsi Sumbangan Daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

4.2.9 Indeks *Growth*

Indeks *growth* merupakan salah satu indikator dari IKK. Semakin tinggi nilai indeks *growth* berarti terjadi peningkatan PAD, sehingga daerah memiliki kemungkinan yang tinggi untuk bisa mandiri secara keuangan. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks *growth* berarti terjadi penurunan PAD, sehingga daerah memiliki kemungkinan yang rendah untuk bisa mandiri secara keuangan.

Hasil indeks *growth* di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Indeks *Growth* Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008

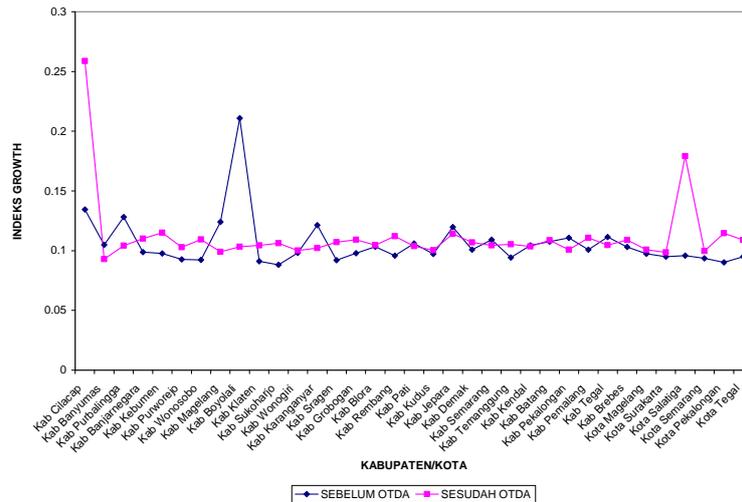
KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.13454	0.06378	0.24530	0.06948	0.25864	0.00000	1.00000	0.37058
Kab Banyumas	0.10478	0.08138	0.12845	0.02194	0.09294	0.04153	0.15765	0.03077
Kab Purbalingga	0.12813	0.06151	0.24480	0.07035	0.10424	0.04166	0.19542	0.04397
Kab Banjarnegara	0.09882	0.08205	0.10686	0.01031	0.11001	0.06555	0.21898	0.04707
Kab Kebumen	0.09760	0.05771	0.13062	0.02783	0.11506	0.06199	0.29903	0.07305
Kab Purworejo	0.09266	0.07711	0.10721	0.01365	0.10287	0.07039	0.15918	0.02650
Kab Wonosobo	0.09226	0.07495	0.11519	0.01578	0.10935	0.07307	0.26397	0.06023
Kab Magelang	0.12405	0.03140	0.29182	0.09853	0.09894	0.05960	0.14767	0.02667
Kab Boyolali	0.21084	0.00841	0.76553	0.31252	0.10333	0.06711	0.16067	0.03196
Kab Klaten	0.09105	0.06893	0.11598	0.01756	0.10449	0.06342	0.15037	0.02920
Kab Sukoharjo	0.08823	0.07737	0.10258	0.01061	0.10633	0.05765	0.15512	0.03102
Kab Wonogiri	0.09801	0.07838	0.11917	0.01843	0.10023	0.06971	0.16449	0.02754
Kab Karanganyar	0.12127	0.02883	0.24462	0.07807	0.10222	0.07186	0.15105	0.02189
Kab Sragen	0.09200	0.06463	0.11200	0.02299	0.10708	0.07903	0.17383	0.03437
Kab Grobogan	0.09785	0.07452	0.13885	0.02460	0.10907	0.03540	0.18485	0.04867
Kab Blora	0.10331	0.06802	0.12522	0.02149	0.10458	0.06335	0.19771	0.04114
Kab Rembang	0.09593	0.06591	0.11613	0.01933	0.11218	0.05454	0.19448	0.04121
Kab Pati	0.10597	0.04179	0.16275	0.04318	0.10375	0.08114	0.17735	0.03013
Kab Kudus	0.09733	0.06118	0.13538	0.02725	0.10042	0.06983	0.16998	0.03077
Kab Jepara	0.11978	0.04553	0.21200	0.05997	0.11420	0.06225	0.28693	0.06904
Kab Demak	0.10092	0.07101	0.13971	0.02571	0.10696	0.06222	0.17062	0.03714
Kab Semarang	0.10917	0.05258	0.15656	0.04273	0.10436	0.06799	0.16681	0.02889
Kab Temanggung	0.09438	0.07594	0.10347	0.01094	0.10544	0.06378	0.18841	0.03908
Kab Kendal	0.10437	0.06493	0.13632	0.02600	0.10344	0.06699	0.18915	0.03835
Kab Batang	0.10753	0.06446	0.13573	0.02633	0.10871	0.07877	0.21300	0.04336
Kab Pekalongan	0.11069	0.04952	0.18912	0.05345	0.10076	0.06900	0.18810	0.03527
Kab Pemalang	0.10072	0.05227	0.13978	0.03749	0.11085	0.05439	0.20974	0.04740
Kab Tegal	0.11144	0.03556	0.20910	0.06260	0.10475	0.07634	0.19597	0.03702
Kab Brebes	0.10303	0.07364	0.12022	0.01789	0.10900	0.05257	0.18054	0.04221
Kota Magelang	0.09742	0.07874	0.11117	0.01363	0.10092	0.06680	0.16167	0.02907
Kota Surakarta	0.09498	0.05345	0.12351	0.02645	0.09847	0.08336	0.12512	0.01597
Kota Salatiga	0.09591	0.06201	0.12440	0.02281	0.17920	0.00170	0.83352	0.25061
Kota Semarang	0.09354	0.06514	0.11111	0.01810	0.09963	0.07113	0.14713	0.02286
Kota Pekalongan	0.09031	0.07996	0.10679	0.01053	0.11454	0.06553	0.26132	0.06225
Kota Tegal	0.09489	0.08165	0.11371	0.01355	0.10890	0.06429	0.19837	0.04438

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui bahwa secara umum nilai rata-rata dari indeks *growth* di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah antara 0,08823 sampai 0,25864 dengan nilai rata-rata 0,10885 dan standar deviasi 0,02542. Perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata diperoleh skor 23,36%, yang berarti variansi antara skor minimum dengan skor maksimum sangat besar.

Sebelum otonomi daerah, nilai rata-rata dari indeks *growth* di masing-masing Kabupaten/Kota memiliki variasi yang tidak terlalu besar. Kabupaten Boyolali memiliki nilai rata-rata indeks *growth* yang paling tinggi, yaitu 0,21084, sedangkan Kabupaten Sukoharjo memiliki nilai rata-rata indeks *growth* yang paling rendah, yaitu 0,08823. Sesudah otonomi daerah, nilai-rata dari indeks *growth* di masing-masing Kabupaten/Kota mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah. Sesudah otonomi daerah Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan indeks *growth* yang paling tinggi, yaitu 0,25864. Sedangkan Kabupaten Banyumas memiliki indeks *growth* yang rendah, yaitu 0,09294. Sejak otonomi daerah terjadi peningkatan indeks *growth* yang berarti terjadi pertumbuhan PAD. Pertumbuhan PAD yang meningkat ini mempengaruhi kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Gambaran dari indeks *growth* di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah dapat dilihat dengan lebih jelas pada Gambar 4.10

Gambar 4.10
Indeks *Growth* di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

4.2.11 Indeks Elastisitas

Indeks elastisitas merupakan salah satu indikator dari IKK. Semakin tinggi nilai indeks elastisitas berarti semakin rendah kontribusi PAD dalam membiayai belanja pembangunan, sehingga daerah dianggap memiliki kemungkinan yang rendah untuk mandiri secara keuangan. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks elastisitas berarti semakin tinggi kontribusi PAD dalam membiayai belanja pembangunan, sehingga daerah dianggap memiliki kemungkinan yang tinggi untuk mandiri secara keuangan.

Hasil indeks elastisitas di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Indeks Elastisitas Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008

Kota/Kab	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.17336	0.04969	0.24694	0.07771	0.16323	0.03642	0.38863	0.13210

Kab Banyumas	0.10123	0.05349	0.15281	0.03560	0.26809	0.05675	0.59764	0.19959
Kab Purbalingga	0.11031	0.04656	0.21257	0.07113	0.28958	0.08536	0.50923	0.13943
Kab Banjarnegara	0.18101	0.16001	0.22478	0.02612	0.33565	0.11427	0.58824	0.17739
Kab Kebumen	0.11303	0.00629	0.17552	0.06471	0.33068	0.03653	0.71687	0.24387
Kab Purworejo	0.10255	0.08203	0.13475	0.02027	0.49426	0.05651	0.79568	0.27167
Kab Wonosobo	0.13063	0.10093	0.18094	0.03615	0.35054	0.05366	0.80065	0.26445
Kab Magelang	0.11495	0.03847	0.16522	0.04968	0.14729	0.04161	0.28769	0.08911
Kab Boyolali	0.06632	0.01443	0.13242	0.05374	0.32450	0.08161	0.61124	0.21675
Kab Klaten	0.13186	0.10239	0.15997	0.02352	0.41865	0.14476	0.82695	0.30176
Kab Sukoharjo	0.11886	0.10787	0.13207	0.00939	0.33340	0.09501	0.80212	0.21527
Kab Wonogiri	0.11643	0.09563	0.13804	0.01847	0.42415	0.12057	0.81128	0.28522
Kab Karanganyar	0.09975	0.03372	0.14621	0.04559	0.38746	0.07858	0.76170	0.26252
Kab Sragen	0.11225	0.08327	0.14367	0.02295	0.24644	0.08504	0.55189	0.17431
Kab Grobogan	0.14878	0.10617	0.19707	0.03665	0.28073	0.07415	0.85201	0.24771
Kab Blora	0.15567	0.10961	0.18601	0.03150	0.40109	0.13696	0.62594	0.17443
Kab Rembang	0.13779	0.11703	0.17688	0.02417	0.22476	0.11267	0.37619	0.09218
Kab Pati	0.12671	0.06663	0.18139	0.05144	0.15947	0.09101	0.29013	0.06629
Kab Kudus	0.07329	0.04212	0.10620	0.02608	0.13535	0.05180	0.38490	0.10015
Kab Jepara	0.10848	0.05900	0.16540	0.04086	0.23812	0.11279	0.40298	0.10580
Kab Demak	0.18212	0.11620	0.22205	0.04295	0.40267	0.03780	0.95597	0.37168
Kab Semarang	0.08611	0.06124	0.13572	0.03082	0.20551	0.10758	0.42183	0.10782
Kab Temanggung	0.13264	0.08853	0.17019	0.03048	0.23876	0.08723	0.39015	0.11081
Kab Kendal	0.12491	0.07635	0.17147	0.03701	0.37036	0.10919	0.64702	0.15949
Kab Batang	0.17405	0.10502	0.26149	0.05643	0.33528	0.14359	0.52102	0.14936
Kab Pekalongan	0.13410	0.07257	0.19173	0.04571	0.29688	0.06558	0.51825	0.17005
Kab Pemalang	0.15924	0.10106	0.23402	0.05317	0.39213	0.11000	1.00000	0.29894
Kab Tegal	0.11924	0.05860	0.16643	0.04033	0.30742	0.05675	0.54133	0.16409
Kab Brebes	0.17491	0.11543	0.23340	0.04596	0.43609	0.11250	0.99522	0.30013
Kota Magelang	0.04351	0.02510	0.05365	0.01093	0.16594	0.03430	0.31428	0.09620
Kota Surakarta	0.04800	0.02053	0.07411	0.02005	0.18667	0.06492	0.35712	0.09926
Kota Salatiga	0.05622	0.02654	0.07243	0.02005	0.16443	0.00000	0.33908	0.11455
Kota Semarang	0.04646	0.02773	0.05669	0.01290	0.12034	0.02112	0.23051	0.06158
Kota Pekalongan	0.12723	0.05949	0.18117	0.04352	0.25468	0.05627	0.48647	0.15552
Kota Tegal	0.06026	0.03568	0.08680	0.02089	0.14748	0.07449	0.23260	0.05154

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

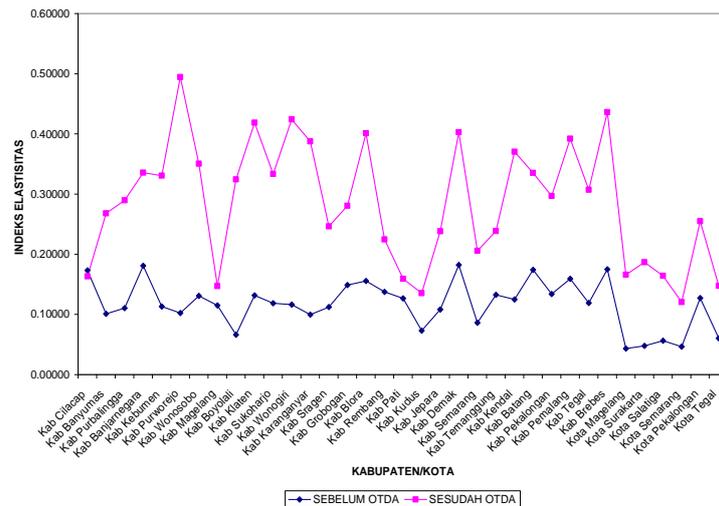
Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa secara umum nilai rata-rata dari indeks elastisitas di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah antara 0,04351 sampai 0,49426 dengan nilai rata-rata 0,20100 dan standar deviasi 0,11402. Perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata diperoleh skor 56,73%, yang berarti variansi antara skor minimum dengan skor maksimum sangat besar.

Sebelum otonomi daerah, nilai rata-rata dari indeks elastisitas di masing-masing Kabupaten/Kota memiliki variasi yang tidak terlalu besar. Kabupaten Demak memiliki nilai rata-rata indeks elastisitas yang paling tinggi, yaitu 0,18212, sedangkan Kota Magelang memiliki nilai rata-rata indeks elastisitas yang paling rendah, yaitu 0,04351. Sesudah otonomi daerah, nilai-rata dari indeks elastisitas di masing-masing

Kabupaten/Kota mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah. Sesudah otonomi daerah Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan indeks elastisitas yang paling tinggi, yaitu 0,49426. Sedangkan Kota Semarang memiliki indeks elastisitas yang paling rendah, yaitu 0,12034. Secara umum adanya peningkatan indeks elastisitas sesudah otonomi daerah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penggunaan PAD dalam membiayai belanja pembangunan. Sejak otonomi daerah, pemerintah daerah lebih berani untuk membelanjakan PAD untuk membiayai pembangunan fasilitas publik yang diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga nantinya penerimaan PAD semakin meningkat pula.

Gambaran dari indeks elastisitas di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah dapat dilihat dengan lebih jelas pada Gambar 4.11

Gambar 4.11
Indeks Elastisitas di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

4.2.12 Indeks *Share*

Indeks *share* merupakan salah satu indikator dari IKK. Semakin tinggi nilai indeks *share* berarti semakin rendah kontribusi PAD dalam APBD, sehingga kemungkinan daerah mandiri secara keuangan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks *share* berarti semakin tinggi kontribusi PAD dalam APBD, sehingga kemungkinan daerah mandiri secara keuangan semakin tinggi.

Hasil indeks *share* di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Indeks *Share* Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD

Kab Cilacap	0.18382	0.11398	0.38329	0.11528	0.15535	0.03479	0.55751	0.17877
Kab Banyumas	0.04298	0.03069	0.05417	0.00860	0.03963	0.01853	0.05861	0.01214
Kab Purbalingga	0.02572	0.01096	0.04998	0.01479	0.02984	0.00486	0.05650	0.01706
Kab Banjarnegara	0.03312	0.00957	0.05990	0.01814	0.02876	0.00424	0.04574	0.01369
Kab Kebumen	0.05020	0.01731	0.06754	0.02053	0.02553	0.00715	0.03949	0.01223
Kab Purworejo	0.03180	0.02169	0.04575	0.01033	0.02719	0.01098	0.04308	0.01011
Kab Wonosobo	0.02328	0.00827	0.04110	0.01206	0.02661	0.00950	0.03842	0.01085
Kab Magelang	0.07147	0.02262	0.17250	0.05874	0.04499	0.02205	0.05971	0.01335
Kab Boyolali	0.19044	0.01862	0.61479	0.25250	0.03681	0.01476	0.07256	0.01641
Kab Klaten	0.04051	0.01601	0.06443	0.01713	0.01998	0.00698	0.02703	0.00717
Kab Sukoharjo	0.02744	0.00878	0.05057	0.01503	0.02122	0.00507	0.04033	0.01115
Kab Wonogiri	0.06159	0.03284	0.08309	0.02207	0.02921	0.01560	0.04048	0.00760
Kab Karanganyar	0.04586	0.01700	0.11084	0.03713	0.02647	0.01494	0.03801	0.00893
Kab Sragen	0.05552	0.01684	0.08544	0.02634	0.04308	0.01440	0.06055	0.01802
Kab Grobogan	0.03469	0.01685	0.05041	0.01430	0.03287	0.01044	0.04961	0.01388
Kab Blora	0.02262	0.01195	0.03421	0.00877	0.02583	0.00956	0.04123	0.01028
Kab Rembang	0.02757	0.00570	0.04522	0.01476	0.02550	0.00463	0.04764	0.01550
Kab Pati	0.06960	0.03488	0.10709	0.03257	0.05258	0.02637	0.06992	0.01519
Kab Kudus	0.04298	0.02224	0.06812	0.01841	0.03819	0.01293	0.06693	0.01723
Kab Jepara	0.05853	0.03037	0.09628	0.02418	0.05301	0.01846	0.07780	0.02197
Kab Demak	0.02161	0.00950	0.03276	0.00842	0.01943	0.00441	0.03099	0.00868
Kab Semarang	0.08161	0.03429	0.12210	0.03383	0.05387	0.02356	0.07248	0.01495
Kab Temanggung	0.02457	0.01181	0.03645	0.00949	0.02291	0.00503	0.03865	0.01088
Kab Kendal	0.06042	0.03079	0.07718	0.01994	0.04759	0.02701	0.07647	0.01673
Kab Batang	0.01869	0.00531	0.02276	0.00750	0.02677	0.00411	0.04270	0.01281
Kab Pekalongan	0.03813	0.01219	0.06159	0.02188	0.03209	0.01192	0.04768	0.01204
Kab Pemalang	0.04515	0.01632	0.06329	0.01830	0.03182	0.01285	0.04490	0.01327
Kab Tegal	0.04904	0.02025	0.08172	0.02199	0.03675	0.01234	0.05296	0.01439
Kab Brebes	0.03938	0.01998	0.05891	0.01398	0.02773	0.01048	0.05347	0.01315
Kota Magelang	0.02647	0.01075	0.04073	0.01079	0.03834	0.00628	0.07882	0.02695
Kota Surakarta	0.33609	0.05419	0.47075	0.16331	0.09396	0.05849	0.15456	0.03235
Kota Salatiga	0.02456	0.01780	0.03075	0.00596	0.04338	0.00808	0.07663	0.02336
Kota Semarang	0.78319	0.09993	1.00000	0.38661	0.19374	0.09719	0.41664	0.13163
Kota Pekalongan	0.00743	0.00410	0.01802	0.00597	0.02568	0.00000	0.04463	0.01783
Kota Tegal	0.08516	0.00830	0.12678	0.04695	0.08396	0.03853	0.10415	0.01890

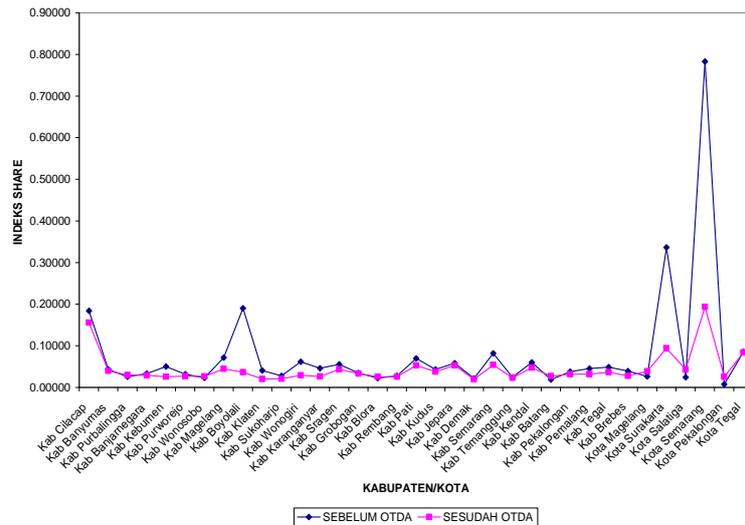
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa secara umum nilai rata-rata dari indeks *share* di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah antara 0,00743 sampai 0,78319 dengan nilai rata-rata 0,06202 dan standar deviasi 0.10119. Perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata diperoleh skor 163,15%, yang berarti variansi antara skor minimum dengan skor maksimum sangat besar.

Sebelum otonomi daerah, nilai rata-rata dari indeks *share* di masing-masing Kabupaten/Kota memiliki variasi yang tidak terlalu besar. Kota Semarang memiliki nilai rata-rata indeks *share* yang paling tinggi, yaitu 0,78319, sedangkan Kota Pekalongan memiliki nilai rata-rata indeks *share* yang paling rendah, yaitu 0,00743. Sesudah otonomi daerah, nilai-rata dari indeks *share* di masing-masing Kabupaten/Kota mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah. Sesudah otonomi daerah Kota Semarang mengalami peningkatan indeks *share* yang paling tinggi, yaitu 0,19374. Sedangkan Kabupaten Demak memiliki indeks *share* yang paling kecil, yaitu 0,01943. Secara umum adanya peningkatan indeks *share* sesudah otonomi daerah menunjukkan bahwa sejak otonomi daerah pemerintah daerah lebih mengandalkan penerimaan PAD sebagai sumber pembiayaan APBD.

Gambaran dari indeks *share* di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah dapat dilihat dengan lebih jelas pada Gambar 4.12

Gambar 4.12
Indeks *Share* di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

4.2.12 Indeks Kemampuan Keuangan

Indeks kemampuan keuangan menunjukkan tingkat kemandirian daerah secara keuangan. Semakin tinggi nilai indeks kemampuan keuangan berarti semakin tinggi indeks *growth*, semakin rendah indeks elastisitas, dan semakin tinggi indeks *share*. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks kemampuan keuangan berarti semakin rendah indeks *growth*, semakin tinggi indeks elastisitas, dan semakin rendah indeks *share*.

Hasil IKK di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Indeks Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008

Kota/Kab	SEBELUM OTDA		SESUDAH OTDA	
	IKK	KET	IKK	KET
Kab Cilacap	0.16391	RENDAH	0.10277	RENDAH
Kab Banyumas	0.08300	RENDAH	0.22252	SEDANG

Kab Purbalingga	0.08806	RENDAH	0.10727	RENDAH
Kab Banjarnegara	0.10432	RENDAH	0.09745	RENDAH
Kab Kebumen	0.08694	RENDAH	0.10811	RENDAH
Kab Purworejo	0.07567	RENDAH	0.21346	SEDANG
Kab Wonosobo	0.08206	RENDAH	0.12902	RENDAH
Kab Magelang	0.10349	RENDAH	0.12577	RENDAH
Kab Boyolali	0.15586	RENDAH	0.15397	RENDAH
Kab Klaten	0.08781	RENDAH	0.10526	RENDAH
Kab Sukoharjo	0.07818	RENDAH	0.14515	RENDAH
Kab Wonogiri	0.09201	RENDAH	0.09625	RENDAH
Kab Karanganyar	0.08896	RENDAH	0.10929	RENDAH
Kab Sragen	0.08659	RENDAH	0.09898	RENDAH
Kab Grobogan	0.09377	RENDAH	0.17661	RENDAH
Kab Blora	0.09387	RENDAH	0.11398	RENDAH
Kab Rembang	0.08709	RENDAH	0.10502	RENDAH
Kab Pati	0.10076	RENDAH	0.12902	RENDAH
Kab Kudus	0.07120	RENDAH	0.10066	RENDAH
Kab Jepara	0.09560	RENDAH	0.13087	RENDAH
Kab Demak	0.10155	RENDAH	0.11267	RENDAH
Kab Semarang	0.09229	RENDAH	0.09535	RENDAH
Kab Temanggung	0.08386	RENDAH	0.10782	RENDAH
Kab Kendal	0.09656	RENDAH	0.13662	RENDAH
Kab Batang	0.10009	RENDAH	0.17804	RENDAH
Kab Pekalongan	0.09431	RENDAH	0.09351	RENDAH
Kab Pemalang	0.10170	RENDAH	0.09634	RENDAH
Kab Tegal	0.09324	RENDAH	0.10105	RENDAH
Kab Brebes	0.10577	RENDAH	0.11297	RENDAH
Kota Magelang	0.05580	RENDAH	0.08648	RENDAH
Kota Surakarta	0.15969	RENDAH	0.09171	RENDAH
Kota Salatiga	0.05890	RENDAH	0.12078	RENDAH
Kota Semarang	0.30773	RENDAH	0.11259	RENDAH
Kota Pekalongan	0.07499	RENDAH	0.13413	RENDAH
Kota Tegal	0.08010	RENDAH	0.11798	RENDAH

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Keterangan:

Rata-rata : 0,13059

Minimum : 0,02951

Maksimum : 0,53131

Klasifikasi Skor IKK (Adi Priyo Hari, 2006: 5):

Rendah : 0,02951 – 0,19678

Sedang : 0,19679 – 0,36404

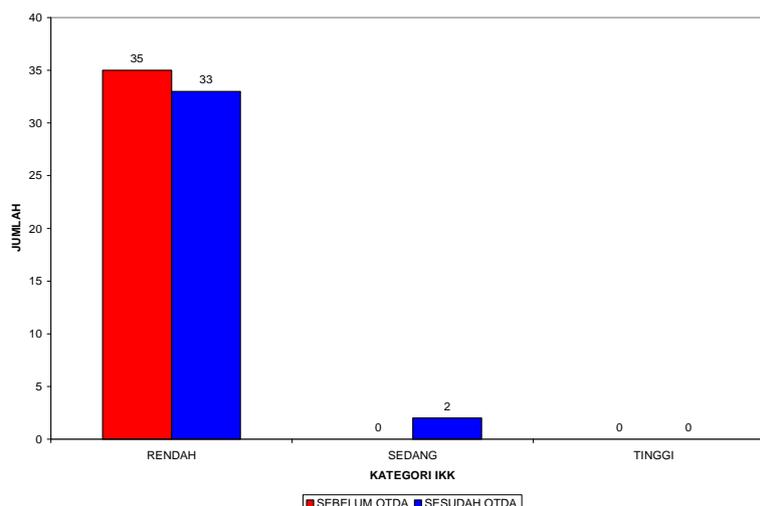
Tinggi : 0,36405 – 0,53131

Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa secara umum nilai rata-rata dari IKK di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah antara 0,02951 sampai 0,53131 dengan nilai rata-rata 0,13059 dan standar deviasi 0,06951. Perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata diperoleh skor 53,22%, yang berarti variansi antara skor minimum dengan skor maksimum sangat besar.

Sebelum otonomi daerah, masing-masing daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah memiliki nilai IKK yang tergolong rendah, yang berarti tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah masih kecil. Pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerahnya masih sangat menggantungkan diri dari bantuan pusat. Era otonomi daerah membawa perubahan pada kemampuan keuangan pemerintah daerah. Sejak otonomi daerah, beberapa pemerintah daerah mulai mengoptimalkan sumber daya daerah sehingga mendorong peningkatan PADnya dan hal tersebut mempengaruhi kemampuan keuangan daerah. Sejak otonomi daerah, dua daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah memiliki kenaikan level IKK menjadi sedang, yaitu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purworejo.

Gambaran dari IKK di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah otonomi daerah dapat dilihat dengan lebih jelas pada Gambar 4.13

Gambar 4.14
Jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Berdasarkan IKK
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2008



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka hasil analisis deskriptif dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 4.14
Rangkuman Hasil Analisis Deskriptif

Indikator	Rata-rata	SD	Sebelum Otonomi		Sesudah Otonomi	
			Kota/Kabupaten Tinggi	Kota/Kabupaten Rendah	Kota/Kabupaten Tinggi	Kota/Kabupaten Rendah
Kontribusi Pajak dan Retribusi	0,71475	0,20574	Kab Pekalongan	Kota Magelang	Kab Boyolali	Kab Pekalongan
Rasio Pajak	0,01769	0,03125	Kab Kudus	Kab Cilacap	Kab Purworejo	Kab Kudus
Rasio Retribusi	0,00949	0,01957	Kota Semarang	Kab Boyolali	Kab Kebumen	Kab Kudus
Proporsi PAD	0,12452	0,18846	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Semarang	Kab Demak
Proporsi BHPBP	0,02633	0,11010	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Semarang	Kab Sukoharjo
Proporsi Sumbangan Daerah	0,31596	1,22318	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Semarang	Kab Wonosobo
Indeks <i>Growth</i>	0,10885	0,02542	Kab Boyolali	Kab Sukoharjo	Kab Cilacap	Kab Banyumas
Indeks Elastisitas	0,20100	0,11402	Kab Demak	Kota Magelang	Kab Purworejo	Kota Semarang
Indeks <i>Share</i>	0,06202	0,10119	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Semarang	Kab Demak

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

4.3 Hasil Uji beda *Mann-Whitney U*

Hasil uji beda *Mann-Whitney U* bertujuan untuk mengetahui pengaruh otonomi daerah terhadap kemampuan keuangan dan pendapatan daerah. Hasil uji beda *Mann-Whitney U* sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Beda *Mann-Whitney U*

Test Statistics ^a				
	Mann-Whitney U	Wilcoxon W	Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
P	7882.000	30037.000	-14.795	.000
RASIO PAD	31628.500	53783.500	-.849	.396
RASIO PAJAK	1879.500	24034.500	-18.322	.000
RASIO RESTRIBUSI	1879.500	24034.500	-18.322	.000
e	25919.000	48074.000	-2.244	.025
INDEKS GROWTH	25756.000	47911.000	-2.349	.019
INDEKS ELASTISITAS	11174.500	33329.500	-11.750	.000
INDEKS SHARE	29398.500	68738.500	-.001	.999
IKK	10446.000	32601.000	-12.220	.000

a. Grouping Variable: OTDA-NON OTDA

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa:

1. Kontribusi Pajak dan Retribusi

Nilai U hitung = 7882 ($p < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak atau H_a diterima, yaitu ada perbedaan kontribusi pajak dan retribusi yang signifikan antara sebelum otonomi daerah dengan sesudah otonomi daerah. Nilai *mean rank* kontribusi pajak dan retribusi sesudah otonomi daerah (342,98) lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah (143,03). Adanya peningkatan kontribusi pajak dan retribusi sesudah otonomi daerah, antara lain disebabkan daerah sangat agresif dalam mengeluarkan peraturan daerah yang berkaitan dengan PAD, khususnya retribusi dan pajak daerah (Lewis, 2003).

2. Rasio PAD

Nilai U hitung = 7882 ($p > 0,05$), yang berarti H_0 diterima atau H_a ditolak, yaitu tidak ada perbedaan rasio PAD antara sebelum otonomi daerah dengan sesudah otonomi daerah, meskipun nilai *mean rank* rasio PAD sesudah otonomi daerah (267,59) lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah (256,11). Peningkatan PAD tidak secara otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan

peningkatan PAD belum tentu dapat digunakan untuk membiayai seluruh biaya pembangunan. Hasil penelitian Makhfatih (2000) menemukan bahwa pemerintah daerah masih mengandalkan dana dari pusat meskipun mengalami peningkatan PAD.

3. Rasio Pajak

Nilai U hitung = 1879,5 ($p < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak atau H_a diterima, yaitu ada perbedaan Rasio Pajak yang signifikan antara sebelum otonomi daerah dengan sesudah otonomi daerah. Nilai *mean rank* rasio pajak sesudah otonomi daerah (362,03) lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah (114,45). Peningkatan penerimaan pajak akan mendukung pertumbuhan ekonomi.

4. Rasio Retribusi

Nilai U hitung = 1879,5 ($p < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak atau H_a diterima, yaitu ada perbedaan Rasio Retribusi yang signifikan antara sebelum otonomi daerah dengan sesudah otonomi daerah. Nilai *mean rank* rasio retribusi sesudah otonomi daerah (362,03) lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah (114,45). Peningkatan penerimaan retribusi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Marina (2006) menemukan bahwa retribusi memberikan kontribusi bagi PAD sehingga pemerintah lebih leluasa dalam membangun infrastruktur yang merangsang pertumbuhan ekonomi.

5. Elastisitas Pajak dan Retribusi

Nilai U hitung = 25919 ($p < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak atau H_a diterima, yaitu ada perbedaan elastisitas yang signifikan antara sebelum otonomi daerah dengan sesudah otonomi daerah. Nilai *mean rank* elastisitas pajak dan retribusi sesudah otonomi daerah (257,93) lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah (228,92).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pajak dan retribusi sejak otonomi daerah akan mendukung pertumbuhan ekonomi.

6. Indeks *Growth*

Nilai U hitung = 25756 ($p < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak atau H_a diterima, yaitu ada perbedaan indeks *growth* yang signifikan antara sebelum otonomi daerah dengan sesudah otonomi daerah. Nilai *mean rank* indeks *growth* sesudah otonomi daerah (258,51) lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah (228,15). Hasil ini menunjukkan bahwa sejak otonomi daerah, daerah mengalami peningkatan PAD dibandingkan sebelum otonomi daerah. Peningkatan PAD ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi, serta kekayaan daerah yang lain.

7. Indeks Elastisitas

Nilai U hitung = 11174,5 ($p < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak atau H_a diterima, yaitu ada perbedaan indeks elastisitas yang signifikan antara sebelum otonomi daerah dengan sesudah otonomi daerah. Nilai *mean rank* indeks elastisitas sesudah otonomi daerah (310,59) lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah (158,71). Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD sejak otonomi daerah mendukung belanja modal, karena biaya dalam belanja modal daerah salah satunya bersumber dari PAD.

8. Indeks *Share*

Nilai U hitung = 29398,5 ($p > 0,05$), yang berarti H_0 diterima atau H_a ditolak, yaitu tidak ada perbedaan indeks *share* antara sebelum otonomi daerah dengan sesudah otonomi daerah, meskipun nilai *mean rank* indeks *share* sesudah otonomi

daerah (245,49) lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah (245,51). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD sejak otonomi daerah tidak secara otomatis meningkatkan kontribusinya dalam APBD. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Mardiasmo (2000) bahwa indikator keberhasilan otonomi tidak semata-mata ditunjukkan peningkatan PAD.

9. IKK

Nilai U hitung = 10446 ($p < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak atau H_a diterima, yaitu ada perbedaan IKK yang signifikan antara sebelum otonomi daerah dengan sesudah otonomi daerah. Nilai *mean rank* IKK sesudah otonomi daerah (313,19) lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah (155,24). Hasil ini menunjukkan bahwa sejak otonomi daerah, kemampuan kemandirian daerah mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan peningkatan PAD dan kontribusi PAD terhadap belanja modal.

Tabel 4.16
Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Indikator	U	p	Rata-rata		Keterangan
				Sebelum Otonomi	Sesudah Otonomi	
Penerimaan Daerah	Kontribusi Pajak & Retribusi	7882	0,000	143,03	342,98	Ha diterima
	Rasio PAD	31628,5	0,396	256,11	267,59	Ha ditolak
	Rasio Pajak	1879,5	0,000	114,45	362,03	Ha diterima
	Rasio Retribusi	1879,5	0,000	114,45	362,03	Ha diterima
Kemampuan Keuangan Daerah	Elastisitas Pajak & Retribusi	25919	0,025	228,92	257,93	Ha diterima
	Indeks Growth	25756	0,019	228,15	258,51	Ha diterima
	Indeks Elastisitas	11174,5	0,000	158,71	310,59	Ha diterima
	Indeks Share	29398,5	0,999	245,51	245,49	Ha ditolak
	IKK	10446	0,000	155,24	313,19	Ha diterima

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa secara umum, ada perbedaan penerimaan daerah yang signifikan antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah, kecuali dalam hal rasio PAD. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setelah otonomi daerah, pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi. Meski demikian, peningkatan

penerimaan PAD tidak secara otomatis meningkatkan kontribusi PAD dalam APBD, karena (1) Pemerintah daerah masih kurang realistis dalam menyusun APBD, sehingga penerimaan PAD yang tinggi masih belum bisa mencukupi biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan, dan (2) pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah cenderung mengandalkan pajak dan retribusi, padahal jenis-jenis pajak dan retribusi daerah sudah ditetapkan secara limitatif, sehingga menyulitkan daerah untuk berkreasi dalam menggali sumber keuangan sendiri (Arifin, 2000).

Berdasarkan Tabel 4.16 juga diketahui bahwa secara umum ada perbedaan kemampuan keuangan daerah yang signifikan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah, kecuali dalam hal indeks *share*. Hasil tersebut menunjukkan pemerintah daerah pada era otonomi daerah mampu meningkatkan penerimaan PAD dan hal tersebut mempengaruhi sensitivitas dalam belanja modal. Meski demikian, meningkatnya penerimaan PAD belum memberikan kontribusi yang besar dalam APBD. Dengan demikian, keberhasilan otonomi daerah adalah bukan semata-mata pada usaha peningkatan PAD, akan tetapi pada bagaimana pemerintah daerah dapat memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk menggunakan dana yang berasal dari dalam (PAD) maupun dana yang berasal dari luar (misalnya dana perimbangan) (Mardismo, 2000).

4.4 Kemampuan Keuangan Daerah

Kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keuangan. Tingkat kemampuan keuangan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari posisi yang ada di kuadran.

Posisi Kuadran dari Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Posisi Kuadran Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah 1994-2008

Kota/Kab	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	XG	XS	KUADRAN	IKK	XG	XS	KUADRAN	IKK
Kab Cilacap	RENDAH	TINGGI	III	RENDAH	TINGGI	TINGGI	I	RENDAH
Kab Banyumas	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	SEDANG
Kab Purbalingga	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Banjarnegara	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Kebumen	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Purworejo	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	SEDANG
Kab Wonosobo	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Magelang	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Boyolali	TINGGI	TINGGI	I	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Klaten	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Sukoharjo	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Wonogiri	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Karanganyar	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Sragen	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Grobogan	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Blora	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Rembang	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Pati	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Kudus	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Jepara	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Demak	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Semarang	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Temanggung	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Kendal	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Batang	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Pekalongan	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Pemalang	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Tegal	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kab Brebes	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kota Magelang	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kota Surakarta	RENDAH	TINGGI	III	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kota Salatiga	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	TINGGI	RENDAH	II	RENDAH
Kota Semarang	RENDAH	TINGGI	III	RENDAH	RENDAH	TINGGI	III	RENDAH
Kota Pekalongan	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH
Kota Tegal	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH	RENDAH	RENDAH	IV	RENDAH

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010

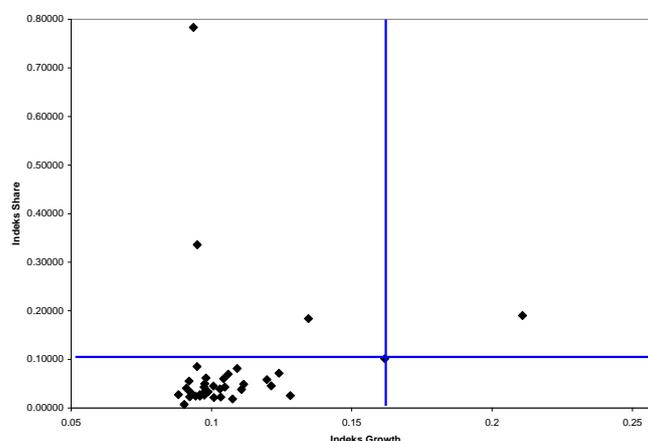
Berdasarkan Tabel 4.17 diketahui bahwa sebelum otonomi daerah peta kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:

1. Daerah yang berada di KUADRAN I adalah Kabupaten Boyolali. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali memiliki kemampuan keuangan daerah yang ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal.
2. Tidak ada satu pun daerah yang berada di KUADRAN II. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum otonomi daerah, kemampuan keuangan daerah kurang ideal. Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah memiliki pertumbuhan yang rendah, meskipun sebenarnya kabupaten/kota tersebut sudah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal dan PAD-nya memiliki peluang dalam memberikan kontribusi dalam APBD.
3. Tiga daerah berada pada KUADRAN III, yaitu Kabupaten Cilacap, Kota Surakarta, dan Kota Semarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah yang kurang ideal karena PAD memiliki peran yang besar dalam APBD, namun belum didukung dengan pertumbuhan PAD yang besar. Dengan kata lain, sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
4. Tiga puluh satu daerah berada pada KUADRAN IV, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, dan Kota

Tegal. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah yang paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah juga belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Dengan kata lain, sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

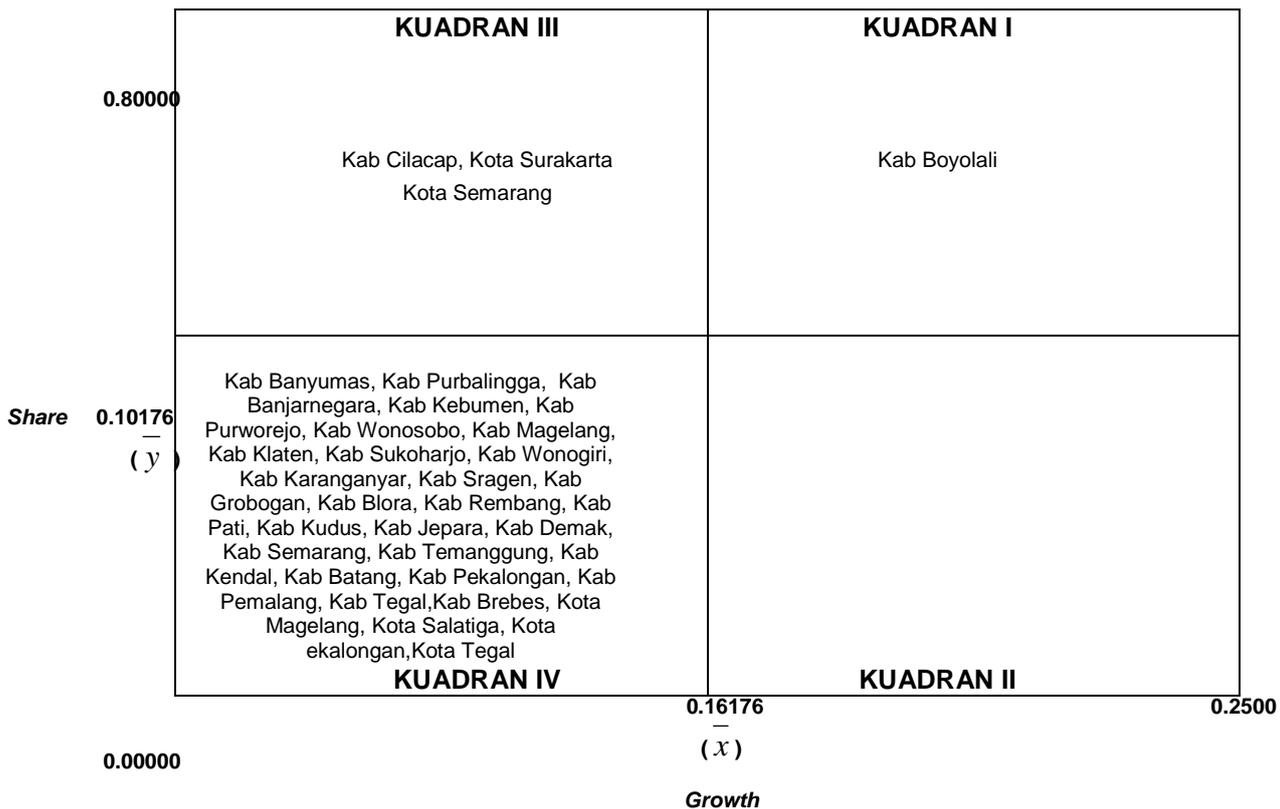
Berdasarkan Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sebelum otonomi daerah diketahui bahwa sebagian besar (88,57%) daerah memiliki kemampuan keuangan yang rendah. Daerah masih mengandalkan dana dari pusat untuk membiayai belanja pembangunan. Peta kemampuan keuangan kabupaten/kota Propinsi Jawa Tengah sebelum otonomi daerah dapat dilihat pada Gambar 4.15a dan 4.15b.

Gambar 4.15a
Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah
Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1994-1999



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Gambar 4.15b
Peta Kemampuan Keuangan di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah
Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1994-1999



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.17 diketahui bahwa sesudah otonomi daerah peta kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:

1. Satu daerah berada pada KUADRAN I, yaitu Kabupaten Cilacap. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah yang ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Dengan kata lain, Kabupaten Cilacap sesudah otonomi daerah mampu menggali potensi daerah dan merealisasikannya untuk meningkatkan PAD, sehingga kemampuan keuangannya tinggi. Kabupaten Cilacap mampu mengandalkan PAD untuk membiayai belanja pembangunan, dan secara otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Satu daerah berada pada KUADRAN II, yaitu Kota Salatiga. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Salatiga memiliki kemampuan keuangan daerah yang kurang ideal. Kota Salatiga mempunyai kemampuan mengembangkan potensi

lokal tetapi pengelolaannya masih belum efektif sehingga penerimaan PAD masih jauh dari yang diharapkan. Meski demikian, apabila pemerintah Kota Salatiga dapat mengelola potensi daerah dengan efektif, maka penerimaan PAD akan semakin tinggi dan dapat diandalkan untuk memberikan kontribusi bagi pembiayaan pembangunan daerah.

3. Satu daerah berada pada KUADRAN III, yaitu Kota Semarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki kemampuan keuangan daerah yang kurang ideal. Pemerintah Kota Semarang sangat mengandalkan penerimaan PAD untuk membiayai belanja pembangunan, tetapi dalam kenyataannya pertumbuhan PAD tidak tinggi. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Semarang masih kurang realistis dalam merencanakan sumber pendapatan yang nantinya digunakan untuk membiayai belanja pembangunan. Pemerintah Kota Semarang memiliki keyakinan yang tinggi untuk mendapatkan PAD yang tinggi melalui pajak dan retribusi, tetapi dalam praktiknya penerimaan pajak dan retribusi masih jauh dari yang direncanakan.
4. Tiga puluh dua daerah berada pada KUADRAN IV, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal. Hal tersebut menunjukkan bahwa ke-32

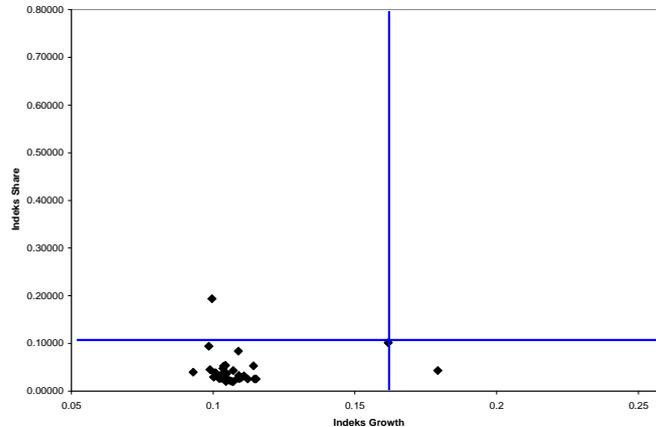
Kabupaten/Kota tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah yang paling buruk. Kemampuan keuangan daerah yang rendah disebabkan Kabupaten/Kota tersebut belum mampu memanfaatkan peluang besar yang ditimbulkan dari otonomi daerah yang ditunjukkan dengan masih terbatasnya kebijakan pemerintah daerah yang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Kabupaten/Kota tersebut juga memiliki sarana/prasaranan yang terbatas sehingga belum mampu mengembangkan potensi lokal. Rendahnya kemampuan mengelola potensi lokal inilah yang membuat pemerintah daerah kurang yakin untuk bisa membiayai belanja pembangunan di daerahnya dengan mengandalkan PAD-nya sendiri. Penerimaan PAD-nya sendiri juga masih rendah sehingga Kabupaten/Kota tersebut sehingga masih mengandalkan bantuan dari pusat untuk melakukan pembangunan di daerahnya.

Berdasarkan Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah sesudah otonomi daerah diketahui bahwa sebagian besar (91,43%) daerah memiliki kemampuan keuangan yang rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setelah otonomi daerah jumlah daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah rendah meningkat, meskipun daerah-daerah tersebut telah mengalami peningkatan penerimaan PAD. Hal tersebut dimungkinkan, daerah belum memiliki keyakinan tinggi bahwa pemerintahannya mampu mengelola potensi daerah secara maksimal sehingga dapat meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak dan retribusi. Adapun pemerintahan-pemerintahan daerah yang memiliki keyakinan tinggi, mereka berusaha memanfaatkan otonomi daerah dengan menetapkan peraturan-peraturan yang mengatur pajak dan retribusi, tetapi hal tersebut kurang efektif karena kebijakan yang

ditetapkan kurang mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Kondisi yang demikian akhirnya membuat realisasi dari penerimaan PAD jauh dari yang diharapkan. Apabila kejadian yang demikian berlangsung terus-menerus maka akan mempengaruhi keyakinan dari pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan kembali untuk mengandalkan bantuan dari pusat untuk membiayai belanja pembangunan.

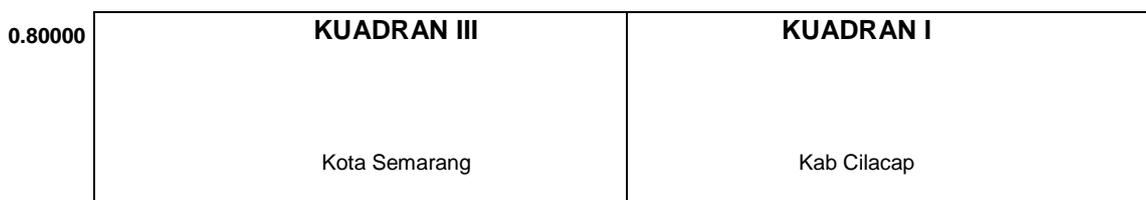
Peta kemampuan keuangan kabupaten/kota Propinsi Jawa Tengah sesudah otonomi daerah dapat dilihat pada Gambar 4.15a dan 4.15b.

Gambar 4.16a
Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah
Sesudah Otonomi Daerah Tahun 2000-2008



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Gambar 4.16b
Peta Kemampuan Keuangan di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah
Sesudah Otonomi Daerah Tahun 2000-2008



Berdasarkan Tabel 4.18 diketahui bahwa terjadi perubahan antara kondisi sebelum dan sesudah otonomi daerah, yakni: pertama, yang terdapat pada Kuadran I, sebelum otonomi daerah adalah Kabupaten Boyolali, tetapi setelah otonomi Kabupaten Boyolali mengalami kemunduruan, bergeser ke Kuadran IV. Sementara Kabupaten Cilacap mengalami perkembangannya, dari Kuadran III menjadi Kuadran I. Kedua, pada Kuadran II (pertumbuhan ekonomi tinggi, share PAD rendah), yang sebelumnya tidak ada di Kabupaten/Kota yang masuk dalam kriteria ini, tetapi sesudah otonomi daerah Kota Salatiga masuk kriteria ini. Artinya Kota Salatiga mengalami perkembangan dari Kuadran IV ke Kuadran II. Ketiga, saat sebelum otonomi daerah yang masuk Kuadran III ada tiga Kabupaten/Kota, namun setelah otonomi daerah hanya tinggal Kota Semarang. Sementara Cilacap mengalami perkembangan, tetapi Kota Surakarta justru mengalami kemunduran. Keempat, setelah otonomi daerah ternyata makin banyak Kabupaten/Kota yang masuk ke Kuadran IV. Dengan demikian, menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah belum siap melaksanakan otonomi daerah dari sisi kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah daerah dalam era otonomi daerah memang mampu meningkatkan penerimaan PAD, akan tetapi penerimaan tersebut masih jauh dari yang diharapkan sehingga belum bisa memberikan kontribusi secara nyata bagi pembiayaan belanja pembangunan. Alasan yang dapat digunakan untuk menerangkan hal ini antara lain, pemerintah daerah dalam hal mendorong pertumbuhan PAD cenderung mengandalkan pajak dan retribusi yang didasarkan oleh peraturan daerah yang ditetapkan (Adi Priyo Hari, 2006). Permasalahannya, peraturan tersebut kurang mempertimbangkan kemampuan masyarakat sehingga terjadi kesenjangan dalam pelaksanaannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Deddy (2010) bahwa untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui pajak dan retribusi tidak hanya mengandalkan peraturan daerah semata, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas

SDM; penyiapan sarana/prasarana dasar dan pendukung; peraturan dan perundangan yang memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi dan netralitas; revitalisasi lembaga-lembaga terkait, termasuk desentralisasi kewenangan perijinan investasi; kebijakan pemberian fasilitas insentif kepada investor yang lebih menarik; dan optimalisasi potensi perekonomian lokal sehingga bermanfaat kepada daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD dan kemampuan keuangan daerah. Daerah dianggap lebih sensitif terhadap kebutuhan dan potensi lokalnya yang mendorong percepatan pembangunan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, ada perbedaan penerimaan daerah yang signifikan antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah, kecuali rasio PAD. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setelah otonomi daerah, pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi. Meski demikian, peningkatan penerimaan PAD tidak secara otomatis meningkatkan kontribusi PAD dalam APBD.

Secara umum ada perbedaan kemampuan keuangan daerah yang signifikan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah, kecuali indeks *share*. Hasil tersebut menunjukkan pemerintah daerah pada era otonomi daerah mampu meningkatkan penerimaan PAD. Meski demikian, meningkatnya penerimaan PAD belum memberikan kontribusi yang besar dalam APBD.

Hasil Metode Kuadran menunjukan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah sebagian besar (97,15%) belum siap menghadapi otonomi daerah. Kuadran I antara

sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah tetap atau tidak ada perubahan (0%). Untuk Kuadran II, apabila sebelum otonomi daerah tidak ada, maka sesudah otonomi daerah terdapat satu daerah, sehingga terjadi peningkatan jumlah daerah di Kuadran II sebesar 2,86%. Sebelum otonomi daerah jumlah daerah yang ada di Kuadran III ada tiga, dan sesudah otonomi daerah jumlahnya hanya ada satu, sehingga terjadi penurunan sebesar 66,63%. Sebelum otonomi daerah jumlah daerah yang ada di Kuadran IV ada 31, dan sesudah otonomi daerah menjadi 32, sehingga terjadi peningkatan sebesar 3,23%.

5.2 Implikasi Penelitian

Implikasi penting dari hasil penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah perlu menyikapi secara bijaksana UU otonomi daerah supaya dapat meningkatkan penerimaan PAD dan kemampuan keuangan daerah. Upaya peningkatan penerimaan PAD tidak semata-mata mengandalkan pajak dan retribusi tetapi juga mengoptimalkan aspek-aspek lainnya, seperti peningkatan kualitas SDM; penyiapan sarana/prasarana dasar dan pendukung; peraturan dan perundangan yang memperhatikan aspek ekonomi dan desentralisasi kewenangan perijinan investasi; kebijakan pemberian fasilitas insentif kepada investor yang lebih menarik; dan optimalisasi potensi perekonomian lokal sehingga bermanfaat kepada daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Objek penelitian terbatas pada daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah sehingga kurang memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh otonomi daerah terhadap penerimaan PAD dan kemampuan keuangan daerah di Indonesia.

2. Periode pengamatan hanya terbatas pada tahun 1994-2008, sehingga kurang memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerimaan PAD dan kemampuan keuangan daerah sebelum tahun 1994.

5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang berada di kuadran I, perlu tetap mempertahankan kemampuannya dalam mengembangkan potensi lokal sehingga PAD tetap memberikan kontribusi yang besar bagi APBD.
2. Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang berada di kuadran II, tetap perlu mempertahankan kemampuannya dalam mengembangkan potensi daerah, tetapi juga perlu meningkatkan kemampuannya dalam mengelola secara efektif, supaya potensi daerah yang dikembangkan dan dikelola dapat meningkatkan PAD. Peningkatan PAD diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam APBD. Kemampuan pengelolaan potensi daerah antara lain dengan menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, yang melibatkan semua unsur yang ada di daerah.
3. Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang berada di kuadran III, memiliki keyakinan tinggi dalam meningkatkan PAD melalui pengembangan dan pengelolaan potensi lokal. Keyakinan yang tinggi tersebut mendorong pemerintah daerah menyusun anggaran belanja melebihi kemampuan keuangan, sehingga akhirnya banyak pembangunan yang tidak lancar dan mengantungkan pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengevaluasi kemampuannya dalam mengembangkan dan mengelola potensi lokal, supaya

dapat memperkirakan dengan lebih akurat hasil dari pengembangan dan pengelolaan potensi lokal. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membuat skala prioritas dalam merencanakan pembangunan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar atau tidak berhenti di tengah jalan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dalam menyusun anggaran belanja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang riil.

4. Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang berada di kuadran IV, perlu melakukan upaya-upaya khusus yang menyentuh penataan berbagai aspek untuk mengembangkan potensi lokal yang nantinya dapat menjadi sumber peningkatan PAD. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut perlu memperhatikan berbagai aspek, seperti kualitas SDM, sarana dan prasarana dasar serta pendukungnya.
5. Menambah objek penelitian dengan melibatkan Kabupaten/Kota di propinsi-propinsi lain yang ada di Indonesia, khususnya propinsi di luar Pulau Jawa.
6. Menambah periode pengamatan supaya memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerimaan PAD dan kemampuan keuangan daerah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli daerah (Studi Kasus kabupaten dan Kota se Jawa- Bali), **Simposium Nasional Akuntansi**. Padang
- Amin Pujiati. 2006. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era desentralisasi Fiskal. **Jurnal Ekonomi Pembangunan**, 61-70

- Azhari, A.S. 1995. **Perpajakan di Indonesia, Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah**. Jakarta : PT Gramedia
- Azwar, S., 1998. **Metode Penelitian**. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Brata Kusumah, D. 2001. **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**. Jakarta : PT Gramedia
- Brata Kusumah, D dan Solihin. 2002. **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**. Jakarta : PT Gramedia
- Devas, N. 1995. **Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia**. Jakarta : UI Press
- Erlangga Agustino Landiyanto. 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Surabaya. **CURES Working Paper** No. 05/01, Januari.
- Fajar Hasri Ramadhana, Insyafiah, dan Sunarsip. 2009. **Keuangan Publik : Teori dan Aplikasi**. Jakarta : BPPK Depkeu
- Halim, A. 2004. **Bunga rampai Manajemen Keuangan Daerah**. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Harun, Amrullah dan Pan Budi. 2006. Indikator Makro Sosial-Ekonomi sebagai Pengukuran Kinerja Daerah: Kasus Kabupaten Bangka. **CURES Working Paper** No. 06/01
- Imam Ghozali. 2005. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**. Semarang: BP Undip.
- Kaho, J.R. 1997. **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Keuangan Pusat dan Daerah
- Mangkoesebroto, G. 1999. **Ekonomi Publik**. Yogyakarta : BPFU UGM
- Mardiasmo. 2002. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Andi Offset
- Munawir, S. 1992. **Pokok-pokok Perpajakan**. Yogyakarta : Liberty
- Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah. Deddyk@bappenas.go.id.
- Saragih, J.P. 2003. **Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi**. Jakarta : Ghalia Indonesia

- Sekaran, U. 2000. **Research Method for Business: A Skill-Building Approach**. Third Edition. New York : John Wiley and Sons, Inc
- Simanjutak, R.A. 1999. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. **Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Flatron untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia**, Padang
- Suparmoko. 2002. **Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**. Yogyakarta : Andi Offset
- Supranto, J. 2001. **Statistika Teori dan Aplikasi**. Jakarta : PT Erlangga
- Suryabrata, S. 2000. **Metodologi Penelitian**. Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah**
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah**
- UU No. 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah**
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah**
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**
- Yani, A. 2002. **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa

LAMPIRAN

**KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH
1994-2008**

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.53183	0.23000	0.70800	0.19190	0.82789	0.08700	1.31100	0.46598
Kab Banyumas	0.47900	0.34500	0.66300	0.12350	1.00567	0.78400	1.57800	0.25963
Kab Purbalingga	0.44367	0.16300	0.75600	0.26905	0.89933	0.68100	1.43400	0.23879
Kab Banjarnegara	0.61450	0.49600	0.70800	0.07974	0.90878	0.64700	1.56300	0.31438
Kab Kebumen	0.52683	0.40000	0.66300	0.12387	0.79411	0.39900	1.38600	0.29788
Kab Purworejo	0.34633	0.28000	0.39400	0.04007	0.94878	0.75500	1.62000	0.28599
Kab Wonosobo	0.70950	0.61400	0.79900	0.06992	0.82656	0.46900	1.80700	0.41854
Kab Magelang	0.43000	0.16400	0.57600	0.14452	0.93689	0.70300	1.43000	0.26772
Kab Boyolali	0.43300	0.08500	0.72900	0.27375	1.08633	0.74700	2.24600	0.47603
Kab Klaten	0.45167	0.34800	0.52100	0.05890	0.82511	0.54500	1.32300	0.22747
Kab Sukoharjo	0.51733	0.46000	0.59900	0.05793	0.92844	0.56500	1.19700	0.21453
Kab Wonogiri	0.59383	0.45100	0.70500	0.09888	0.80422	0.49300	1.34500	0.24046
Kab Karanganyar	0.41333	0.18100	0.54500	0.14010	0.90478	0.66400	1.30700	0.20958
Kab Sragen	0.71317	0.48700	0.89700	0.13842	0.85133	0.49800	1.71600	0.35902
Kab Grobogan	0.45367	0.29000	0.65600	0.17185	0.84422	0.63800	1.13900	0.18883
Kab Blora	0.56800	0.32000	0.78600	0.15142	0.79744	0.54000	1.85800	0.42493

Kab Rembang	0.62300	0.45200	0.77100	0.11554	0.97867	0.69100	1.50000	0.30964
Kab Pati	0.35883	0.26000	0.56000	0.11166	0.95400	0.67500	1.61000	0.34034
Kab Kudus	0.56533	0.35500	0.74600	0.14895	1.06944	0.86500	1.81200	0.31916
Kab Jepara	0.55750	0.29800	0.81300	0.19712	0.88589	0.54900	1.57900	0.32076
Kab Demak	0.57833	0.45200	0.70900	0.09716	0.90189	0.55400	1.68900	0.36856
Kab Semarang	0.43783	0.31600	0.58000	0.12628	0.93778	0.76500	1.42700	0.21722
Kab Temanggung	0.66733	0.57700	0.75200	0.06918	0.98067	0.68400	1.58500	0.29071
Kab Kendal	0.50350	0.31300	0.63300	0.11085	0.86678	0.58300	1.27300	0.21496
Kab Batang	0.53917	0.32500	0.67600	0.12197	0.79267	0.46800	1.61100	0.33668
Kab Pekalongan	0.87500	0.49800	1.27400	0.31230	0.59600	0.33100	0.99200	0.23975
Kab Pemasang	0.59100	0.39100	0.87300	0.15629	0.94689	0.59900	1.52000	0.35351
Kab Tegal	0.53050	0.27100	0.66800	0.15046	0.89922	0.67400	1.44400	0.23432
Kab Brebes	0.63917	0.45900	0.76000	0.11642	0.86944	0.57500	1.14400	0.20019
Kota Magelang	0.33633	0.28400	0.39600	0.04971	0.94311	0.74100	1.45900	0.22248
Kota Surakarta	0.60183	0.45900	0.72800	0.12387	0.99822	0.84600	1.46500	0.19198
Kota Salatiga	0.47417	0.24000	0.71000	0.20484	0.77622	0.09000	1.42000	0.36031
Kota Semarang	0.52150	0.38300	0.65800	0.08998	0.95267	0.83400	1.15800	0.11658
Kota Pekalongan	0.50300	0.45400	0.58600	0.04644	0.80900	0.47200	1.36000	0.28109
Kota Tegal	0.72900	0.60100	0.82000	0.07854	0.82667	0.47900	1.46800	0.31599

**RASIO PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH
1994-2008**

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.00243	0.00095	0.05870	0.00113	0.01114	0.00091	0.05870	0.01970
Kab Banyumas	0.01260	0.00643	0.01981	0.00429	0.01158	0.00622	0.01981	0.00514
Kab Purbalingga	0.01020	0.00710	0.02212	0.00362	0.01284	0.00450	0.02212	0.00599
Kab Banjarnegara	0.00577	0.00310	0.01541	0.00193	0.00872	0.00239	0.01541	0.00439
Kab Kebumen	0.00843	0.00460	0.95833	0.00281	0.11478	0.00298	0.95833	0.31636
Kab Purworejo	0.01149	0.00458	1.16267	0.00519	0.21618	0.00472	1.16267	0.42542
Kab Wonosobo	0.01191	0.00635	0.02163	0.00456	0.01283	0.00525	0.02163	0.00541
Kab Magelang	0.02429	0.00521	0.02041	0.03583	0.01196	0.00440	0.02041	0.00607
Kab Boyolali	0.02369	0.00493	0.01900	0.02695	0.01086	0.00384	0.01900	0.00545
Kab Klaten	0.00730	0.00308	0.00886	0.00302	0.00507	0.00219	0.00886	0.00210
Kab Sukoharjo	0.00719	0.00328	0.00880	0.00290	0.00571	0.00267	0.00880	0.00217
Kab Wonogiri	0.01311	0.00632	0.01944	0.00465	0.01161	0.00502	0.01944	0.00540
Kab Karanganyar	0.00715	0.00428	0.01038	0.00230	0.00661	0.00451	0.01038	0.00206
Kab Sragen	0.01311	0.00543	0.02591	0.00544	0.01478	0.00505	0.02591	0.00679
Kab Grobogan	0.00930	0.00645	0.02509	0.00245	0.01296	0.00466	0.02509	0.00617
Kab Blora	0.00731	0.00442	0.02173	0.00242	0.01249	0.00566	0.02173	0.00495
Kab Rembang	0.01105	0.00483	0.01841	0.00408	0.01086	0.00393	0.01841	0.00564
Kab Pati	0.00951	0.00542	0.02317	0.00396	0.01308	0.00500	0.02317	0.00640
Kab Kudus	0.02602	0.00183	0.00414	0.05518	0.00242	0.00140	0.00414	0.00083
Kab Jepara	0.01025	0.00566	0.02262	0.00565	0.01311	0.00364	0.02262	0.00663
Kab Demak	0.00624	0.00300	0.01264	0.00216	0.00723	0.00268	0.01264	0.00341
Kab Semarang	0.01180	0.00517	0.01593	0.00462	0.01012	0.00397	0.01593	0.00448
Kab Temanggung	0.00772	0.00424	0.01419	0.00276	0.00888	0.00310	0.01419	0.00390
Kab Kendal	0.00538	0.00283	0.01088	0.00190	0.00719	0.00302	0.01088	0.00301
Kab Batang	0.00497	0.00275	1.13481	0.00170	0.13360	0.00366	1.13481	0.37547
Kab Pekalongan	0.00768	0.00301	0.01441	0.00363	0.00831	0.00325	0.01441	0.00406
Kab Pemasang	0.00708	0.00332	0.01078	0.00256	0.00707	0.00327	0.01078	0.00284
Kab Tegal	0.00982	0.00484	0.02153	0.00535	0.01227	0.00470	0.02153	0.00597
Kab Brebes	0.00412	0.00069	0.00651	0.00197	0.00452	0.00239	0.00651	0.00145
Kota Magelang	0.02282	0.01310	0.03541	0.00736	0.02360	0.00991	0.03541	0.01085
Kota Surakarta	0.01868	0.00871	0.02179	0.00628	0.01360	0.00739	0.02179	0.00468
Kota Salatiga	0.02175	0.01155	0.09495	0.00791	0.03143	0.00026	0.09495	0.02686
Kota Semarang	0.01127	0.00472	0.01459	0.00408	0.00873	0.00374	0.01459	0.00409
Kota Pekalongan	0.00946	0.00357	0.01804	0.00446	0.00977	0.00268	0.01804	0.00548
Kota Tegal	0.01938	0.00976	0.05512	0.00669	0.03215	0.00847	0.05512	0.01683

**RASIO PAJAK
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH
1994-2008**

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.00007	0.00003	0.00009	0.00003	0.00144	0.00047	0.00300	0.00084
Kab Banyumas	0.00049	0.00024	0.00055	0.00015	0.00416	0.00173	0.01106	0.00291
Kab Purbalingga	0.00002	0.00002	0.00005	0.00001	0.00308	0.00087	0.01124	0.00318
Kab Banjarnegara	0.00005	0.00003	0.00006	0.00001	0.00235	0.00063	0.00911	0.00263
Kab Kebumen	0.00009	0.00005	0.00013	0.00003	0.09101	0.00078	0.80180	0.26655
Kab Purworejo	0.00008	0.00003	0.00011	0.00003	0.03280	0.00069	0.16407	0.06126
Kab Wonosobo	0.00027	0.00011	0.00027	0.00007	0.00334	0.00115	0.01286	0.00368
Kab Magelang	0.00018	0.00016	0.00198	0.00071	0.00572	0.00199	0.01294	0.00344
Kab Boyolali	0.00001	0.00001	0.00008	0.00002	0.00335	0.00077	0.01321	0.00388
Kab Klaten	0.00006	0.00003	0.00008	0.00002	0.00221	0.00108	0.00468	0.00116
Kab Sukoharjo	0.00007	0.00002	0.00007	0.00002	0.00278	0.00135	0.00456	0.00106
Kab Wonogiri	0.00010	0.00003	0.00010	0.00003	0.00298	0.00027	0.01097	0.00317
Kab Karanganyar	0.00004	0.00004	0.00008	0.00002	0.00297	0.00149	0.00571	0.00128
Kab Sragen	0.00011	0.00004	0.00011	0.00003	0.00398	0.00097	0.01548	0.00446
Kab Grobogan	0.00004	0.00003	0.00005	0.00001	0.00248	0.00099	0.00426	0.00123
Kab Blora	0.00013	0.00005	0.00013	0.00004	0.00305	0.00030	0.01421	0.00428
Kab Rembang	0.00017	0.00006	0.00017	0.00005	0.00288	0.00080	0.00868	0.00238
Kab Pati	0.00014	0.00004	0.00014	0.00004	0.00365	0.00109	0.01422	0.00412
Kab Kudus	0.00007	0.00002	0.00218	0.00087	0.00085	0.00037	0.00239	0.00062
Kab Jepara	0.00007	0.00007	0.00016	0.00004	0.00376	0.00096	0.01313	0.00378
Kab Demak	0.00003	0.00001	0.00004	0.00001	0.00238	0.00090	0.00695	0.00190
Kab Semarang	0.00032	0.00018	0.00051	0.00011	0.00353	0.00149	0.00956	0.00246
Kab Temanggung	0.00005	0.00002	0.00005	0.00001	0.00250	0.00089	0.00802	0.00219
Kab Kendal	0.00010	0.00004	0.00010	0.00003	0.00270	0.00127	0.00673	0.00172
Kab Batang	0.00016	0.00012	0.00024	0.00006	0.03244	0.00090	0.27088	0.08945
Kab Pekalongan	0.00006	0.00001	0.00006	0.00002	0.00258	0.00075	0.00790	0.00224
Kab Pemasang	0.00008	0.00004	0.00010	0.00002	0.00190	0.00099	0.00517	0.00132
Kab Tegal	0.00004	0.00003	0.00009	0.00003	0.00364	0.00126	0.01063	0.00296
Kab Brebes	0.00005	0.00000	0.00005	0.00002	0.00150	0.00077	0.00297	0.00073
Kota Magelang	0.00087	0.00033	0.00095	0.00025	0.00594	0.00176	0.02506	0.00734
Kota Surakarta	0.00158	0.00105	0.00216	0.00039	0.00723	0.00309	0.01346	0.00326
Kota Salatiga	0.00066	0.00037	0.00075	0.00017	0.00634	0.00007	0.02292	0.00672
Kota Semarang	0.00199	0.00091	0.00206	0.00050	0.00549	0.00227	0.00882	0.00260
Kota Pekalongan	0.00069	0.00023	0.00069	0.00019	0.00463	0.00165	0.01052	0.00303
Kota Tegal	0.00096	0.00039	0.00097	0.00025	0.00814	0.00251	0.03322	0.00970

**RASIO RETRIBUSI
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH
1994-2008**

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.00119	0.00046	0.00176	0.00057	0.00102	0.00032	0.00208	0.00061
Kab Banyumas	0.00569	0.00270	0.00860	0.00251	0.00732	0.00395	0.01108	0.00298
Kab Purbalingga	0.00391	0.00204	0.00599	0.00170	0.00854	0.00259	0.01450	0.00412
Kab Banjarnegara	0.00349	0.00195	0.00465	0.00124	0.00520	0.00200	0.00836	0.00233
Kab Kebumen	0.00421	0.00269	0.00551	0.00126	0.06221	0.00191	0.52654	0.17414
Kab Purworejo	0.00389	0.00168	0.00597	0.00182	0.14536	0.00288	0.81291	0.29036
Kab Wonosobo	0.00838	0.00378	0.01379	0.00369	0.00683	0.00285	0.01061	0.00313
Kab Magelang	0.00950	0.00177	0.03895	0.01450	0.00549	0.00145	0.00868	0.00313
Kab Boyolali	0.00536	0.00258	0.00764	0.00214	0.00862	0.00310	0.01550	0.00489
Kab Klaten	0.00322	0.00144	0.00462	0.00139	0.00179	0.00112	0.00281	0.00056
Kab Sukoharjo	0.00360	0.00194	0.00549	0.00142	0.00230	0.00117	0.00320	0.00074
Kab Wonogiri	0.00778	0.00362	0.01167	0.00323	0.00611	0.00351	0.01015	0.00248
Kab Karanganyar	0.00269	0.00188	0.00372	0.00076	0.00286	0.00182	0.00345	0.00057
Kab Sragen	0.00890	0.00483	0.01255	0.00338	0.00810	0.00333	0.01144	0.00330
Kab Grobogan	0.00430	0.00192	0.00714	0.00219	0.00791	0.00332	0.01484	0.00316
Kab Blora	0.00382	0.00275	0.00477	0.00085	0.00633	0.00369	0.00931	0.00191
Kab Rembang	0.00673	0.00341	0.01116	0.00298	0.00758	0.00280	0.01196	0.00402
Kab Pati	0.00321	0.00169	0.00500	0.00129	0.00823	0.00341	0.01405	0.00334
Kab Kudus	0.01315	0.00063	0.06845	0.02711	0.00163	0.00115	0.00250	0.00038
Kab Jepara	0.00516	0.00240	0.00753	0.00206	0.00723	0.00281	0.01164	0.00330
Kab Demak	0.00353	0.00191	0.00482	0.00125	0.00394	0.00159	0.00652	0.00198
Kab Semarang	0.00459	0.00250	0.00639	0.00163	0.00583	0.00252	0.00846	0.00259
Kab Temanggung	0.00519	0.00256	0.00750	0.00211	0.00592	0.00262	0.00875	0.00240
Kab Kendal	0.00255	0.00152	0.00344	0.00082	0.00343	0.00142	0.00623	0.00173
Kab Batang	0.00237	0.00173	0.00337	0.00066	0.06886	0.00171	0.58803	0.19470
Kab Pekalongan	0.00604	0.00304	0.00826	0.00214	0.00225	0.00085	0.00590	0.00156
Kab Pemasang	0.00382	0.00271	0.00490	0.00092	0.00457	0.00191	0.00720	0.00204
Kab Tegal	0.00463	0.00280	0.00625	0.00148	0.00717	0.00299	0.01323	0.00347
Kab Brebes	0.00276	0.00031	0.00429	0.00150	0.00228	0.00151	0.00319	0.00048
Kota Magelang	0.00701	0.00338	0.01008	0.00263	0.01618	0.00870	0.02294	0.00645
Kota Surakarta	0.00924	0.00529	0.01301	0.00299	0.00636	0.00317	0.01052	0.00223
Kota Salatiga	0.01018	0.00345	0.01894	0.00653	0.01198	0.00019	0.01999	0.00700
Kota Semarang	0.00403	0.00220	0.00571	0.00143	0.00280	0.00107	0.00432	0.00124
Kota Pekalongan	0.00433	0.00157	0.00712	0.00220	0.00278	0.00094	0.00516	0.00142
Kota Tegal	0.01327	0.00761	0.01849	0.00459	0.01766	0.00724	0.02727	0.00920

**ELASTISITAS
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH
1994-2008**

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.47054	0.17828	4.52082	0.27261	0.88761	-0.58821	4.52082	1.60876
Kab Banyumas	0.49284	-0.00852	2.74032	0.43645	0.37139	-7.86531	2.74032	3.20764
Kab Purbalingga	0.46624	-1.08439	3.00213	0.95434	1.06458	-3.23509	3.00213	1.89048
Kab Banjarnegara	0.58249	-0.43029	2.80064	0.70057	0.84915	-2.91817	2.80064	1.68204
Kab Kebumen	0.83080	-1.20815	2.12754	1.39856	0.69689	-0.31876	2.12754	0.81978
Kab Purworejo	0.43686	0.09905	3.71732	0.27632	1.15107	-0.00307	3.71732	1.37643
Kab Wonosobo	0.19614	-0.26375	2.69236	0.46780	0.09168	-8.84677	2.69236	3.45712
Kab Magelang	0.33134	-0.00634	3.16488	0.26295	1.00798	-1.11309	3.16488	1.43997
Kab Boyolali	0.54297	-0.00758	3.01513	0.55636	1.00315	-3.85547	3.01513	2.11604
Kab Klaten	0.39357	0.12731	3.22818	0.25830	0.92398	-2.37623	3.22818	1.66274
Kab Sukoharjo	0.39414	0.21746	2.32584	0.18583	0.81652	-1.83836	2.32584	1.30125
Kab Wonogiri	0.28544	-2.00691	3.05656	1.39887	0.53533	-4.55790	3.05656	2.18128
Kab Karanganyar	1.22011	-0.91929	3.60145	1.98435	1.26155	-0.74066	3.60145	1.35827
Kab Sragen	0.73443	-0.23404	3.47998	0.90011	0.83016	-3.37340	3.47998	2.00011
Kab Grobogan	0.06276	-1.61135	2.89998	1.51312	0.92271	-1.80742	2.89998	1.43999
Kab Blora	-2.24051	-13.17200	4.27428	6.26174	0.79442	-4.87000	4.27428	2.71400
Kab Rembang	0.44286	-2.98320	2.19389	2.13337	0.98574	-0.77997	2.19389	0.94076
Kab Pati	0.51261	0.08708	3.95889	0.40986	1.09347	-4.43914	3.95889	2.65983
Kab Kudus	-0.50923	-3.10245	4.51882	1.46356	0.97866	-2.81130	4.51882	2.03055
Kab Jepara	0.52887	-0.13296	2.73774	0.64760	0.80470	-2.36713	2.73774	1.68853
Kab Demak	0.56940	-0.26253	3.00103	0.68443	1.13351	-1.33789	3.00103	1.51775
Kab Semarang	0.55235	-0.07726	2.78212	0.62922	1.10157	-1.94654	2.78212	1.48618
Kab Temanggung	0.41106	0.15614	2.39309	0.22867	0.83966	-3.24388	2.39309	1.75269
Kab Kendal	1.00561	-0.18998	3.34662	1.17400	1.07240	-0.95438	3.34662	1.29724
Kab Batang	0.97779	-1.01243	3.46837	1.49449	0.91560	-2.12954	3.46837	1.67916
Kab Pekalongan	0.53189	0.10118	3.69875	0.56302	0.82508	-2.24917	3.69875	1.62587
Kab Pemasang	0.73888	0.07923	2.25112	0.80087	0.81415	-1.91199	2.25112	1.21758
Kab Tegal	0.84814	-0.26301	2.87123	0.91013	0.75925	-2.50701	2.87123	1.57538
Kab Brebes	0.36396	-0.05338	2.24180	0.46742	0.84485	-0.47055	2.24180	0.94923
Kota Magelang	0.43812	0.05403	4.45243	0.39035	1.11662	-2.95306	4.45243	2.28025
Kota Surakarta	0.69320	0.25964	2.50549	0.75155	0.89678	-1.24960	2.50549	1.16842
Kota Salatiga	-0.34248	-3.99975	3.25494	2.12058	0.73854	-2.52618	3.25494	1.66211
Kota Semarang	0.61773	-0.38570	1.89856	0.81310	0.84237	-0.33730	1.89856	0.73136
Kota Pekalongan	0.32766	0.01646	3.13051	0.21335	0.83207	-2.29287	3.13051	1.52691
Kota Tegal	0.76267	-0.12436	3.02496	0.80957	0.62473	-4.79583	3.02496	2.23691

**ELASTISITAS
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH
1994-2008**

Kota/Kab	SEBELUM OTDA		SESUDAH OTDA	
	Mean	KET	Mean	KET
Kab Cilacap	0.47054	INELASTIS	0.88761	INELASTIS
Kab Banyumas	0.49284	INELASTIS	0.37139	INELASTIS
Kab Purbalingga	0.46624	INELASTIS	1.06458	ELASTIS
Kab Banjarnegara	0.58249	INELASTIS	0.84915	INELASTIS
Kab Kebumen	0.83080	INELASTIS	0.69689	INELASTIS
Kab Purworejo	0.43686	INELASTIS	1.15107	ELASTIS
Kab Wonosobo	0.19614	INELASTIS	0.09168	INELASTIS
Kab Magelang	0.33134	INELASTIS	1.00798	ELASTIS
Kab Boyolali	0.54297	INELASTIS	1.00315	ELASTIS
Kab Klaten	0.39357	INELASTIS	0.92398	INELASTIS
Kab Sukoharjo	0.39414	INELASTIS	0.81652	INELASTIS
Kab Wonogiri	0.28544	INELASTIS	0.53533	INELASTIS
Kab Karanganyar	1.22011	ELASTIS	1.26155	ELASTIS
Kab Sragen	0.73443	INELASTIS	0.83016	INELASTIS
Kab Grobogan	0.06276	INELASTIS	0.92271	INELASTIS
Kab Blora	-2.24051	INELASTIS	0.79442	INELASTIS
Kab Rembang	0.44286	INELASTIS	0.98574	INELASTIS
Kab Pati	0.51261	INELASTIS	1.09347	ELASTIS
Kab Kudus	-0.50923	INELASTIS	0.97866	INELASTIS
Kab Jepara	0.52887	INELASTIS	0.80470	INELASTIS
Kab Demak	0.56940	INELASTIS	1.13351	ELASTIS
Kab Semarang	0.55235	INELASTIS	1.10157	ELASTIS
Kab Temanggung	0.41106	INELASTIS	0.83966	INELASTIS
Kab Kendal	1.00561	ELASTIS	1.07240	ELASTIS
Kab Batang	0.97779	INELASTIS	0.91560	INELASTIS
Kab Pekalongan	0.53189	INELASTIS	0.82508	INELASTIS
Kab Pemasang	0.73888	INELASTIS	0.81415	INELASTIS
Kab Tegal	0.84814	INELASTIS	0.75925	INELASTIS
Kab Brebes	0.36396	INELASTIS	0.84485	INELASTIS
Kota Magelang	0.43812	INELASTIS	1.11662	ELASTIS
Kota Surakarta	0.69320	INELASTIS	0.89678	INELASTIS
Kota Salatiga	-0.34248	INELASTIS	0.73854	INELASTIS
Kota Semarang	0.61773	INELASTIS	0.84237	INELASTIS
Kota Pekalongan	0.32766	INELASTIS	0.83207	INELASTIS
Kota Tegal	0.76267	INELASTIS	0.62473	INELASTIS

**PROPORSI PAD
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH
1994-2008**

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.32174	0.21237	0.69682	0.18970	0.28680	0.06993	1.01021	0.32158
Kab Banyumas	0.08873	0.06254	0.10910	0.01707	0.07863	0.04067	0.11277	0.02184
Kab Purbalingga	0.05142	0.02706	0.09725	0.02440	0.06103	0.01609	0.10898	0.03069
Kab Banjarnegara	0.07020	0.02456	0.11509	0.03027	0.05908	0.01496	0.08963	0.02464
Kab Kebumen	0.32825	0.03848	1.48128	0.56583	0.05326	0.02019	0.07838	0.02200
Kab Purworejo	0.07125	0.04636	0.10477	0.02337	0.05625	0.02710	0.08484	0.01819
Kab Wonosobo	0.06159	0.02222	0.12341	0.03597	0.05521	0.02444	0.07644	0.01951
Kab Magelang	0.13648	0.04803	0.31764	0.09452	0.08827	0.04700	0.11474	0.02401
Kab Boyolali	0.30979	0.04083	1.11326	0.41797	0.07355	0.03389	0.13786	0.02951
Kab Klaten	0.08970	0.03613	0.13716	0.03606	0.04327	0.01989	0.05597	0.01289
Kab Sukoharjo	0.06669	0.02313	0.11663	0.03440	0.04551	0.01646	0.07989	0.02005
Kab Wonogiri	0.12523	0.06641	0.16073	0.03953	0.05988	0.03540	0.08016	0.01367
Kab Karanganyar	0.08835	0.03791	0.20673	0.05986	0.05495	0.03421	0.07571	0.01605
Kab Sragen	0.11659	0.03764	0.16349	0.04820	0.08483	0.03325	0.11627	0.03242
Kab Grobogan	0.07648	0.03764	0.11019	0.02832	0.06646	0.02611	0.09659	0.02497
Kab Blora	0.05393	0.02884	0.08342	0.02020	0.05380	0.02453	0.08150	0.01850
Kab Rembang	0.06202	0.01759	0.08868	0.02682	0.05321	0.01567	0.09304	0.02789
Kab Pati	0.14371	0.07008	0.19997	0.05912	0.10192	0.05477	0.13312	0.02732
Kab Kudus	0.09666	0.04735	0.15671	0.04175	0.07604	0.03061	0.12774	0.03099
Kab Jepara	0.11216	0.06198	0.18052	0.03891	0.10269	0.04054	0.14730	0.03952
Kab Demak	0.05180	0.02442	0.07974	0.01926	0.04230	0.01527	0.06309	0.01562
Kab Semarang	0.15458	0.06902	0.22698	0.05443	0.10425	0.04972	0.13773	0.02689
Kab Temanggung	0.05682	0.02859	0.08319	0.02000	0.04856	0.01639	0.07686	0.01957
Kab Kendal	0.12342	0.06273	0.16040	0.03684	0.09295	0.05593	0.14490	0.03009
Kab Batang	0.04180	0.01689	0.04828	0.01224	0.05549	0.01473	0.08415	0.02304
Kab Pekalongan	0.08528	0.02927	0.13208	0.04200	0.06506	0.02879	0.09311	0.02166
Kab Pemalang	0.09558	0.03669	0.13068	0.03410	0.06457	0.03046	0.08810	0.02387
Kab Tegal	0.09739	0.04376	0.15433	0.03567	0.07344	0.02954	0.10260	0.02589
Kab Brebes	0.08032	0.04328	0.11332	0.02310	0.05723	0.02619	0.10352	0.02365
Kota Magelang	0.06110	0.02667	0.09189	0.02300	0.07631	0.01864	0.14912	0.04847
Kota Surakarta	0.61367	0.10482	0.85415	0.26280	0.17636	0.11255	0.28537	0.05819
Kota Salatiga	0.05242	0.03936	0.06265	0.00983	0.08537	0.02187	0.14518	0.04203
Kota Semarang	1.47435	0.18709	1.80619	0.63815	0.35585	0.18216	0.75682	0.23678
Kota Pekalongan	0.02023	0.01472	0.03975	0.00967	0.05353	0.00734	0.08763	0.03207
Kota Tegal	0.17276	0.02227	0.23540	0.08126	0.15836	0.07665	0.19469	0.03399

**PROPORSI BPHBP
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH
1994-2008**

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.04508	0.02471	0.10589	0.03026	0.02293	0.00225	0.07903	0.02427
Kab Banyumas	0.00421	0.00154	0.00747	0.00223	0.01019	0.00139	0.05253	0.01608
Kab Purbalingga	0.00102	0.00040	0.00152	0.00040	0.00282	0.00030	0.00778	0.00251
Kab Banjarnegara	0.00358	0.00067	0.00778	0.00260	0.00775	0.00037	0.05104	0.01629
Kab Kebumen	0.23015	0.00182	1.35396	0.55056	0.00117	0.00040	0.00190	0.00056
Kab Purworejo	0.00213	0.00115	0.00427	0.00120	0.01082	0.00067	0.07660	0.02479
Kab Wonosobo	0.00379	0.00059	0.01193	0.00423	0.01309	0.00050	0.10373	0.03400
Kab Magelang	0.00710	0.00157	0.01438	0.00496	0.00350	0.00086	0.00769	0.00209
Kab Boyolali	0.02459	0.00174	0.10989	0.04221	0.00543	0.00099	0.02275	0.00679
Kab Klaten	0.00434	0.00123	0.00966	0.00331	0.00459	0.00040	0.03553	0.01160
Kab Sukoharjo	0.00286	0.00063	0.00766	0.00273	0.00093	0.00024	0.00218	0.00064
Kab Wonogiri	0.01057	0.00506	0.01722	0.00572	0.00207	0.00077	0.00334	0.00089
Kab Karanganyar	0.00305	0.00127	0.00744	0.00233	0.00129	0.00067	0.00206	0.00050
Kab Sragen	0.01060	0.00252	0.01945	0.00671	0.00855	0.00098	0.04025	0.01217
Kab Grobogan	0.00327	0.00085	0.00710	0.00271	0.00764	0.00050	0.05007	0.01600
Kab Blora	0.00182	0.00079	0.00363	0.00114	0.00289	0.00057	0.01328	0.00396
Kab Rembang	0.00280	0.00044	0.00598	0.00212	0.00869	0.00029	0.06273	0.02031
Kab Pati	0.00803	0.00269	0.01604	0.00520	0.01031	0.00409	0.03306	0.00887
Kab Kudus	0.00706	0.00154	0.01793	0.00659	0.01589	0.00137	0.10730	0.03439
Kab Jepara	0.00709	0.00327	0.00972	0.00261	0.00562	0.00061	0.01028	0.00351
Kab Demak	0.00183	0.00057	0.00399	0.00128	0.00111	0.00028	0.00238	0.00067
Kab Semarang	0.01019	0.00461	0.01559	0.00432	0.00598	0.00144	0.01057	0.00332
Kab Temanggung	0.00253	0.00093	0.00516	0.00164	0.00693	0.00023	0.04919	0.01588
Kab Kendal	0.00820	0.00342	0.01375	0.00374	0.00409	0.00174	0.00984	0.00264
Kab Batang	0.00096	0.00028	0.00140	0.00042	0.00163	0.00010	0.00307	0.00107
Kab Pekalongan	0.00689	0.00111	0.01412	0.00483	0.00650	0.00036	0.05132	0.01681
Kab Pemasang	0.00573	0.00156	0.00968	0.00286	0.00857	0.00054	0.05719	0.01827
Kab Tegal	0.00513	0.00204	0.00749	0.00206	0.00844	0.00056	0.04873	0.01523
Kab Brebes	0.00479	0.00200	0.00965	0.00281	0.00192	0.00049	0.00725	0.00208
Kota Magelang	0.00140	0.00037	0.00308	0.00105	0.00450	0.00031	0.01324	0.00484
Kota Surakarta	0.20534	0.01336	0.28126	0.09843	0.02311	0.00784	0.06726	0.01951
Kota Salatiga	0.00138	0.00046	0.00222	0.00070	0.00450	0.00023	0.01135	0.00412
Kota Semarang	0.88289	0.03258	1.33839	0.46705	0.06001	0.01195	0.17057	0.06479
Kota Pekalongan	0.00033	0.00009	0.00139	0.00052	0.00108	0.00002	0.00220	0.00086
Kota Tegal	0.02442	0.00063	0.03997	0.01438	0.01356	0.00158	0.02771	0.00836

**PROPORSI SUMBANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH
1994-2008**

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.50268	0.27548	1.18062	0.33743	0.23905	0.02507	0.73206	0.22893
Kab Banyumas	0.04693	0.01719	0.08327	0.02483	0.11923	0.01555	0.63614	0.19592
Kab Purbalingga	0.01130	0.00449	0.01691	0.00445	0.11234	0.00332	0.74513	0.23888
Kab Banjarnegara	0.03990	0.00745	0.08674	0.02895	0.10031	0.00416	0.69423	0.22320
Kab Kebumen	2.56613	0.02031	15.09667	6.13877	0.10073	0.00447	0.79713	0.26122
Kab Purworejo	0.02376	0.01277	0.04758	0.01340	0.10908	0.00745	0.75000	0.24185
Kab Wonosobo	0.04226	0.00657	0.13306	0.04715	0.07652	0.00563	0.53158	0.17088
Kab Magelang	0.07917	0.01752	0.16030	0.05534	0.13914	0.01058	0.91066	0.29005
Kab Boyolali	0.27417	0.01941	1.22532	0.47072	0.14971	0.01228	0.81347	0.25950
Kab Klaten	0.04835	0.01367	0.10767	0.03688	0.09902	0.00449	0.82637	0.27277
Kab Sukoharjo	0.03189	0.00705	0.08541	0.03048	0.09553	0.00266	0.77507	0.25493
Kab Wonogiri	0.11785	0.05638	0.19196	0.06370	0.11059	0.01201	0.79577	0.25707
Kab Karanganyar	0.03402	0.01419	0.08301	0.02598	0.09427	0.00751	0.72735	0.23746
Kab Sragen	0.11817	0.02813	0.21685	0.07484	0.12916	0.01091	0.75305	0.23576
Kab Grobogan	0.03639	0.00945	0.07917	0.03020	0.11807	0.00560	0.85447	0.27678
Kab Blora	0.02027	0.00878	0.04047	0.01270	0.09255	0.00636	0.69132	0.22467
Kab Rembang	0.03116	0.00488	0.06666	0.02368	0.10535	0.00327	0.77590	0.25194
Kab Pati	0.08956	0.03004	0.17886	0.05803	0.16632	0.04557	0.83082	0.25065
Kab Kudus	0.07874	0.01721	0.19988	0.07344	0.11703	0.01530	0.65557	0.20426
Kab Jepara	0.07897	0.03641	0.10833	0.02915	0.14543	0.01554	0.75119	0.22954
Kab Demak	0.02043	0.00635	0.04444	0.01423	0.09692	0.00309	0.78725	0.25893
Kab Semarang	0.11357	0.05137	0.17387	0.04817	0.14641	0.01686	0.73384	0.22257
Kab Temanggung	0.02824	0.01042	0.05756	0.01823	0.10676	0.00254	0.81393	0.26542
Kab Kendal	0.09142	0.03817	0.15330	0.04171	0.12901	0.01939	0.77880	0.24536
Kab Batang	0.01071	0.00315	0.01556	0.00465	0.10300	0.00113	0.78831	0.25725
Kab Pekalongan	0.07676	0.01234	0.15740	0.05388	0.10018	0.00399	0.82168	0.27060
Kab Pemalang	0.06385	0.01741	0.10799	0.03192	0.11099	0.00607	0.77657	0.24990
Kab Tegal	0.05716	0.02276	0.08352	0.02294	0.12143	0.00620	0.78953	0.25141
Kab Brebes	0.05338	0.02232	0.10760	0.03132	0.10688	0.00545	0.78601	0.25572
Kota Magelang	0.01563	0.00408	0.03429	0.01177	0.13847	0.00341	0.81309	0.25842
Kota Surakarta	2.28950	0.14893	3.13607	1.09754	0.23307	0.08743	0.52875	0.15984
Kota Salatiga	0.01543	0.00517	0.02476	0.00783	0.12648	0.00253	0.73303	0.23204
Kota Semarang	9.84423	0.36327	14.92304	5.20759	0.62868	0.13322	1.90190	0.73154
Kota Pekalongan	0.00373	0.00102	0.01552	0.00578	0.09581	0.00021	0.77175	0.25365
Kota Tegal	0.27228	0.00705	0.44563	0.16029	0.22609	0.04699	0.69215	0.19164

INDEKS GROWTH
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH
1994-2008

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.13454	0.06378	0.24530	0.06948	0.25864	0.00000	1.00000	0.37058
Kab Banyumas	0.10478	0.08138	0.12845	0.02194	0.09294	0.04153	0.15765	0.03077
Kab Purbalingga	0.12813	0.06151	0.24480	0.07035	0.10424	0.04166	0.19542	0.04397
Kab Banjarnegara	0.09882	0.08205	0.10686	0.01031	0.11001	0.06555	0.21898	0.04707
Kab Kebumen	0.09760	0.05771	0.13062	0.02783	0.11506	0.06199	0.29903	0.07305
Kab Purworejo	0.09266	0.07711	0.10721	0.01365	0.10287	0.07039	0.15918	0.02650
Kab Wonosobo	0.09226	0.07495	0.11519	0.01578	0.10935	0.07307	0.26397	0.06023
Kab Magelang	0.12405	0.03140	0.29182	0.09853	0.09894	0.05960	0.14767	0.02667
Kab Boyolali	0.21084	0.00841	0.76553	0.31252	0.10333	0.06711	0.16067	0.03196
Kab Klaten	0.09105	0.06893	0.11598	0.01756	0.10449	0.06342	0.15037	0.02920
Kab Sukoharjo	0.08823	0.07737	0.10258	0.01061	0.10633	0.05765	0.15512	0.03102
Kab Wonogiri	0.09801	0.07838	0.11917	0.01843	0.10023	0.06971	0.16449	0.02754
Kab Karanganyar	0.12127	0.02883	0.24462	0.07807	0.10222	0.07186	0.15105	0.02189
Kab Sragen	0.09200	0.06463	0.11200	0.02299	0.10708	0.07903	0.17383	0.03437
Kab Grobogan	0.09785	0.07452	0.13885	0.02460	0.10907	0.03540	0.18485	0.04867
Kab Blora	0.10331	0.06802	0.12522	0.02149	0.10458	0.06335	0.19771	0.04114
Kab Rembang	0.09593	0.06591	0.11613	0.01933	0.11218	0.05454	0.19448	0.04121
Kab Pati	0.10597	0.04179	0.16275	0.04318	0.10375	0.08114	0.17735	0.03013
Kab Kudus	0.09733	0.06118	0.13538	0.02725	0.10042	0.06983	0.16998	0.03077
Kab Jepara	0.11978	0.04553	0.21200	0.05997	0.11420	0.06225	0.28693	0.06904
Kab Demak	0.10092	0.07101	0.13971	0.02571	0.10696	0.06222	0.17062	0.03714
Kab Semarang	0.10917	0.05258	0.15656	0.04273	0.10436	0.06799	0.16681	0.02889
Kab Temanggung	0.09438	0.07594	0.10347	0.01094	0.10544	0.06378	0.18841	0.03908
Kab Kendal	0.10437	0.06493	0.13632	0.02600	0.10344	0.06699	0.18915	0.03835
Kab Batang	0.10753	0.06446	0.13573	0.02633	0.10871	0.07877	0.21300	0.04336
Kab Pekalongan	0.11069	0.04952	0.18912	0.05345	0.10076	0.06900	0.18810	0.03527
Kab Pemasang	0.10072	0.05227	0.13978	0.03749	0.11085	0.05439	0.20974	0.04740
Kab Tegal	0.11144	0.03556	0.20910	0.06260	0.10475	0.07634	0.19597	0.03702
Kab Brebes	0.10303	0.07364	0.12022	0.01789	0.10900	0.05257	0.18054	0.04221
Kota Magelang	0.09742	0.07874	0.11117	0.01363	0.10092	0.06680	0.16167	0.02907
Kota Surakarta	0.09498	0.05345	0.12351	0.02645	0.09847	0.08336	0.12512	0.01597
Kota Salatiga	0.09591	0.06201	0.12440	0.02281	0.17920	0.00170	0.83352	0.25061
Kota Semarang	0.09354	0.06514	0.11111	0.01810	0.09963	0.07113	0.14713	0.02286
Kota Pekalongan	0.09031	0.07996	0.10679	0.01053	0.11454	0.06553	0.26132	0.06225
Kota Tegal	0.09489	0.08165	0.11371	0.01355	0.10890	0.06429	0.19837	0.04438

INDEKS GROWTH
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH

1994-2008

Kota/Kab	SEBELUM OTDA		SESUDAH OTDA	
	XG	KET	XG	KET
Kab Cilacap	0.13454	RENDAH	0.25864	TINGGI
Kab Banyumas	0.10478	RENDAH	0.09294	RENDAH
Kab Purbalingga	0.12813	RENDAH	0.10424	RENDAH
Kab Banjarnegara	0.09882	RENDAH	0.11001	RENDAH
Kab Kebumen	0.09760	RENDAH	0.11506	RENDAH
Kab Purworejo	0.09266	RENDAH	0.10287	RENDAH
Kab Wonosobo	0.09226	RENDAH	0.10935	RENDAH
Kab Magelang	0.12405	RENDAH	0.09894	RENDAH
Kab Boyolali	0.21084	TINGGI	0.10333	RENDAH
Kab Klaten	0.09105	RENDAH	0.10449	RENDAH
Kab Sukoharjo	0.08823	RENDAH	0.10633	RENDAH
Kab Wonogiri	0.09801	RENDAH	0.10023	RENDAH
Kab Karanganyar	0.12127	RENDAH	0.10222	RENDAH
Kab Sragen	0.09200	RENDAH	0.10708	RENDAH
Kab Grobogan	0.09785	RENDAH	0.10907	RENDAH
Kab Blora	0.10331	RENDAH	0.10458	RENDAH
Kab Rembang	0.09593	RENDAH	0.11218	RENDAH
Kab Pati	0.10597	RENDAH	0.10375	RENDAH
Kab Kudus	0.09733	RENDAH	0.10042	RENDAH
Kab Jepara	0.11978	RENDAH	0.11420	RENDAH
Kab Demak	0.10092	RENDAH	0.10696	RENDAH
Kab Semarang	0.10917	RENDAH	0.10436	RENDAH
Kab Temanggung	0.09438	RENDAH	0.10544	RENDAH
Kab Kendal	0.10437	RENDAH	0.10344	RENDAH
Kab Batang	0.10753	RENDAH	0.10871	RENDAH
Kab Pekalongan	0.11069	RENDAH	0.10076	RENDAH
Kab Pemasang	0.10072	RENDAH	0.11085	RENDAH
Kab Tegal	0.11144	RENDAH	0.10475	RENDAH
Kab Brebes	0.10303	RENDAH	0.10900	RENDAH
Kota Magelang	0.09742	RENDAH	0.10092	RENDAH
Kota Surakarta	0.09498	RENDAH	0.09847	RENDAH
Kota Salatiga	0.09591	RENDAH	0.17920	TINGGI
Kota Semarang	0.09354	RENDAH	0.09963	RENDAH
Kota Pekalongan	0.09031	RENDAH	0.11454	RENDAH
Kota Tegal	0.09489	RENDAH	0.10890	RENDAH

**INDEKS ELASTISITAS
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH
1994-2008**

Kota/Kab	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.17336	0.04969	0.24694	0.07771	0.16323	0.03642	0.38863	0.13210
Kab Banyumas	0.10123	0.05349	0.15281	0.03560	0.26809	0.05675	0.59764	0.19959
Kab Purbalingga	0.11031	0.04656	0.21257	0.07113	0.28958	0.08536	0.50923	0.13943
Kab Banjarnegara	0.18101	0.16001	0.22478	0.02612	0.33565	0.11427	0.58824	0.17739
Kab Kebumen	0.11303	0.00629	0.17552	0.06471	0.33068	0.03653	0.71687	0.24387
Kab Purworejo	0.10255	0.08203	0.13475	0.02027	0.49426	0.05651	0.79568	0.27167
Kab Wonosobo	0.13063	0.10093	0.18094	0.03615	0.35054	0.05366	0.80065	0.26445
Kab Magelang	0.11495	0.03847	0.16522	0.04968	0.14729	0.04161	0.28769	0.08911
Kab Boyolali	0.06632	0.01443	0.13242	0.05374	0.32450	0.08161	0.61124	0.21675
Kab Klaten	0.13186	0.10239	0.15997	0.02352	0.41865	0.14476	0.82695	0.30176
Kab Sukoharjo	0.11886	0.10787	0.13207	0.00939	0.33340	0.09501	0.80212	0.21527
Kab Wonogiri	0.11643	0.09563	0.13804	0.01847	0.42415	0.12057	0.81128	0.28522
Kab Karanganyar	0.09975	0.03372	0.14621	0.04559	0.38746	0.07858	0.76170	0.26252
Kab Sragen	0.11225	0.08327	0.14367	0.02295	0.24644	0.08504	0.55189	0.17431
Kab Grobogan	0.14878	0.10617	0.19707	0.03665	0.28073	0.07415	0.85201	0.24771
Kab Blora	0.15567	0.10961	0.18601	0.03150	0.40109	0.13696	0.62594	0.17443
Kab Rembang	0.13779	0.11703	0.17688	0.02417	0.22476	0.11267	0.37619	0.09218
Kab Pati	0.12671	0.06663	0.18139	0.05144	0.15947	0.09101	0.29013	0.06629
Kab Kudus	0.07329	0.04212	0.10620	0.02608	0.13535	0.05180	0.38490	0.10015
Kab Jepara	0.10848	0.05900	0.16540	0.04086	0.23812	0.11279	0.40298	0.10580
Kab Demak	0.18212	0.11620	0.22205	0.04295	0.40267	0.03780	0.95597	0.37168
Kab Semarang	0.08611	0.06124	0.13572	0.03082	0.20551	0.10758	0.42183	0.10782
Kab Temanggung	0.13264	0.08853	0.17019	0.03048	0.23876	0.08723	0.39015	0.11081
Kab Kendal	0.12491	0.07635	0.17147	0.03701	0.37036	0.10919	0.64702	0.15949
Kab Batang	0.17405	0.10502	0.26149	0.05643	0.33528	0.14359	0.52102	0.14936
Kab Pekalongan	0.13410	0.07257	0.19173	0.04571	0.29688	0.06558	0.51825	0.17005
Kab Pemasang	0.15924	0.10106	0.23402	0.05317	0.39213	0.11000	1.00000	0.29894
Kab Tegal	0.11924	0.05860	0.16643	0.04033	0.30742	0.05675	0.54133	0.16409
Kab Brebes	0.17491	0.11543	0.23340	0.04596	0.43609	0.11250	0.99522	0.30013
Kota Magelang	0.04351	0.02510	0.05365	0.01093	0.16594	0.03430	0.31428	0.09620
Kota Surakarta	0.04800	0.02053	0.07411	0.02005	0.18667	0.06492	0.35712	0.09926
Kota Salatiga	0.05622	0.02654	0.07243	0.02005	0.16443	0.00000	0.33908	0.11455
Kota Semarang	0.04646	0.02773	0.05669	0.01290	0.12034	0.02112	0.23051	0.06158
Kota Pekalongan	0.12723	0.05949	0.18117	0.04352	0.25468	0.05627	0.48647	0.15552
Kota Tegal	0.06026	0.03568	0.08680	0.02089	0.14748	0.07449	0.23260	0.05154

INDEKS SHARE
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH
1994-2008

KABUPATEN/KOTA	SEBELUM OTDA				SESUDAH OTDA			
	Mean	Min	Max	SD	Mean	Min	Max	SD
Kab Cilacap	0.18382	0.11398	0.38329	0.11528	0.15535	0.03479	0.55751	0.17877
Kab Banyumas	0.04298	0.03069	0.05417	0.00860	0.03963	0.01853	0.05861	0.01214
Kab Purbalingga	0.02572	0.01096	0.04998	0.01479	0.02984	0.00486	0.05650	0.01706
Kab Banjarnegara	0.03312	0.00957	0.05990	0.01814	0.02876	0.00424	0.04574	0.01369
Kab Kebumen	0.05020	0.01731	0.06754	0.02053	0.02553	0.00715	0.03949	0.01223
Kab Purworejo	0.03180	0.02169	0.04575	0.01033	0.02719	0.01098	0.04308	0.01011
Kab Wonosobo	0.02328	0.00827	0.04110	0.01206	0.02661	0.00950	0.03842	0.01085
Kab Magelang	0.07147	0.02262	0.17250	0.05874	0.04499	0.02205	0.05971	0.01335
Kab Boyolali	0.19044	0.01862	0.61479	0.25250	0.03681	0.01476	0.07256	0.01641
Kab Klaten	0.04051	0.01601	0.06443	0.01713	0.01998	0.00698	0.02703	0.00717
Kab Sukoharjo	0.02744	0.00878	0.05057	0.01503	0.02122	0.00507	0.04033	0.01115
Kab Wonogiri	0.06159	0.03284	0.08309	0.02207	0.02921	0.01560	0.04048	0.00760
Kab Karanganyar	0.04586	0.01700	0.11084	0.03713	0.02647	0.01494	0.03801	0.00893
Kab Sragen	0.05552	0.01684	0.08544	0.02634	0.04308	0.01440	0.06055	0.01802
Kab Grobogan	0.03469	0.01685	0.05041	0.01430	0.03287	0.01044	0.04961	0.01388
Kab Blora	0.02262	0.01195	0.03421	0.00877	0.02583	0.00956	0.04123	0.01028
Kab Rembang	0.02757	0.00570	0.04522	0.01476	0.02550	0.00463	0.04764	0.01550
Kab Pati	0.06960	0.03488	0.10709	0.03257	0.05258	0.02637	0.06992	0.01519
Kab Kudus	0.04298	0.02224	0.06812	0.01841	0.03819	0.01293	0.06693	0.01723
Kab Jepara	0.05853	0.03037	0.09628	0.02418	0.05301	0.01846	0.07780	0.02197
Kab Demak	0.02161	0.00950	0.03276	0.00842	0.01943	0.00441	0.03099	0.00868
Kab Semarang	0.08161	0.03429	0.12210	0.03383	0.05387	0.02356	0.07248	0.01495
Kab Temanggung	0.02457	0.01181	0.03645	0.00949	0.02291	0.00503	0.03865	0.01088
Kab Kendal	0.06042	0.03079	0.07718	0.01994	0.04759	0.02701	0.07647	0.01673
Kab Batang	0.01869	0.00531	0.02276	0.00750	0.02677	0.00411	0.04270	0.01281
Kab Pekalongan	0.03813	0.01219	0.06159	0.02188	0.03209	0.01192	0.04768	0.01204
Kab Pemasang	0.04515	0.01632	0.06329	0.01830	0.03182	0.01285	0.04490	0.01327
Kab Tegal	0.04904	0.02025	0.08172	0.02199	0.03675	0.01234	0.05296	0.01439
Kab Brebes	0.03938	0.01998	0.05891	0.01398	0.02773	0.01048	0.05347	0.01315
Kota Magelang	0.02647	0.01075	0.04073	0.01079	0.03834	0.00628	0.07882	0.02695
Kota Surakarta	0.33609	0.05419	0.47075	0.16331	0.09396	0.05849	0.15456	0.03235
Kota Salatiga	0.02456	0.01780	0.03075	0.00596	0.04338	0.00808	0.07663	0.02336
Kota Semarang	0.78319	0.09993	1.00000	0.38661	0.19374	0.09719	0.41664	0.13163
Kota Pekalongan	0.00743	0.00410	0.01802	0.00597	0.02568	0.00000	0.04463	0.01783
Kota Tegal	0.08516	0.00830	0.12678	0.04695	0.08396	0.03853	0.10415	0.01890

INDEKS SHARE
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH

1994-2008

Kota/Kab	SEBELUM OTDA		SESUDAH OTDA	
	XS	KET	XS	KET
Kab Cilacap	0.18382	TINGGI	0.15535	TINGGI
Kab Banyumas	0.04298	RENDAH	0.03963	RENDAH
Kab Purbalingga	0.02572	RENDAH	0.02984	RENDAH
Kab Banjarnegara	0.03312	RENDAH	0.02876	RENDAH
Kab Kebumen	0.05020	RENDAH	0.02553	RENDAH
Kab Purworejo	0.03180	RENDAH	0.02719	RENDAH
Kab Wonosobo	0.02328	RENDAH	0.02661	RENDAH
Kab Magelang	0.07147	RENDAH	0.04499	RENDAH
Kab Boyolali	0.19044	TINGGI	0.03681	RENDAH
Kab Klaten	0.04051	RENDAH	0.01998	RENDAH
Kab Sukoharjo	0.02744	RENDAH	0.02122	RENDAH
Kab Wonogiri	0.06159	RENDAH	0.02921	RENDAH
Kab Karanganyar	0.04586	RENDAH	0.02647	RENDAH
Kab Sragen	0.05552	RENDAH	0.04308	RENDAH
Kab Grobogan	0.03469	RENDAH	0.03287	RENDAH
Kab Blora	0.02262	RENDAH	0.02583	RENDAH
Kab Rembang	0.02757	RENDAH	0.02550	RENDAH
Kab Pati	0.06960	RENDAH	0.05258	RENDAH
Kab Kudus	0.04298	RENDAH	0.03819	RENDAH
Kab Jepara	0.05853	RENDAH	0.05301	RENDAH
Kab Demak	0.02161	RENDAH	0.01943	RENDAH
Kab Semarang	0.08161	RENDAH	0.05387	RENDAH
Kab Temanggung	0.02457	RENDAH	0.02291	RENDAH
Kab Kendal	0.06042	RENDAH	0.04759	RENDAH
Kab Batang	0.01869	RENDAH	0.02677	RENDAH
Kab Pekalongan	0.03813	RENDAH	0.03209	RENDAH
Kab Pemasang	0.04515	RENDAH	0.03182	RENDAH
Kab Tegal	0.04904	RENDAH	0.03675	RENDAH
Kab Brebes	0.03938	RENDAH	0.02773	RENDAH
Kota Magelang	0.02647	RENDAH	0.03834	RENDAH
Kota Surakarta	0.33609	TINGGI	0.09396	RENDAH
Kota Salatiga	0.02456	RENDAH	0.04338	RENDAH
Kota Semarang	0.78319	TINGGI	0.19374	TINGGI
Kota Pekalongan	0.00743	RENDAH	0.02568	RENDAH
Kota Tegal	0.08516	RENDAH	0.08396	RENDAH

**INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH
1994-2008**

Kota/Kab	SEBELUM OTDA		SESUDAH OTDA	
	IKK	KET	IKK	KET
Kab Cilacap	0.16391	RENDAH	0.10277	RENDAH
Kab Banyumas	0.08300	RENDAH	0.22252	SEDANG
Kab Purbalingga	0.08806	RENDAH	0.10727	RENDAH
Kab Banjarnegara	0.10432	RENDAH	0.09745	RENDAH
Kab Kebumen	0.08694	RENDAH	0.10811	RENDAH
Kab Purworejo	0.07567	RENDAH	0.21346	SEDANG
Kab Wonosobo	0.08206	RENDAH	0.12902	RENDAH
Kab Magelang	0.10349	RENDAH	0.12577	RENDAH
Kab Boyolali	0.15586	RENDAH	0.15397	RENDAH
Kab Klaten	0.08781	RENDAH	0.10526	RENDAH
Kab Sukoharjo	0.07818	RENDAH	0.14515	RENDAH
Kab Wonogiri	0.09201	RENDAH	0.09625	RENDAH
Kab Karanganyar	0.08896	RENDAH	0.10929	RENDAH
Kab Sragen	0.08659	RENDAH	0.09898	RENDAH
Kab Grobogan	0.09377	RENDAH	0.17661	RENDAH
Kab Blora	0.09387	RENDAH	0.11398	RENDAH
Kab Rembang	0.08709	RENDAH	0.10502	RENDAH
Kab Pati	0.10076	RENDAH	0.12902	RENDAH
Kab Kudus	0.07120	RENDAH	0.10066	RENDAH
Kab Jepara	0.09560	RENDAH	0.13087	RENDAH
Kab Demak	0.10155	RENDAH	0.11267	RENDAH
Kab Semarang	0.09229	RENDAH	0.09535	RENDAH
Kab Temanggung	0.08386	RENDAH	0.10782	RENDAH
Kab Kendal	0.09656	RENDAH	0.13662	RENDAH
Kab Batang	0.10009	RENDAH	0.17804	RENDAH
Kab Pekalongan	0.09431	RENDAH	0.09351	RENDAH
Kab Pemasang	0.10170	RENDAH	0.09634	RENDAH
Kab Tegal	0.09324	RENDAH	0.10105	RENDAH
Kab Brebes	0.10577	RENDAH	0.11297	RENDAH
Kota Magelang	0.05580	RENDAH	0.08648	RENDAH
Kota Surakarta	0.15969	RENDAH	0.09171	RENDAH
Kota Salatiga	0.05890	RENDAH	0.12078	RENDAH
Kota Semarang	0.30773	RENDAH	0.11259	RENDAH
Kota Pekalongan	0.07499	RENDAH	0.13413	RENDAH
Kota Tegal	0.08010	RENDAH	0.11798	RENDAH

Keterangan:

Rata-rata : 0,13059

Minimum : 0,02951

Maksimum : 0,53131

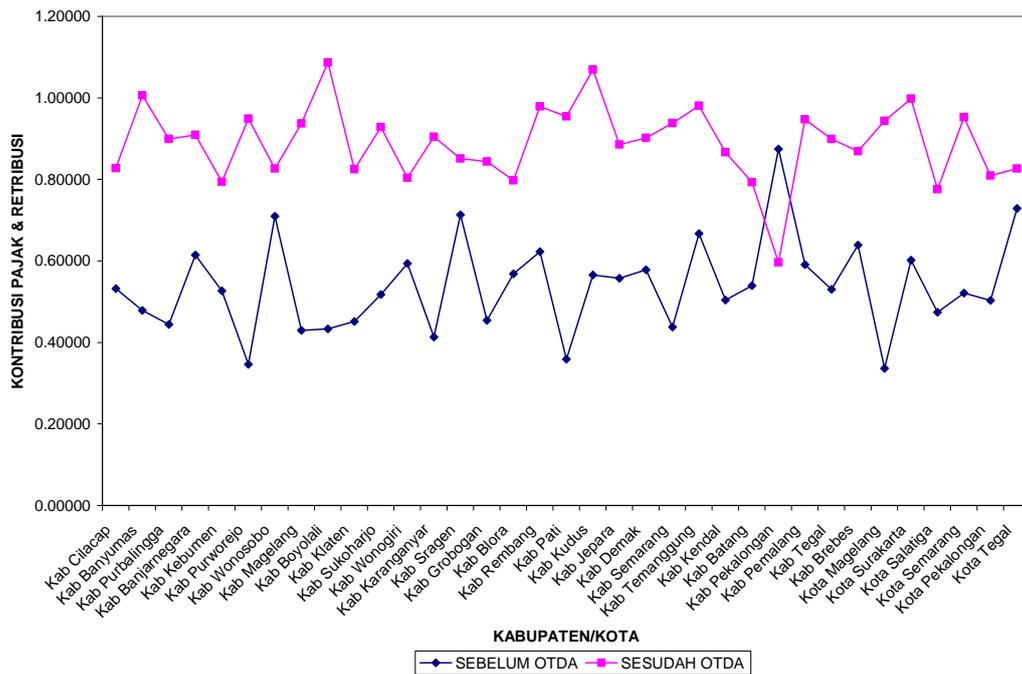
Klasifikasi Skor IKK:

Rendah : 0,02951 – 0,19678

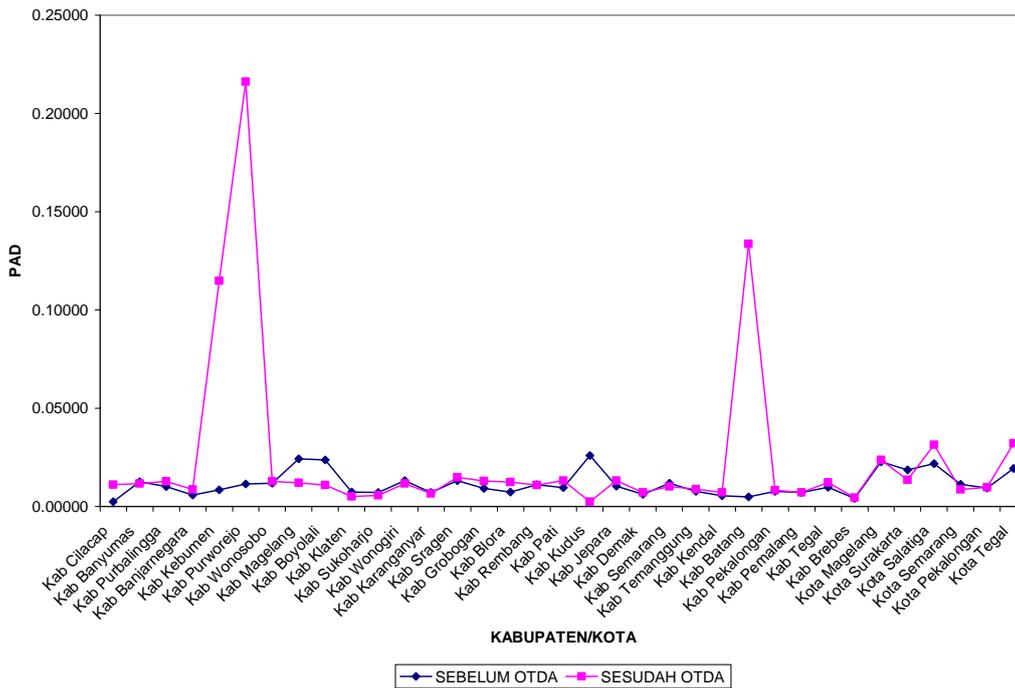
Sedang : 0,19679 – 0,36404

Tinggi : 0,36405 – 0,53131

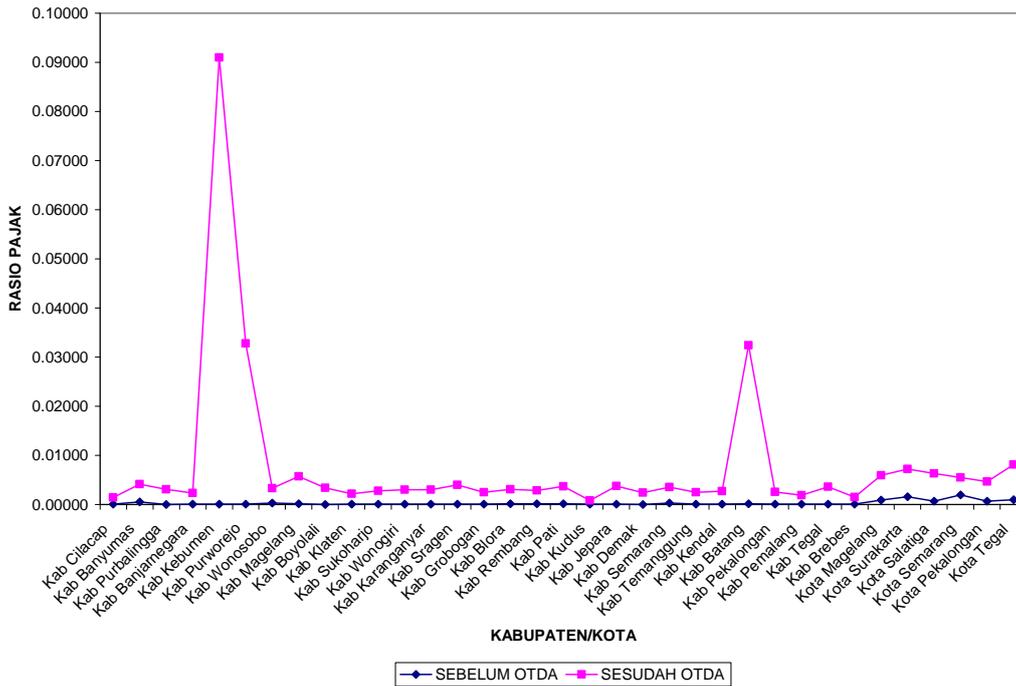
GRAFIK KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI



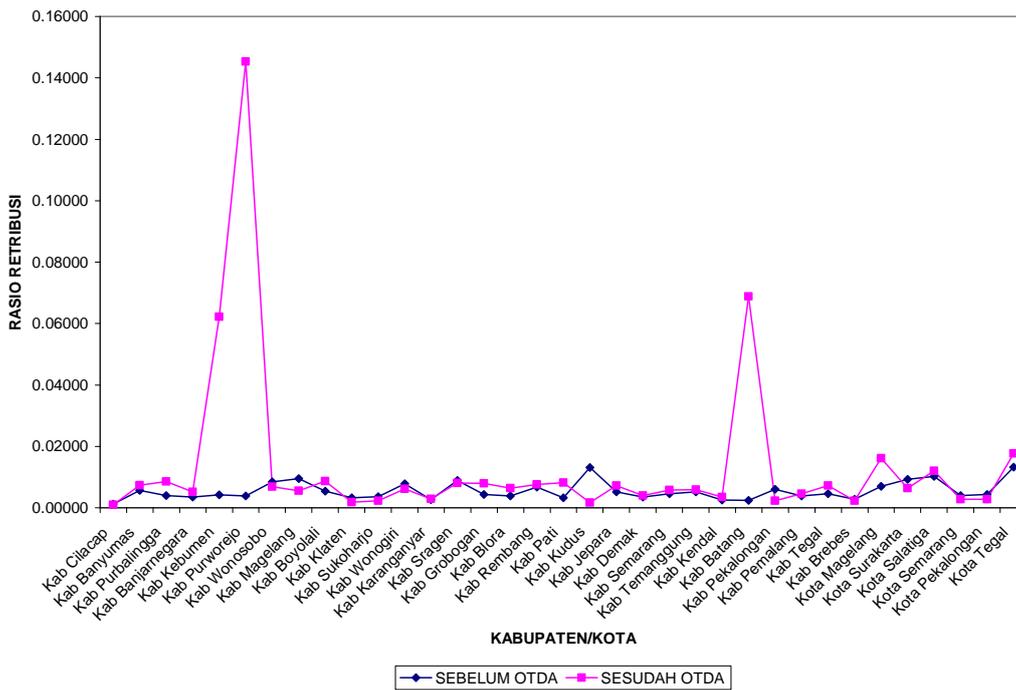
GRAFIK RASIO PAD



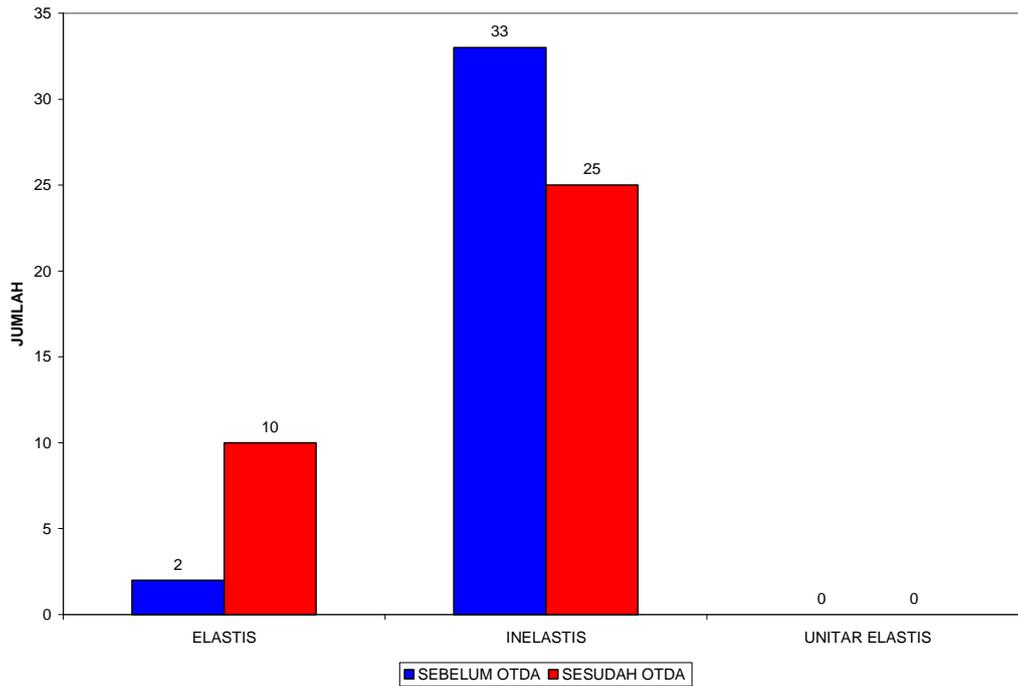
GRAFIK RASIO PAJAK



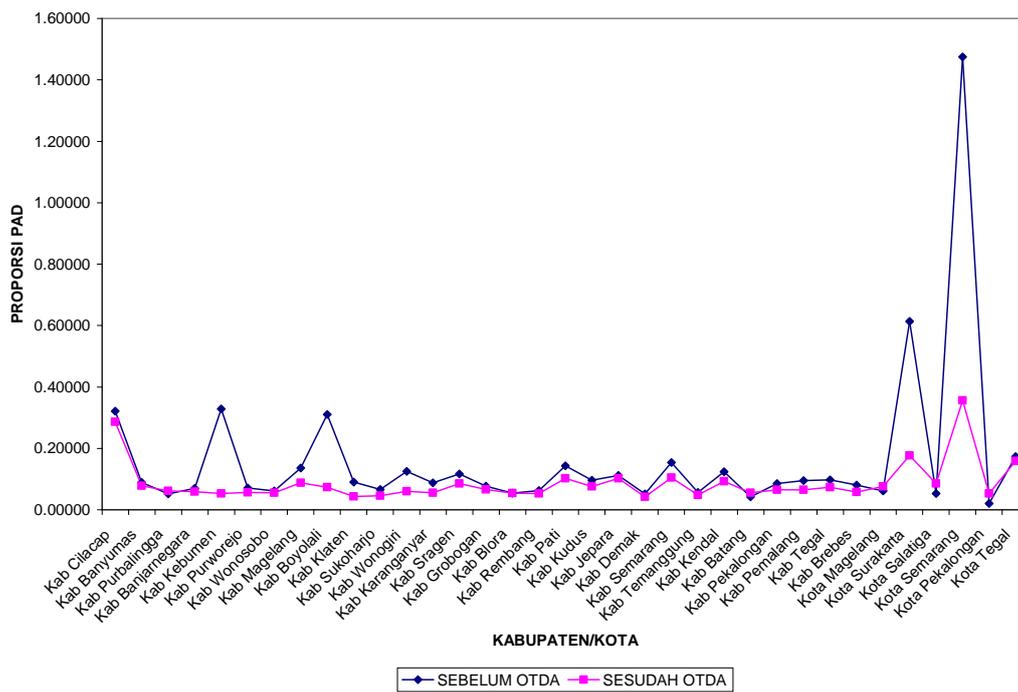
GRAFIK RASIO RETRIBUSI



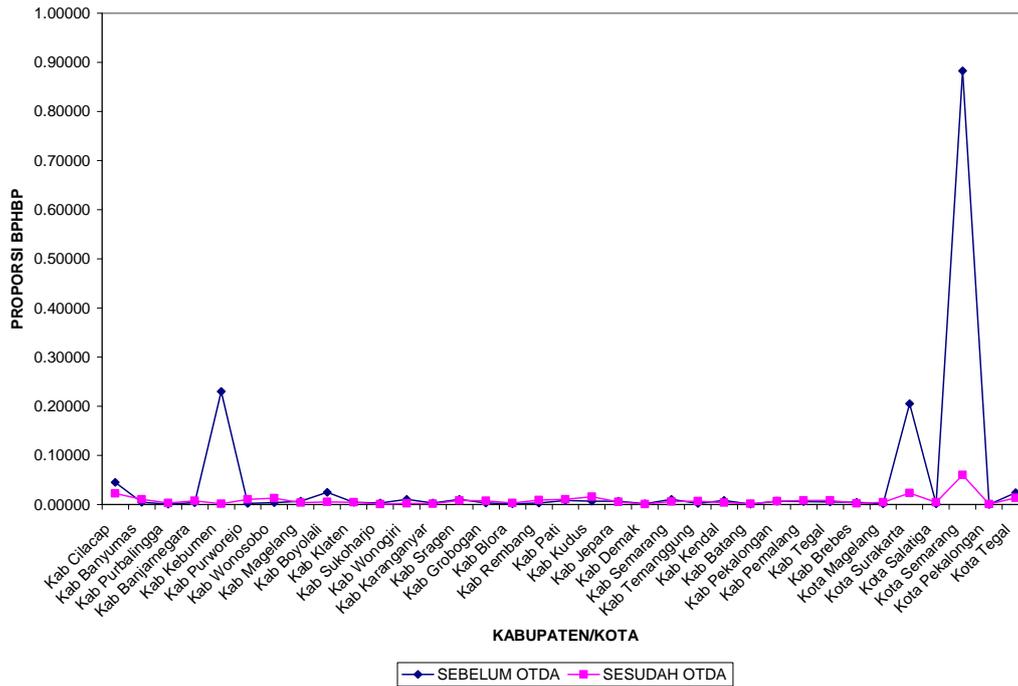
GRAFIK ELASTISITAS PAJAK DAN RETRIBUSI



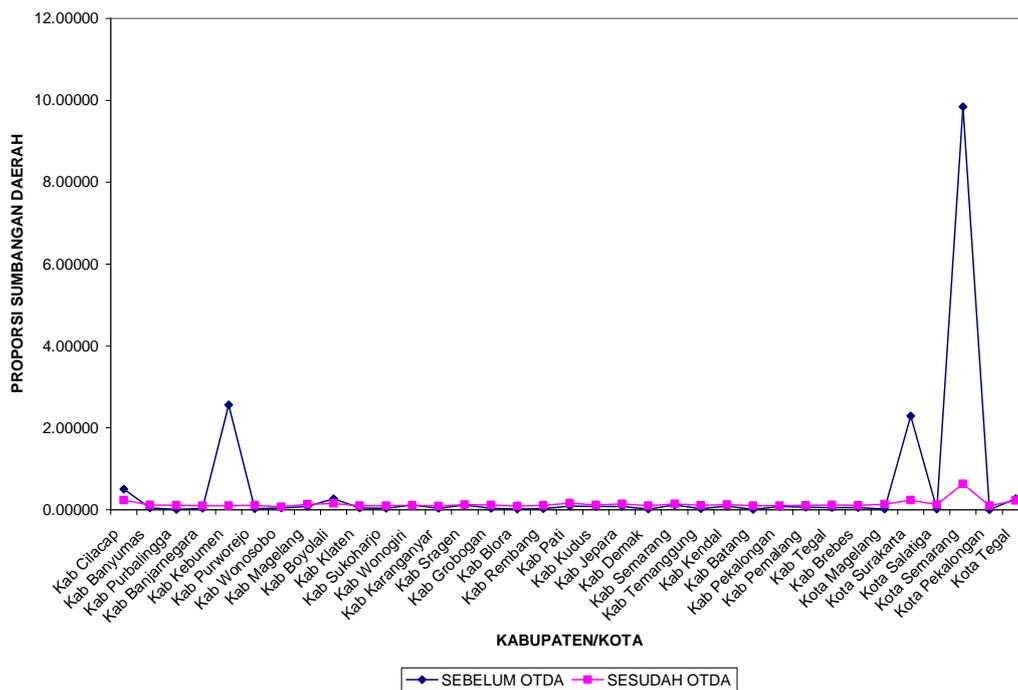
GRAFIK PROPORSI PAD



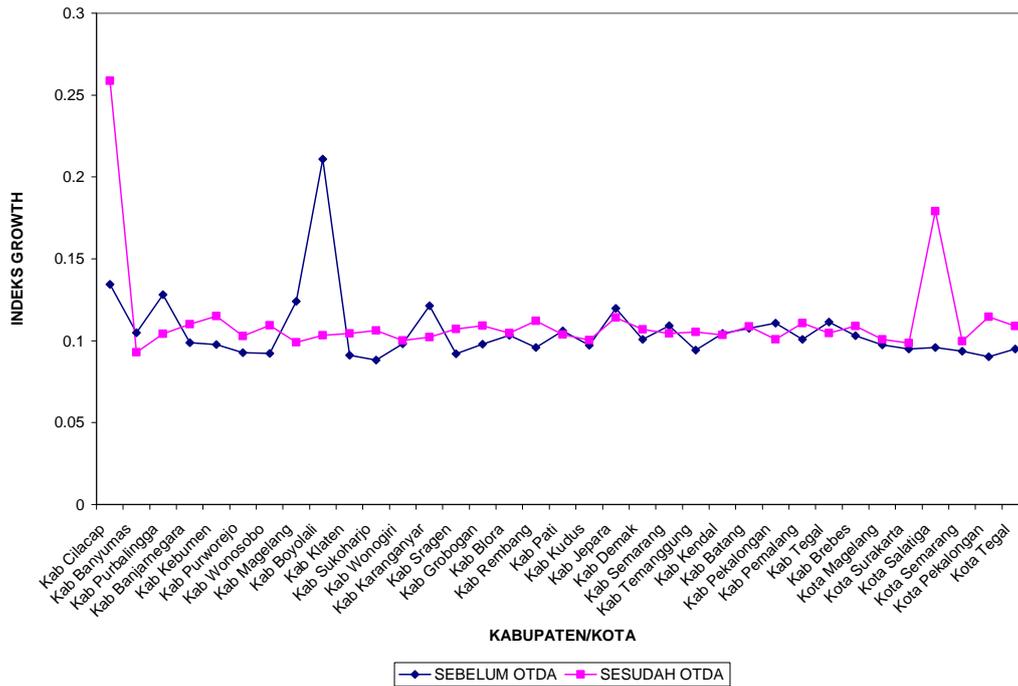
GRAFIK PROPORSI BPHBP



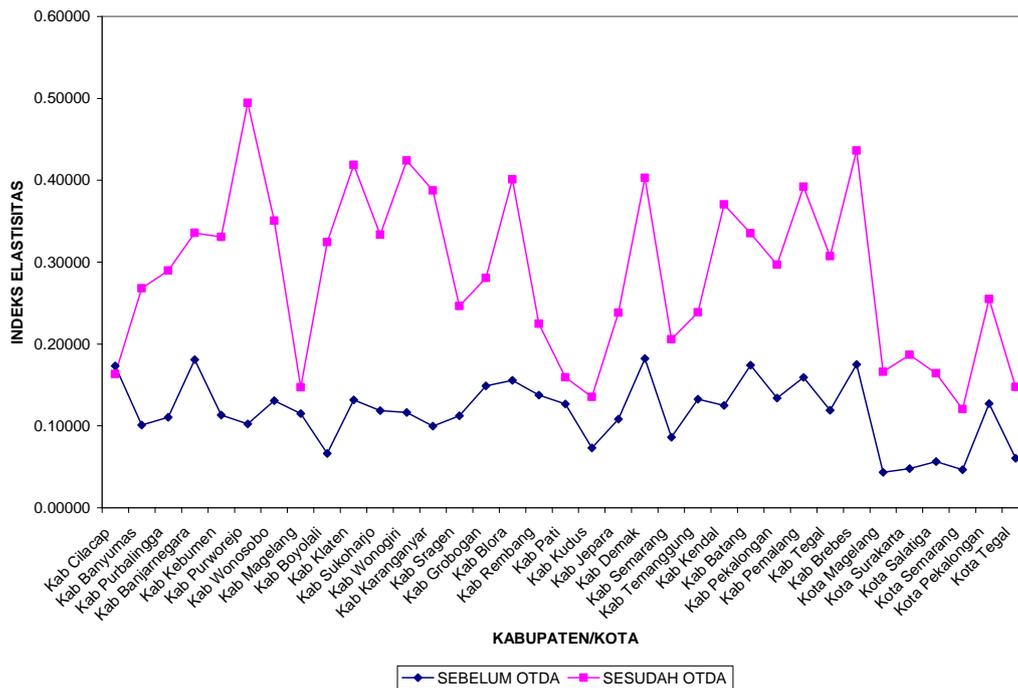
GRAFIK SUMBANGAN DAERAH



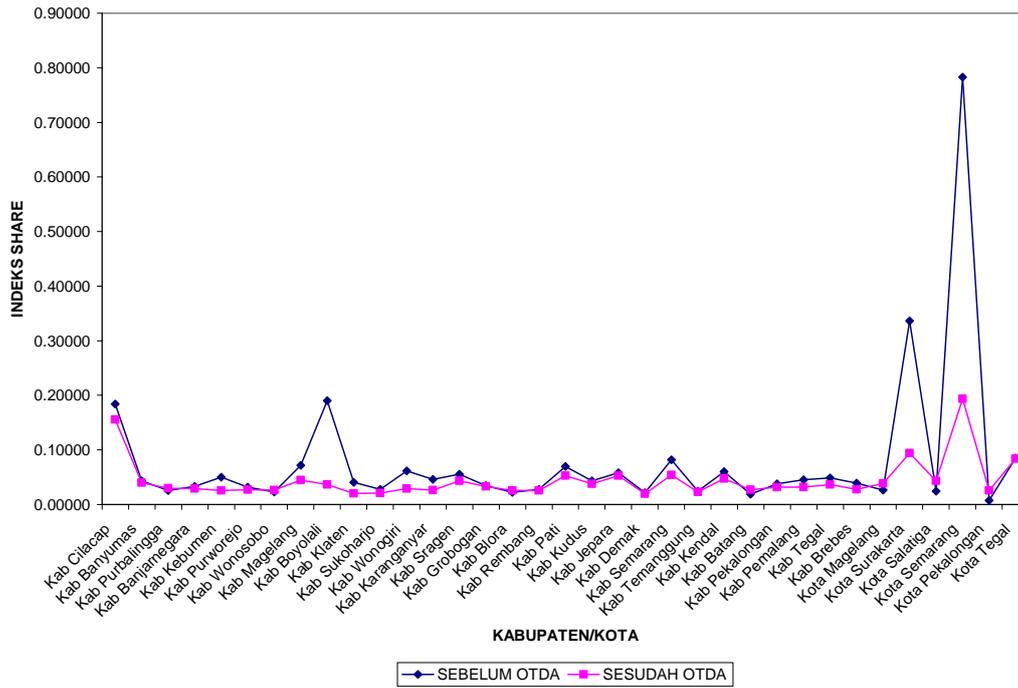
GRAFIK INDEKS GROWTH



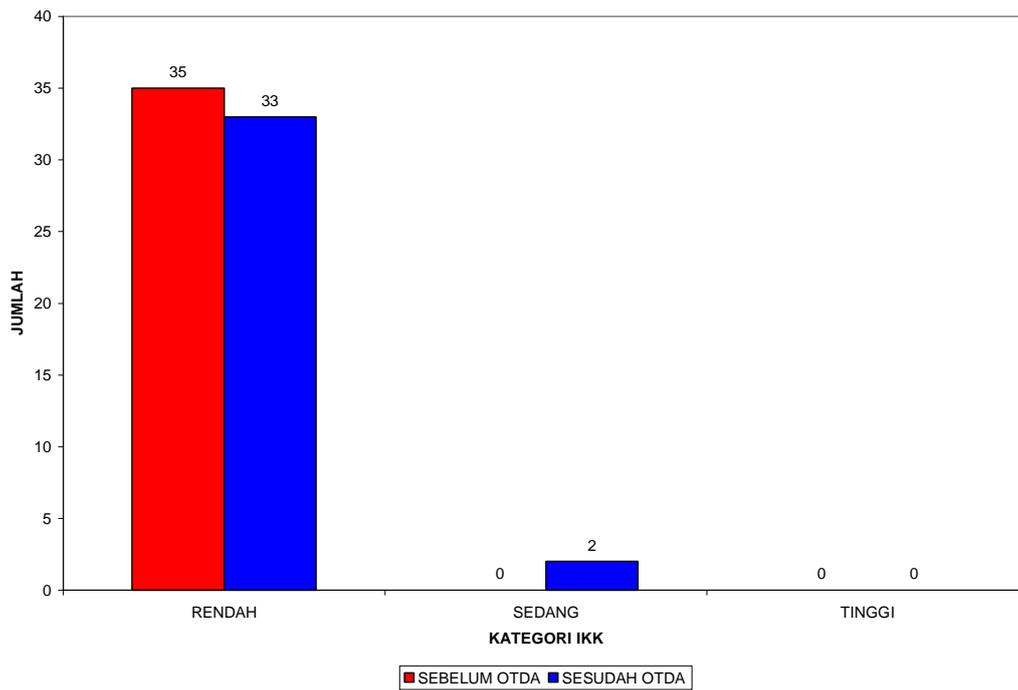
GRAFIK INDEKS ELASTISITAS



GRAFIK INDEKS SHARE



GRAFIK IKK



**KEMAMPUAN KUANGAN DAERAH BERDASARKAN
PETA KEUANGAN DI KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TENGAH
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH TAHUN 1994-2008**

